

Milik Depdikbud
Tidak diperdagangkan



Sejarah Kebudayaan
MALUKU

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
JAKARTA
1999

Milik Depdikbud
Tidak diperdagangkan

SEJARAH KEBUDAYAAN MALUKU

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
JAKARTA
1999**

SEJARAH KEBUDAYAAN MALUKU

Tim Penulis : R.Z. Leirissa
G.A. Ohorella
Djuariah Latuconsina

Penyunting : G.A. Ohorella

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang

Diterbitkan oleh : Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional
Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal
Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Jakarta 1999

Edisi 1999

Dicetak oleh : **CV. ILHAM BANGUN KARYA**

ISBN 979-9335-07-8

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN

Karya-karya sejarah dengan berbagai aspek yang dikaji dan ditulis melalui Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional (Proyek IDSN), dimaksudkan untuk disebarluaskan ke tengah-tengah masyarakat. Tujuannya adalah untuk memberikan bahan informasi kesejarahan kepada masyarakat. Dengan demikian diharapkan banyak pihak akan menambah pengetahuannya tentang sejarah, baik yang menyangkut akumulasi fakta maupun proses peristiwa. Di samping itu, para pembaca juga akan memperoleh nilai-nilai kesejarahan, baik mengenai kepahlawanan, kejuangan, maupun perkembangan budaya yang terungkap dari paparan yang terdapat dalam karya-karya sejarah itu.

Kami menyadari bahwa buku-buku karya Proyek IDSN itu tidak luput dari berbagai kelemahan: isi, bahasa, maupun penyajiannya, namun kami meyakinkan pembaca bahwa kesalahan dan kelemahan itu tidaklah disengaja. Untuk itu, diharapkan kepada pembaca untuk memberikan kritik, saran perbaikan terhadap karya-karya Proyek IDSN ini. Kritik dan saran itu tentu akan sangat berguna untuk memperbaiki karya-karya proyek ini.

Kepada para penulis yang telah menyelesaikan tugasnya dan kepada semua pihak yang ikut serta, baik langsung

maupun tidak langsung dalam mewujudkan karya-karya
Proyek IDSN sebagaimana adanya ditangan pembaca,
kami sampaikan terima kasih.

Jakarta, Juli 1999
Direktur Jenderal Kebudayaan

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'IGN. Anom', written over a horizontal line.

IGN. Anom
NIP. 130353848

PENGANTAR

Buku *Sejarah Kebudayaan Maluku*, merupakan salah satu hasil pelaksanaan kegiatan penelitian Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 1999/2000.

Penelitian dan penulisan Sejarah Kebudayaan Maluku ini merupakan studi lanjutan dari penulisan sejarah-sejarah kebudayaan di berbagai daerah di Indonesia yang dilakukan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional. Pada tahap awal sudah dilakukan inventarisasi dan Dokumentasi terhadap sejarah kebudayaan Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan selanjutnya akan dilakukan secara bertahap.

Buku ini memuat uraian tentang keadilan Maluku, dimulai masuknya agama Islam hingga perkembangannya, perdagangan dan kebudayaan, terutama tentang bahasa-bahasa lokal dan kepata serta mengenai sistem kesatuan hidup di daerah tersebut.

Dengan diterbitkannya *Sejarah Kebudayaan Maluku* ini diharapkan akan memperkaya khasanah kesejarahan serta memberi embaran yang memadai bagi masyarakat serta memberi petunjuk bagi kajian selanjutnya. Di samping itu diharapkan akan menjadi semacam acuan untuk dapat meningkatkan kesadaran bagi generasi selanjutnya.

Kepada semua pihak yang terkait dan telah membantu dalam proses penerbitan buku ini diucapkan terima kasih.

Jakarta, Juli 1999

**Pemimpin Proyek Inventarisasi dan
Dokumentasi Sejarah Nasional**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Wiwi Kuswiah', written in a cursive style.

Wiwi Kuswiah
NIP. 131125902

PENGANTAR

Penelitian dan Penulisan Sejarah Kebudayaan Maluku ini difokuskan pada abad 15 sampai abad 19. Pembatasan waktu ini dimaksudkan untuk menentukan fokus-fokus yang diperlukan sesuai kenyataan data yang tersedia. Selain itu pembahasan mengenai aspek-aspek tertentu diupayakan untuk mengangkat “puncak-puncak” kebudayaan yang terdapat di daerah itu. Meskipun demikian aspek-aspek lain yang merupakan hasil penelitian kepustakaan dikemukakan juga, sehingga uraian yang ada tidak terbatas pada kurun waktu tersebut diatas, tetapi juga mengenai masa prasejarah yang menjelaskan adanya lapisan-lapisan budaya asli. Demikian pula tentang kebudayaan yang nampak pada masa-masa akhir penjajahan, yaitu awal abad ke-20. Hal itu dilakukan untuk memperlihatkan adanya pengaruh kebudayaan asing atau luar terhadap perkembangan kebudayaan Maluku.

Sebelum melaksanakan penelitian baik kepustakaan maupun lapangan, tim terlebih dahulu mempelajari dengan seksama kerangka acuan yang ditetapkan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional dan kerangka pikir yang disampaikan ketua tim Prof. Dr. R.Z. Leirissa. Dengan metode historigrafi aspek-aspek yang dikaji dan ditulis dalam naskah/ buku ini dibagi dalam enam bab meliputi Bab Pendahuluan atau Bab I, yang memuat identifikasi wilayah Maluku, penduduknya, perekonomian dan sistim kepercayaan sebelum masuknya pengaruh asing ataupun agama-agama besar. Bab II berisi uraian tentang Agama-agama Kitabiyah : yaitu

bagaimana dan kapan agama-agama tersebut masuk ke Maluku serta pengaruhnya terhadap kehidupan dan kebudayaan penduduk. Pada Bab III dan Bab IV tim mencoba mengangkat perkembangan kebudayaan yang ada di Maluku bagian Utara dan Maluku bagian Tengah yang meliputi geografi, politik dan ekonomi, perdagangan dan kebudayaan, bahasa Melayu dan bahasa-bahasa lokal, serta pela dan siwa lima. Dalam bab V tentang Maluku bagian Tenggara, diuraikan mengenai geografi dan penduduk, sistem kesatuan hidup, Kesenian dan teknologi serta kaitannya dengan perdagangan dan kebudayaan. Bab VI merupakan Simpulan dari penulisan yang diharapkan dapat memperoleh masukan-masukan untuk pengembangan budaya dan sekaligus pengembangan pariwisata daerah.

Pada akhirnya ada foto-foto yang dilampirkan, merupakan bangunan-bangunan dan benda-benda hasil karya masyarakat yang mungkin dapat dimanfaatkan dan diperkembangkan dalam rangka pemahaman keanekaragaman budaya Nusantara serta pengembangan pariwisata. Harapan kami semoga tulisan ini dapat menambah khasanah sejarah kebudayaan di Indonesia dan tak lupa mohon saran dan kritik untuk merangsang penelitian-penelitian yang lebih berkualitas di masa depan.

Tim Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
Sambutan Direktorat Jenderal Kebudayaan	v
Kata Pengantar	vii
Pengantar	ix
Daftar Isi	xi
Daftar peta	xiii
Bab I. Pendahuluan	
1.1 Identifikasi Wilayah	1
1.2 Penduduk	4
1.3 Perekonomian	7
1.4 Sistem Kepercayaan	9
Bab II. Agama-Agama Kitabiyah	
2.1 Masuknya Agama Islam di Maluku	13
2.2 Perkembangan Islam dan Pengaruhnya	21
2.3 Agama Kristen di Maluku	28
2.4 Pengaruh Agama Kristen Terhadap Kebudayaan Penduduk	32
Bab III. Maluku Utara	
3.1 Geografi dan Politik	39
3.2 Perdagangan dan Kebudayaan	48
3.3 Bahasa-bahasa Lokal	54

3.4	Bahasa Melayu	57
3.5	Maluku Kie Raha	58
Bab IV. Maluku Tengah		
4.1	Geografi dan Ekonomi	67
4.2	Bahasa-bahasa Lokal dan Kapata	76
4.3	Bahasa Melayu dan Agama Kristen	85
4.4	Pela dan Siwa Lima	93
Bab V. Maluku Tenggara		
5.1	Geografi dan Penduduk	51
5.2	Sistim Kesatuan Hidup	52
5.3	Kesenian dan Teknologi	53
Bab VI. Simpulan		121
Daftar Kepustakaan		125
Foto-Foto		132

DAFTAR PETA

	Halaman
1. Peta Geografi Maluku Utara	47
2. Peta Kebahasaan di Maluku Utara	56
3. Peta Geografi Propinsi Maluku	63
4. Peta Geografi Maluku Tengah	75
5. Peta Bahasa Lokal Menurut Collins	77
6. Peta Masa Masuknya Islam di Indonesia	131

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Identifikasi Wilayah

Istilah *Maluku* pada mulanya menunjuk pada keempat pusat kerajaan atau kedaton di Maluku Utara, yaitu Ternate, Tidore, Bacan dan Jailolo. Suatu bentuk konfederasi tertentu dari keempat kerajaan tersebut yang kemungkinan besar muncul dalam abad ke-14, disebut *Maloko Kie Raha* atau empat gunung Maluku. Sekalipun kemudian keempat kerajaan itu berekspansi sehingga mencakup seluruh Maluku Utara (sekarang) dan sebagian dari Sulawesi dan Irian Jaya, namun wilayah ekspansi itu tidak tercakup dalam istilah Maluku yang hanya menunjuk pada pusat-pusat kerajaan tersebut di atas.

Dengan sendirinya wilayah kepulauan Ambon (yang kini dinamakan Maluku Tengah) dan sebagian wilayah kepulauan Banda (yang kini dinamakan Maluku Tenggara) dalam masa itu sama sekali tidak tercakup dalam pengertian asli dari istilah Maluku itu.

Dari segi etimologi arti dari kata *Maluku* memang tidak terlalu jelas, sehingga menjadi bahan spekulasi dari berbagai kalangan dan ahli. Pada suatu ketika banyak diterima umum bahwa istilah itu berasal dari bahasa Arab dengan bentuk aslinya diperkirakan sebagai *Jaziratul Muluk*, yang berarti wilayah banyak raja (muluk adalah bentuk jamak dari malik yang berarti raja). Kenyataan bahwa di Maluku Utara terdapat

empat raja sebagai kelaziman politik agaknya menjadi ilham bagi pemberian arti dari kata Maluku tersebut. Namun kalau diingat bahwa istilah *Maluku* itu telah digunakan sebelum masuknya agama Islam di wilayah itu dalam abad ke-15, maka keterangan tersebut masih diperlukan kajian yang lebih teliti.

Suatu pendapat dari seorang Antropolog Belanda, Dr. Ch. F. Van Fraassen, patut dikemukakan di sini sebagai pertimbangan pula. Van Fraassen mengadakan penelitian mengenai sistem pemerintahan tradisional dan pola pengaturan masyarakatnya dan mengenal pola budaya dan bahasa setempat. Ia berargumentasi, bahwa ada kemungkinan kata *Maluku* seperti digunakan di Maluku Utara dalam masa-masa sebelum abad ke-18 mengandung arti dunia, yang hampir sama dengan kata *bhumi* atau *bhuwana* dalam tradisi politik Jawa. (Van Fraassen 1987, II: 16-27).

Arti kata *ma* memang tidak menimbulkan masalah karena cukup umum di Maluku Utara, khususnya bahasa-bahasa non-Austronesia. Kata itu berfungsi sebagai kata penghubung, antara lain, sebagai kata ganti empunya persona ke-3 jenis netral, seperti kata-kata *ma ba'ba* yang berarti ayah saya, atau *ma nau'u* yang berarti suami saya, dsb. (Visser & Voorhoeve 1987 : 136,37). Masalah timbul pada arti kata *loko* yang tidak bisa dijelaskan, sehingga *Van Fraassen* mendapat kebebasan untuk membuat suatu interpretasi yang cukup menarik.

Ia menemukan, bahwa dalam salah satu bahasa di Halmahera Utara, arti kata *loko* mengacu pada gunung. Gunung sebagai lambang kerajaan adalah suatu hal yang lumrah pula di masa lampau, terutama di Jawa dan Sumatera (Syailendra, umpamanya). Bahkan kedaton bisa dilambangkan sebagai gunung, sehingga kedaton Ternate disebut pula sebagai *Ternate ma-loko*, dan kedaton *Tidore* disebut *Tidore ma-loko*, dsb.

Selanjutnya *Van Fraassen* meluaskan interpretasinya dengan mengemukakan bahwa mungkin istilah *loko* di Maluku Utara itu mengandung makna yang sama dengan kata *loka* di

Jawa, bahwa mungkin berakar pada kata Sansekerta itu, yang berarti tempat atau bumi. Kalau argumentasi itu benar, maka *ma-loko* bisa dikatakan mengandung arti yang sama dengan arti yang diberikan dalam tradisi kekuasaan di Jawa. Maka dengan demikian *Maloko* atau *Maluku* berarti *penguasa dunia*.

Karena setiap raja di Maluku, baik Ternate, Tidore, Bacan, maupun Jailolo, menggunakan istilah *maloko* sebagai bagian dari gelar kebesarannya, maka dengan sendirinya ini berarti bahwa setiap raja atau sultan tersebut adalah *penguasa dunia*. Namun berbeda dengan di Jawa, kehadiran empat penguasa dunia di Maluku Utara justru merupakan kelaziman. Interaksi antara mereka diatur sedemikian rupa sehingga konflik-konflik yang menghancurkan bisa dihindari. Inilah makna pokok dari ideologi *Maloko Kie Raha* (Maluku Empat Gunung) yang membenarkan adanya konfederasi tersebut.

Argumentasi dari Van Fraassen tersebut memang menarik, kecuali satu hal. Belum ada seorang ahli linguistik yang mempelajari bahasa-bahasa di Maluku Utara berkesimpulan bahwa dalam bahasa-bahasa di wilayah itu terdapat pengaruh bahasa Sansekerta. Sebab itu agak sulit kita membuat loncatan pemikiran dengan mengatakan bahwa *loko* mengandung arti yang sama atau hampir sama dengan *loka*. Namun tekanan pada *Maloko Kie Raha* sebagai ideologi yang mempersatukan kerajaan-kerajaan di Maluku Utara, terutama sebelum VOC menjadi dominan dalam abad ke-17, adalah suatu kesimpulan yang didukung oleh banyak fakta.

Penelitian lebih lanjut mengenai kebahasaan barangkali bisa membuka jalan ke arah penjelasan mengenai arti kata Maluku itu. Kamus bahasa Sahu yang disusun oleh Visser dan Voorhoeve, umpamanya, tidak mencantumkan kata *loko*. (Visser & Voorhoeve : 1987).

Wilayah Maluku yang sekarang ini luasnya kurang lebih 900 km², umumnya terdiri atas pulau-pulau vulkanis atau pulau-pulau karang yang berbukit-bukit dan bergunung-gunung, sehingga tidak terdapat dataran rendah yang luas

seperti di Sulawesi atau di pulau Jawa. Bagaimana kondisi wilayah ini pada beberapa abad yang lalu terutama pada masa-masa Emporium sampai masa Imperium, belum ada penelitian yang mendalam dan akurat. Akan tetapi dengan adanya beberapa penulisan dari abad ke 16--18 dapat disimpulkan bahwa tidak banyak perubahan yang terjadi atas topografi kepulauan ini. Kalau pun ada perubahan itu tidak berarti. Di pulau-pulau yang dapat dikatakan besar seperti Halmahera, Morotai, Obi, Taliabu, Seram, Buru, Aru dan Tanimbar ada juga dataran-dataran rendah yang relatif cukup luas. Sedang pulau-pulau yang tidak terlalu luas berfungsi sebagai pelabuhan-pelabuhan transito, bahkan pernah berjaya sebagai bandar kecil maupun bandar dagang yang ramai di masa lalu. Pulau-pulau Ternate, Tidore, Bacan, Makian, Sula, Ambon, Saparua, Haruku, Nusa Laut, Banda, Kei, Luang, Babar, Wetar, dan Damar pernah tercatat sebagai pulau-pulau yang menghasilkan komoditi tertentu yang dibutuhkan manusia sampai di Eropa.

Deretan pulau-pulau tersebut kini berada dalam suatu wilayah administrasi pemerintahan bernama Maluku dengan persentase hampir 90% terdiri dari lautan dan 10% sisanya merupakan daratan. Rincian mengenai geografi dan administrasi akan diuraikan dalam bab III dan IV tentang masing-masing wilayah.

1.2 Penduduk

Penduduk Maluku dewasa ini terdiri atas berbagai suku bangsa Indonesia yang bermigrasi ke daerah ini sejak masa Kolonial. Bahkan bila dikaji lebih jauh ke belakang sejak masa Emporium dan di masa Imperium, telah banyak suku bangsa bahkan ras-ras dari berbagai negeri dan benua telah datang ke daerah ini. Pertemuan antar ras dan suku bangsa ini, kemungkinan besar telah terjadi percampuran sehingga melahirkan keturunan-keturunan yang baru dengan berbagai pola tingkah budayanya. Hal ini seperti diutarakan Prof. EKM. Masinambow bahwa di beberapa kota sebagai pusat kegiatan ekonomi dan perdagangan meletakkan hubungan komunikasi

jauh ke luar batas-batas Nusantara. Sebagai akibat hubungan-hubungan itu terjadi konvergensi gerakan barang dan manusia ke kota-kota tersebut. Dengan demikian tercipta kondisi sosial budaya bahkan sosiolinguistik yang memungkinkan berkembangnya segala unsur kebudayaan. (EKM. Masinambow : 1996).

Dari segi Ethnologi penduduk kepulauan Maluku merupakan percampuran berbagai ras seperti Ras Austronesia, Polinesia, Deutro Melayu dan Melanesia. Sekarang ini dapat dibedakan atas suku-suku bangsa yang mendiami beberapa pusat-pusat lingkungan kebudayaan seperti *kebudayaan masyarakat peladang serta pemburu* yang masih sering berpindah tempat dan *kebudayaan pantai* yang diwarnai kebudayaan Islam. Klasifikasi kelompok kebudayaan seperti itu dilakukan oleh Hildred Geertz (1963) yang memasukkan kebudayaan orang-orang Halmahera di Maluku Utara dan orang Alune dan Wemale di pedalaman Seram bersama-sama orang Dayak, orang Toraja, orang Gayo dan orang Rejang serta orang Lampung ke dalam satu kelompok kebudayaan yaitu, kebudayaan masyarakat peladang serta pemburu. Di pihak lain ada kebudayaan masyarakat pantai yang ditandai dengan pengaruh Islam yang kuat serta kegiatan dagang yang menonjol. Kebudayaan tersebut tersebar di sepanjang pantai di Indonesia yang didukung oleh orang-orang Melayu. Kebudayaan ini dianut pula oleh orang-orang atau suku bangsa Ambon (Hitu), Ternate, Tobelo, Makian, Patani, Key dan orang-orang yang berdiam di beberapa pulau di Maluku Tenggara. Suku-suku bangsa yang lain di Maluku misalnya : Morotai, Togutil, Galela, Gane, Weda, Maba, Taliabu, Sula, Seram, Saparua, Rana, Kayeli, Tuguis, Rifato dan Ribolo. Hildred Geertz selanjutnya menguraikan bahwa penganut kebudayaan pantai ini, karena kegiatan berdagang, mereka menduduki pusat-pusat perdagangan sepanjang pantai bersama-sama dengan pedagang yang berdatangan dari berbagai penjuru dunia. Mereka itu mengembangkan kebudayaan yang berorientasi pada perdagangan dan sangat mengutamakan pendidikan agama dan Hukum Islam serta

mengembangkan bentuk tari, musik dan kesusasteraan sebagai unsur pemersatu utamanya. (Hildred Geertz : 1963). Ciri kebudayaan tersebut masih nampak dewasa ini pada masyarakat pantai yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Akan tetapi dengan adanya penghayatan terhadap ajaran Islam yang lebih mendalam, perkembangan kesenian seperti tari dan musik cenderung mengalami keterlambatan.

Dalam hal perkembangan dan konsentrasi penduduk, pada beberapa daerah tertentu mengalami perkembangan/kepadatan yang lebih cepat, dibandingkan dengan perkembangan wilayah hunian dan lahan pertanian. Oleh sebab itu sejak awal kemerdekaan telah dikembangkan objek-objek transmigrasi lokal untuk menanggulangi perkembangan penduduk dan kepadatan penduduk pada suatu daerah atau desa tertentu. Proyek ini memang merupakan lanjutan dari pemindahan penduduk pada masa Kolonial Belanda dulu. Pemindahan penduduk tersebut serta intensifikasi sistem administrasi pemerintahan oleh pemerintah kolonial, bertujuan mengendorkan ikatan kesatuan sosial yang berlandaskan ikatan kekerabatan. Disamping ada juga upaya pemerintah di bidang kristenisasi (penyebaran agama).

Sebelum adanya upaya oleh pemerintah Belanda tersebut, konsentrasi penduduk di Maluku umumnya dipisahkan menurut agama yang dianut (Islam dan Kristen). Sehingga ada desa yang hampir seluruh penduduknya beragama Islam dan demikian pula ada desa yang hampir seluruh penduduknya beragama Kristen. Pertentangan antara kedua golongan ini pernah nampak sampai ke permukaan karena terpicu oleh politik pemerintah kolonial, baik Portugis maupun Belanda. Akan tetapi dengan adanya *sistem pela*, pertentangan antara kedua golongan dapat terbandung. Bahkan sebaliknya tercipta hubungan yang akrab dan kerjasama yang baik atas dasar kekerabatan *pela* tersebut. *Pela* adalah suatu lembaga kekerabatan yang terjalin antara dua buah desa atau lebih yang dikukuhkan secara adat dalam suatu upacara. Lembaga ini mempunyai ikatan religius magis yang kuat yang mengikat

warganya, karena ikatan perjanjian yang telah dibuat para leluhur dari dua desa atau lebih itu. Penduduk dari dua desa yang berpela (*baku-pela*) harus tolong menolong dalam susah dan senang. Bahkan ada pula yang tidak boleh saling kawin.

Jumlah penduduk dewasa ini jauh lebih meningkat selain karena migrasi penduduk, tingkat kelahiran pun bertambah. Akibatnya etnisitas pun bervariasi sejalan dengan perkembangan sosial budaya.

1.3 Perekonomian

Menyinggung tentang perekonomian daerah ini, kepulauan Maluku telah termasuk dalam jaringan perdagangan di Nusantara sejak masa prasejarah dan masa emporium. Para pedagang mancanegara telah berhubungan dengan penduduk Maluku dalam perdagangan berbagai jenis komoditi terutama rempah-rempah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perekonomian penduduk telah mencapai tingkat tertentu karena yang memadai berkat adanya hubungan dagang yang luas itu. Penduduk menanam cengkeh dan pala karena mendatangkan hasil dan keuntungan yang berlimpah. Pertanian yang menghasilkan bahan makanan seperti beras tidak terlalu dikenal, tetapi tanaman yang memproduksi makanan pokok sagu tumbuh di mana-mana. Pohon rumbia yang menghasilkan sagu itu tanpa pemeliharaan yang intensif dapat memberi hasil yang banyak bagi penduduk. Melalui pengolahan yang sederhana sebatang pohon rumbia dapat menghasilkan 10 sampai 20 tumang tepung sagu. Tepung-tepung sagu itu dapat dimakan selama dua sampai tiga bulan oleh 3 atau 4 keluarga yang berjumlah 10 sampai 20 orang. Pertanian di ladang atau kebun juga sudah dikenal penduduk Maluku. Mereka menanam kacang-kacangan dan umbi-umbian seperti ubi kayu (*kasbi*), ubi jalar (*patatas*), ubi talas (*keladi*), kombili dan sebagainya. Kacang-kacangan yaitu kacang hijau, kacang merah, kacang tanah dan sebagainya, dan juga pisang. Untuk lauknya yang utama adalah ikan. Disamping itu penduduk juga suka memakan daging rusa yang diburu di hutan atau ditangkap dengan menggunakan *dodeso*.

Lautan yang luas menghasilkan berbagai jenis ikan yang berlimpah dapat ditangkap dengan teknologi tradisional. Ikan yang banyak itu dapat memenuhi kebutuhan penduduk, bahkan dapat diperdagangkan antar pulau di Maluku dan juga kepada pendatang dari luar daerah Maluku. Selain ikan, berbagai hasil laut seperti teripang, kerang, lola dan rumput laut (agar-agar) juga diperdagangkan atau ditukarkan pada pedagang-pedagang mancanegara. Bahkan sampai tiram mutiara dan biji mutiara yang mempunyai nilai jual yang tinggi dalam perdagangan maupun kebanggaan bagi yang memilikinya sudah menjadi salah satu komoditi penting sejak dahulu sampai kini.

Hubungan yang dijalin dengan orang-orang Bugis, Makassar, Buton, Jawa bahkan Cina dan Eropa adalah dalam perdagangan rempah-rempah cengkeh dan pala serta burung-burung yang indah. Ada juga wangi-wangian dari akar-akaran dan kayu seperti kayu cendana dan gaharu. Dari perdagangan rempah-rempah itu penduduk Maluku dapat membeli atau menukarkan dengan bahan pakaian, sutera dan porselen atau keramik. Pelabuhan-pelabuhan seperti Banda, Hitu dan Ternate merupakan tempat penumpukan barang yang akan didistribusikan ke daerah-daerah lain di Maluku dan sebaliknya untuk mengangkut hasil dari Maluku untuk diperdagangkan ke berbagai daerah di Nusantara bagian barat sampai ke Malaka. Melalui hubungan dagang yang semakin meningkat dan lalu lintas perdagangan yang semakin lancar, penduduk Maluku mengenal berbagai konsep pengetahuan dalam bidang perekonomian. Demikian juga mereka dapat mengenal nilai barang dan mata uang sehingga kehidupan perekonomian mereka relatif baik pada masa-masa emporium sampai dengan masa imperium. Mata uang atau alat tukar yang digunakan penduduk sangat bervariasi dan tergantung dengan siapa transaksi diadakan. Sebelum masa emporium alat tukar yang digunakan adalah berbagai kulit siput dan kerang yang dapat dijadikan sebagai perhiasan wanita. Penduduk juga melakukan perdagangan cara barter, dengan para pedagang dari berbagai wilayah di Nusantara atau mancanegara. Kemudian cengkeh mereka dibeli dengan menggunakan mata uang oleh pedagang

Cina, Arab dan bangsa Eropa. Mereka kemudian mengenal kepeng, ringgit, real dan gulden. Karena kekayaan yang melimpah para pemimpin tradisional seperti para raja, sultan dan pejabat lainnya dapat membeli budak dari hasil cengkeh dan pala. Para pedagang Maluku dapat mengarungi lautan sampai ke Jawa dan Malaka dan membawa berbagai barang dagangan yang mahal harganya. Di masa kejayaan kerajaan-kerajaan tradisional Ternate, Tidore dan Hitu ada kelompok penduduk yang sudah memiliki armada-armada dagang/pelayaran yang berlayar sampai ke Jawa dan Malaka bahkan sampai ke Sulu dan Mindanao.

Kehidupan perekonomian Maluku mulai merosot, ketika bangsa Portugis dan Belanda datang pada abad ke 16 dan 17 kemudian merekrut perdagangan rempah-rempah. Keadaan itu terus menjadi parah ketika pemerintah kolonial Belanda mulai menjalankan sistem *hongi* dan *ekstirpasi* pada akhir abad ke-18. Kebun cengkeh dan pala rakyat ditebang atau dibakar untuk menghindari menumpuknya hasil cengkeh yang dapat berakibat turunnya harga komoditi ini di pasar Eropa. Keuntungan yang melimpah dari hasil perdagangan cengkeh itu mendorong pegawai dan pejabat-pejabat VOC menjalankan praktek korupsi dan kolusi. Akhirnya kongsi dagang itu bangkrut. Seiring dengan bangkrutnya VOC itu pemerintah kolonial juga meninggalkan Maluku dalam keadaan miskin. Tanaman cengkeh dan pala yang ditebang atau dibakar untuk mencegah merosotnya harga rempah-rempah, mengakibatkan keadaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat semakin merosot. Pada akhirnya maluku hanya dikenang sebagai suatu mata rantai perekonomian yang hilang. Dalam ungkapan lain disebutkan *Maluku adalah masa silam*.

1.4 Sistem Kepercayaan

Penduduk Maluku seperti halnya makhluk manusia yang hidup di dunia ini dipengaruhi oleh alam sekitar. Cara berfikir dan pandangan hidup mereka sangat tergantung pada sekitaran alam di mana mereka menggantungkan hidup.

Timbulnya perasaan segan dan takut terhadap tantangan-tantangan alam yang dihadapi mendorong manusia untuk mencari dan menemukan rahasia di balik tantangan alam tadi. Hal itulah yang mendorong manusia untuk mempercayai adanya kekuatan-kekuatan alam, sehingga timbul sistem kepercayaan pada masyarakat tersebut.

Sebelum masuknya agama Islam dan Kristen di Maluku, penduduk asli di Maluku telah memiliki satu kepercayaan yang disebut *kepercayaan asli*. Sistem kepercayaan ini terdiri dari kepercayaan animisme dan dinamisme. Animisme adalah sistem kepercayaan yang menganggap bahwa seluruh alam ini dihuni oleh roh atau jiwa, ada roh yang baik adapula roh jahat. Di Maluku, kepercayaan kepada roh ini dihubungkan dengan roh nenek moyang. Upacara-upacara adat yang sampai sekarang ini masih dilaksanakan menunjukkan adanya sistem kepercayaan itu. Di samping itu terdapat kepercayaan dinamisme yaitu kepercayaan terhadap kekuatan-kekuatan gaib yang dimiliki oleh benda-benda tertentu, misalnya batu besar, pohon besar atau benda-benda pusaka. Selain itu ada pula kepercayaan kepada tempat-tempat tertentu yang suci dan keramat. Sistem *kepercayaan* asli ini sampai sekarang masih ditemukan di berbagai pelosok Kepulauan Maluku.

Di Maluku Utara misalnya, penyembahan terhadap roh nenek moyang di Ternate disebut *Gomangga*. Peraturan-peraturan dari nenek moyang sampai sekarang masih dipegang dan takut dilanggar karena dapat mendatangkan malapetaka. Berbagai bentuk roh jahat juga dikenal, antara lain Hate-madubo, Meki, Gonda yang masing-masing mendiami pohon-pohon, gunung dan goa. Di Ternate juga terdapat satu kepercayaan kepada roh tertinggi yang disebut *Gikirimoi* artinya pribadi tertinggi yang tidak kelihatan yang menciptakan bumi dan segala isinya. Kekuasaannya diserahkan kepada manusia pertama yang diciptakannya dan manusia itulah yang menjadi nenek moyang masyarakat Ternate yang selalu dipuja-puji. Di Tidore roh tertinggi disebut *Jou Wange* yang menurunkan kekuatannya kepada seseorang yang disebut *Momale*, yaitu orang yang menjalankan upacara-upacara adat.

Di Maluku Tengah masih ada pemujaan terhadap tempat-tempat yang dianggap suci disamping ada pula tempat-tempat yang menakutkan. Di pulau Ambon sampai dewasa ini masih ada sisa kepercayaan tersebut. Misalnya; pemujaan terhadap Batu Marawael di desa Hatalae, Tampayang Setan di gunung Sirimau, pemujaan terhadap Batu Teong di negeri-negeri Uri Meseng, pemujaan batu-batu pamali di rumah Baileo, tempat-tempat keramat di desa-desa Pelau, Kabau dan Ruhumoni serta tempat-tempat tertentu di Negeri-Lima yang terdapat di gunung-gunung memberi gambaran tentang adanya sisa kepercayaan animisme dan dinamisme. Semuanya sebagai tempat memohon kekuatan baik oleh individu maupun seluruh warga desa. Tempat-tempat itu dipakai sebagai tempat bertemu dan berbicara dengan roh nenek moyang yang telah meninggal. Di situ terdapat kepercayaan akan kekuatan magis, misalnya mengobati orang sakit dengan *tiup-tiup*, pemakaian *Tali Kaeng* (ikat pinggang) sebagai jimat untuk menghindarkan diri dari mara bahaya, dan sebagainya. Namun kepercayaan akan adanya maha pencipta segala sesuatu di dunia ini, juga diyakini. Istilah yang digunakan adalah *Upu Lanite* atau *Upu Datu*.

Di Maluku Tenggara khususnya di kepulauan Kei kepercayaan animisme disebut dengan istilah *Ngu-Mat*, sedangkan dinamisme disebut *Wadar Metu*. Kedua kekuatan ini menguasai kehidupan masyarakat, terbukti dari adanya bermacam-macam upacara adat dalam bentuk pemujaan kepada *Nit-Jamad-Ubud* (tete-nene moyang), *Ler Wuan* (matahari dan bulan), *Aiwarat* (pohon-pohon), *Aiwat* (batu-batu), *Rahanyam* (mata rumah), *Tun-Lair* (tanjung dan labuan), *Nuhu-Tanat* (gunung-tanah = bukit dan dataran), *Wama-kasal* (pusat negeri-desa), dan *Kabur-hat* (kuburan). Pada tempat-tempat ini masyarakat sering mengadakan upacara adat, dan yang memimpin adalah *Metuduan* yang sama dengan *Mauweng* di Maluku Tengah. Di samping itu masyarakat mengenal benda-benda jimat untuk kekuatan diri terhadap senjata-senjata tajam disebut *Mamar*.

Sisa kepercayaan asli ini masih tetap dipertahankan di desa-desa di Maluku walaupun mereka telah menyatakan diri sebagai penganut agama Islam atau Kristen. Malahan terdapat campuran antara aturan dan nilai agama tersebut dengan aturan nilai kepercayaan asli yang dikenal dengan sinkritisme. (Putuhena, 265).

BAB II

AGAMA-AGAMA KITABIYAH

2.1 Agama Islam di Maluku

Bab ini memfokuskan kajian pada sejarah masuk dan berkembangnya agama Islam dan Kristen di Maluku yang menurut beberapa sumber berlangsung sejak abad ke-15 sampai sekarang. Dengan rentang waktu yang cukup panjang itu kedua agama telah memberikan warna dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat di Maluku baik dalam aspek sosial, ekonomi, politik maupun budayanya. Dampak perkembangan kedua agama tersebut di Maluku merupakan fenomena sosial kultural, sehingga untuk mengkaji dan mengidentifikasi gejalanya secara bulat diperlukan suatu pendekatan yang tepat yaitu pendekatan diakronik.

Sumber-sumber sejarah yang dapat digunakan, berupa sumber tertulis maupun lisan serta hasil observasi ke lapangan. Hanya dengan memahami secara mendalam proses perkembangan kedua agama tersebut dan adanya saling pengertian antara umat pemeluk kedua agama yang berbeda dapat menghasilkan persepsi dan interpretasi yang lebih bermutu demi pembangunan daerah Maluku di masa mendatang.

Maluku Utara

Berita yang pasti mengenai masuknya agama Islam di Maluku seperti halnya di daerah-daerah lain di Indonesia masih

terdapat berbagai perbedaan pendapat. Aneka perbedaan pendapat ini dimungkinkan karena berbagai faktor. Diantaranya karena kurangnya sumber tertulis, sikap peneliti terhadap sumber-sumber yang ada dan prasangka yang berlebihan serta perbedaan pendapat tentang arti masuknya agama Islam itu sendiri (Putuhena, 1970 : 263). Selanjutnya dikatakan bahwa paling sedikit ada tiga macam pengertian tentang masuknya agama Islam. Pertama, Islam dikatakan masuk di suatu daerah bila telah ada seorang atau beberapa orang asing yang beragama Islam di daerah itu. Kedua, agama Islam dikatakan masuk ke suatu daerah bila telah ada orang-orang atau beberapa penduduk asli yang memeluk agama Islam. Ketiga, agama Islam dikatakan masuk ke suatu daerah bila agama Islam telah melembaga dalam masyarakat di daerah itu. Ketiga pendapat ini dapat disimak pada proses masuk dan berkembangnya Islam di Maluku khususnya di Maluku Utara. Masuknya Islam di Maluku Utara menurut M. Saleh Putuhena yang telah mengadakan penelitian di daerah itu, mengemukakan bahwa tradisi lisan setempat, yang disampaikan H. Abdul Habib Jiko dan M.A. Chan bahwa pada abad kedua Hijriah akhir (abad ke-8 Masehi) telah tiba di kepulauan Maluku Utara empat orang syekh dari Irak. Kedatangan mereka dikaitkan dengan pergolakan politik di Irak yang mengakibatkan golongan Syiah dikejar-kejar oleh penguasa, baik bani Umayyah maupun bani Abasiyah. Keempat orang yang membawa faham Syiah itu lalu pergi menyelamatkan diri menuju ke dunia timur dan akhirnya tiba di Maluku. Mereka itu adalah (1) Syekh Mansur yang mengajarkan agama Islam di Ternate dan Halmahera muka. Selanjutnya disebutkan bahwa setelah meninggal ia dikuburkan di puncak Gamalama di Ternate. (2) Syekh Yakub mengajarkan agama Islam di Tidore dan Makian, dan setelah meninggal dikuburkan di puncak Kie Besi (Gunung Besi) di pulau Tidore. (3) Syekh Amin dan (4) Syekh Umar. Dua orang tokoh ini mengajarkan agama Islam di Halmahera belakang, di daerah Maba, Patani dan sekitarnya. Dalam beberapa sumber keduanya dikabarkan kembali ke Irak. (Putuhena : Ibid). Jika keterangan tersebut dapat dipercaya, maka keempat orang syekh itu dapat dianggap sebagai orang-orang Islam pertama

yang datang ke Maluku Utara. Pergolakan politik yang terjadi di Irak adalah peristiwa peralihan kekuasaan dari Bani Umayyah ke tangan Bani Abasiyah pada pertengahan abad III Hijriah. Pada tahun tersebut yaitu tahun 132 H atau 750 M, Daulat Abbasiyah berdiri, lalu memindahkan pusat pemerintahannya dari Kuffah ke Bagdad. Dari masa pemerintahan Abu Dja'far Al Mansur (754-775 M) sampai, asa Harun ar-Rasyid (786-813 M). Daulat Abbasiyah lebih menekankan pembinaan pada pemurnian agama, peradaban dan kebudayaan Islam dari pada perluasan wilayahnya yang memang sudah luas itu. Sehubungan dengan program tersebut banyak ulama yang dikirim ke dunia Timur dan bagian dunia lainnya. Ada yang ditugaskan oleh kerajaan tetapi banyak pula yang diasingkan atau dibuang (Ensiclopedi Islam 1).

Naidah dalam tulisannya berjudul *Hikayat Ternate* tidak menyinggung ceritera tentang kedatangan keempat syekh di atas. Sebaliknya ia menceriterakan tentang kedatangan seorang keturunan Nabi Muhammad saw. Naidah menyebutkan bahwa tokoh Jafar Shadik yang disebut juga Jafar Nuh tiba di Ternate dari Jawa pada hari Senin tanggal 6 Muharram 643 Hijriah atau 1250 Masehi. (Naidah : 283). Tokoh ini dihubungkan nasabnya dengan Ali bin Abi Thalib yaitu sebagai cucunya dan disebut sebagai Imam yang keenam Mazhab Syiah. Jafar Shadik kemudian menikah dengan putri Ternate yang bernama Nur Sifa. Dari perkawinan itu Jafar Shadik memperoleh empat orang putra dan empat orang putri. Salah satu putranya adalah Masyhur Malamo yang ditetapkan sebagai raja pertama Ternate. Hal ini terjadi setelah ia berhasil mempersatukan kelompok-kelompok masyarakat yang telah ada pada waktu itu di Ternate. Kelompok tersebut diantaranya orang Tubo yang mendiami puncak gunung Gamalama dan orang Tobana yang mendiami daerah pantai. Masyhur Malamo adalah raja pertama dari zaman Kolano dalam sejarah politik Ternate (1257--1277 Masehi). Tiga orang putra lainnya masing-masing menjadi raja di Tidore, Jailolo dan Bacan.

Selanjutnya Cesar Adep Majul dalam laporan penelitiannya mengemukakan bahwa Islam masuk ke Ternate sekitar tahun jatuhnya Majapahit yaitu tahun 1478. Disebutkan bahwa

agama Islam dibawa oleh mubalig dari Jawa, yang disamping berdagang mempropagandakan agama. (Cesar Adep Majul, 1973 : 42). Sementara Antonio Golvao mencatat bahwa Islam masuk ke Ternate pada tahun 1460 dan berasal dari Malaka. Hal ini dihubungkan dengan adanya jalur perdagangan melalui utara. Jalur Ternate ke Sulawesi Utara kemudian ke Kalimantan Utara seterusnya ke Sulu dan akhirnya ke Malaka. Meilink-Roelofsz dalam tulisannya membuat pernyataan lain. Ia menyatakan bahwa Islam mulai tersebar ke Maluku Utara lebih awal dari Banda (Roelofsz, 1962 : 97). Dikatakan bahwa wilayah ini dari dulu telah dikunjungi pedagang-pedagang Melayu dari Jawa. Melalui para pedagang inilah Islam itu diterima. Oleh karena itu agama Islam tidak mendapat pengikut yang banyak, hanya para penguasa dan sebahagian kecil dari penduduk yang memeluk agama baru ini.

Selain para penulis tersebut di atas Prof. Hamka mencatat dalam Sejarah Ummat Islam bahwa sejak tahun 650, yaitu 17 tahun sesudah Nabi Muhammad wafat, para pedagang Arab telah membawa rempah-rempah cengkeh ke pelabuhan-pelabuhan di teluk Persia antara lain di Irak, untuk diperniagakan ke Eropa. Pada masa itu telah ramai perniagaan orang Arab dan Iran menuju Maluku untuk mencari cengkeh yang harganya sangat mahal di benua Eropa. Selanjutnya disinyalir bahwa mungkin saja para pedagang Arab itu telah menikah dengan perempuan pribumi, berdiam di sana sekian lama lalu pulang kembali atau meninggal. (Hamka : 1976). Sepeninggal mereka, karena terlalu lama tidak ada pemupukan Islam, keturunan mereka itu tenggelam kembali ke dalam suasana agama lamanya. Sinyalemen Hamka itu sejalan dengan cerita rakyat Ternate di dalam Naidah bahwa nenek moyang mereka datang dari Arab pada tahun 470 Hijriyah dan tahun 502 Hijriyah atau abad ke 11 dan 12 Masehi, jadi kira-kira 150 tahun sebelum kedatangan Jafar Shadiq. Uraian ini dapat dihubungkan dengan jalur perdagangan yang dilalui pedagang-pedagang Arab, Persia, Gujarat maupun Cina yang dikenal dalam sejarah sebagai jalur sutera atau silk road dan jalur rempah atau space route.

Maluku Tengah

Tentang masuknya Agama Islam di Maluku Tengah, Imam Ridjali yang menulis Hikayat Tanah Hitu menyebutkan bahwa pada tahun 1470 negeri Hitu sudah mulai mengadakan hubungan perdagangan dengan Japara di Pulau Jawa. Dikatakan bahwa Empat Perdana keempat yang dipimpin oleh Perdana Djamilu (Perdana Tanahitumessing) telah menyuruh orang ke Japara untuk mengadakan perjanjian dagang dengan Pangeran Japara (penguasa Japara) yang bernama Nyai Bawang. Dengan demikian terjadilah hubungan dagang antara Hitu dan Japara, kemudian beberapa orang Hitu telah pergi ke Jawa untuk belajar hukum Islam. Ridjali dan tradisi lisan setempat juga menyebutkan nama Syekh Maulana Abubakar Nasidik yang berasal dari Tuban, menjadi Imam dan penguasa pertama di Hitu. Tradisi lisan itu menyebutkan bahwa jazirah Leihitu mulai berkembang sejak munculnya para pendatang muslim dari Arab dan Persia sejak abad ke-12. Mereka itu datang dengan tujuan berdagang sambil berdakwah. Tradisi lisan itu dapat dihubungkan dengan keberadaan 2 (dua) buah naskah di desa Hitu yang berangka tahun 1234, dan salah satu diantaranya ditulis oleh seorang tokoh bernama Kulaba. Kedua naskah itu memuat Riwayat Nabi Muhammad dan Hukum-hukum Islam serta Hukum Kawin. Dengan demikian diduga proses Islamisasi di Hitu telah dimulai sejak abad ke-12 dan pada abad-14 telah terbentuk suatu kekuasaan tradisional bercorak Islam yang kemudian terkenal dengan "Kerajaan Hitu" yang dipimpin "Empat Perdana".

Sementara itu Paramita R. Abdurrahman, dalam tulisannya berjudul *Peninggalan-peninggalan Berciri Portugis di Ambon* menyebutkan bahwa agama Islam datang ke kepulauan Maluku dan Banda pada pertengahan abad XV, dan para pedagang Muslim itu juga mendarat di pantai Leihitu. Salah seorang dari Perdana yang Empat, yaitu Pati Putih, berkunjung ke Jawa sekitar tahun 1500 dan kembali ke Hitu setelah tinggal beberapa lama di Jawa. Ia kemudian disebut Pati Tuban. Ia bertemu dengan penguasa Ternate yang juga berada di Jawa, yang

kemudian mengadakan perjanjian persahabatan. Sejak itu hubungan dengan Maluku Utara menjadi erat. (Paramita R. Abdurrahman : 1973).

Selanjutnya F.L. Cooley mengemukakan bahwa pengaruh penting pertama yang terjadi antara tahun 1475--1675 di Maluku adalah datangnya agama Islam ke Maluku Tengah dari Maluku Utara. Hal itu disebabkan karena tahun 1480 kekuasaan kesultanan Ternate dan Tidore meluas ke selatan, membawa agama Islam ke negeri-negeri di pesisir utara pulau-pulau di Maluku Tengah. Dikatakan bahwa agama Islam telah membawa perubahan dalam nilai-nilai ekonomi rakyat, sistem kekerabatan maupun lembaga-lembaga keagamaan. Erat kaitannya dengan hal ini Putuhena mengemukakan bahwa hubungan utara dengan kawasan kepulauan di bagian selatan terjalin erat terutama dengan daerah-daerah yang memeluk agama Islam. Beberapa kerajaan kecil di wilayah ini, seperti Hitu di Pulau Ambon, Hatuhaha di Pulau Haruku dan Iha di Pulau Saparua walaupun tidak merupakan bahagian dari kesultanan Ternate, setidaknya mengakui kekuasaan dan menjalin hubungan baik dengannya. Hoamual salah satu pusat politik dan perdagangan cengkeh di Seram Barat adalah bahagian dari kesultanan Ternate. Di sini ditempatkan seorang Kimelaha wakil sultan yang berkedudukan di pusat pemukiman orang-orang Ternate, di kampung Gamsune. Selain Hoamual pulau-pulau Kelang, Manipa, Buano dan Buru merupakan daerah kekuasaan Ternate. Di sini ditempatkan beberapa Sangadji.

Menurut ceritera-ceritera rakyat setempat yang masih hidup di beberapa negeri/desa di Maluku Tengah seperti di Uli Hatuhaha mengisahkan bahwa Islam yang menyebar ke daerah itu berasal dari tanah Hejaz, Pasai dan kemudian Jawa. Menurut ceritera H. Umar Tuasikal, seorang kepala adat di Pelau, masuknya Dinul Islam di Hatuhaha dibawa oleh seorang aulia' yang diasingkan ke luar tanah Hejaz pada masa dinasti Umayyah. Dengan sebuah bahtera yang penuh "rahasia" aulia' mengarungi samudera dan akhirnya tiba di pulau Seram, yaitu

di tempat yang sekarang dikenal dengan nama Nunusaku. Dari sinilah aulia' tersebut berusaha menyebarkan agama Islam di Hoamual pulau Seram, ke Ambon (Hitu) ke Hatuhaha di pulau Haruku dan Iha di Saparua. Nama aulia' tersebut sampai sekarang tetap dirahasiakan dan disebut dalam berbagai gelar seperti : *Upu Nusa Barakate, Upu Latu Nusa, Upu Matuan, Upu Maoirau, Upu Awale Adam, Upu Haumateleto, Upu Mantura Putio*. Semua gelar ini memiliki makna masing-masing yang menunjukkan pemujaan yang paling tinggi terhadap tokoh tersebut. Dikatakan lebih lanjut bahwa aulia' tersebut adalah keturunan langsung Nabi Muhammad SAW, cucu Sayidina Ali, anak dari Husein. Di samping aulia' tersebut dikenal pula tokoh-tokoh penyebar agama Islam lain di Hatuhaha, misalnya Pandita Pasa yang berasal dari Aceh dan Pandita Mahu yang berasal dari Gresik. Kuburan para tokoh penyebar ajaran Islam tersebut hingga sekarang menjadi kubur atau makam yang dikeramatkan oleh masyarakat Uli Hatuhaha.

Walaupun kisah tersebut merupakan cerita rakyat yang perlu diteliti lebih lanjut, namun dapat memberikan data sejarah yang tak ternilai harganya tentang masuknya Islam di Maluku Tengah. Sumber sejarah tertulis lainnya yang masih tersimpan dan bisa dijadikan sebagai bahan perbandingan adalah buku-buku tembaga yang sampai saat ini masih disimpan di beberapa desa di Uli Hatuhaha. Cerita rakyat Hatuhaha ini apabila dihubungkan dengan pemberitaan Naidah dalam Hikayat Ternate serta tradisi lisan yang disampaikan Abdul Habib Djiko dan M.A. Chan maka tokoh itu kemungkinan besar adalah Djafar Shadik yang tiba di Ternate pada abad ke-13. Tokoh ini mungkin saja adalah seorang Syiah yang menghindarkan diri dari kejaran Bani Umayyah maupun Bani Abbasiyah di Irak. Hal ini dapat dilihat dari praktek-praktek keagamaan yang dianggap tua di Maluku yang berbau syiah seperti di Pelau (Hatuhaha) dan di daerah Kesultanan Ternate.

Maluku Tenggara

Seperti halnya Islam di Maluku Utara dan Maluku Tengah, masuknya Islam ke Maluku Tenggara juga melalui pedagang-

pedagang Jawa, Ternate maupun Hitu. Diduga masuknya agama Islam di kepulauan Kei sekitar tahun 1500 Masehi. Merujuk hasil penelitian J.A. Pattikaihatsu dan kawan-kawan, di Kei Kecil agama Islam mula-mula dipeluk oleh penduduk negeri Dullah. Dikatakan lebih lanjut bahwa kemungkinan yang membawa agama Islam adalah para pedagang atau perantau dari Maluku Utara, khususnya dari kesultanan Tidore. Hal itu sesuai dengan ceritera rakyat tentang asal-usul raja-raja negeri Dullah yang konon berasal dari Tidore. Di Kei Besar agama Islam mula-mula masuk ke negeri Lauggiar-Fer dan menurut ceritera rakyat setempat dibawa oleh Abu Rabu seorang mubaligh dari Bukit Tinggi.

Sementara itu penduduk kepulauan Banda yang mayoritas beragama Islam menceritakan bahwa agama Islam diterima orang-orang Banda di suatu tempat di luar Banda. Jadi bukan Agama Islam itu dibawa atau datang ke Banda. (Moh. Mohrim : 1995). Pada masa itu Banda telah mempunyai armada niaga untuk mengangkut pala dan *fuli* ke pelabuhan-pelabuhan penimbun seperti Hitu, Ternate dan Makassar, sampai ke Gresik. Jadi kontak antara orang-orang Banda dengan Islam mungkin terjadi di Hitu, Ternate atau pelabuhan-pelabuhan di Jawa. Karena hal itu pula tumbuh unsur-unsur Islam dan budaya yang asimilatif. Unsur-unsur yang asimilatif ini dapat terlihat dalam peringatan hari-hari besar Islam yang dikaitkan dengan upacara syukuran atas keberhasilan masyarakat pada suatu panen. Misalnya pada upacara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada tanggal 12 Rabiul awal, masyarakat membawa berbagai hasil kebun untuk digantung disekitar Mesjid (seperti pisang, pepaya, kelapa, umbi-umbian, dsb). Upacara itu diawali dengan doa syukur dan kemudian pembacaan riwayat kelahiran Nabi sampai dengan akhir hayatnya dari kitab yang disebut "Kitab Barzanzi".

Walaupun terdapat berbagai versi mengenai ceritera masuknya Islam di Maluku, ada dua hal yang dapat disimpulkan tentang masuknya agama Islam, yaitu :

- (1) Penganut Islam telah hadir di kepulauan Maluku sejak kurun pertama tahun hijriyah. Namun besar kemungkinan bahwa pada masa awal itu Islam hanyalah merupakan agama yang dianut oleh para musafir muslim yang singgah di perairan dan bandar-bandar penting di Maluku. Tidak mustahil kepulauan Maluku pun telah dikunjungi oleh pedagang Islam karena Maluku terutama Maluku Utara merupakan penghasil cengkeh yang utama di samping kepulauan Banda sebagai penghasil pala. Kedua komoditi inilah yang justru menarik pedagang-pedagang asing untuk menjelajah Nusantara. Masuknya Islam ke Maluku tidak hanya melalui Aceh dan Jawa tetapi justru Maluku merupakan pintu masuk Islam melalui jalan utara. Pembawa agama Islam diduga tidak hanya orang Arab, Parsi atau Gujarat, tetapi bisa juga orang-orang Cina yang telah memeluk agama Islam.
- (2) Masuknya Islam di Maluku Utara dan Maluku Tengah berlangsung dalam waktu yang bersamaan. Oleh sebab itu dapat diduga bahwa agama Islam di Hitu bukan merupakan pengaruh dari agama Islam di Ternate. Hubungan kedua kerajaan ini merupakan hubungan persahabatan. Apabila Hoamual di Seram Barat dan Iha di Saparua kemudian menjadi daerah pengaruh dari kesultanan Ternate, maka Hatuhaha di Pulau Haruku merupakan kerajaan Islam yang tidak berada di bawah kesultanan Ternate. Agama Islam yang masuk ke Hatuhaha berasal dari Jawa, Aceh dan Persia.

2.2 Perkembangan Islam dan Pengaruhnya

Proses masuk dan berkembangnya agama Islam ke Maluku dalam kurun waktu yang cukup lama, tentu telah ikut memberikan warna yang khas bagi kehidupan sosial budaya masyarakat. Berlangsungnya proses “islamisasi” itu yang menurut MS. Putuhena melalui dua jalur, yaitu jalur atas dan jalur bawah memberi pengaruh tertentu dalam strata sosial baik terhadap kebudayaannya maupun praktek keagamaan

Islam itu sendiri. (Putuhena, 1970 : h. 265). Jalur atas adalah proses yang berlangsung berkat bantuan dan usaha pihak penguasa. Melalui jalur ini Islam bercorak formalistis, artinya walaupun orang telah mengaku beragama Islam namun dalam praktek keagamaan masih mengikuti nilai-nilai dan aturan lama. Melalui jalur bawah proses islamisasi berlangsung melalui usaha perorangan (masyarakat), agama Islam bercorak sinkritis yaitu nilai dan aturan agama Islam bercampur aduk dengan nilai dan aturan lama baik dalam pemahaman maupun dalam pelaksanaannya. Sedangkan aliran-aliran keagamaan dalam Islam yang sejak mula tersebar di Indonesia adalah aliran shufi dan aliran syariah meskipun sering dipertentangkan secara tajam namun kedua aliran tersebut kadang-kadang dalam prakteknya sulit dibedakan secara tegas.

Jalur penyebaran, corak keberagaman Islam dan aliran-aliran dalam Islam tersebut di atas dialami pula oleh para muballigh dalam proses islamisasi di Maluku. Hal ini mengakibatkan praktek-praktek pengamalan agama Islam seperti yang dapat dilihat perkembangannya sampai sekarang ini. Ada penganut Islam yang sangat mementingkan pengamalan syariah Islam secara murni tetapi ada pula yang mempraktekkan ajaran agama Islam yang mengikuti adat, dan ada pula bentuk yang sinkritis. Contoh penganutan yang sinkritis inilah yang disebut oleh Radjawane sebagai agama Islam yang tidak murni karena kuatnya pengaruh adat ke dalam ajaran agama Islam yang dipraktekkan oleh tiga buah desa di Uli Hatuhaha di pulau Haruku, Maluku Tengah, yaitu Rohomoni, Kabau dan Pelau. (Radjawane, 1960 : h. 74--76). Bila penelitian Radjawane ini dilanjutkan maka akan didapati penganut agama yang murni di Uli Hatuhaha yang dilaksanakan di desa-desa tersebut dan desa-desa lainnya di Uli Hatuhaha.

Penganutan keagamaan Islam baik formalistis, sinkritis, dan pengaruh aliran shufi dan syariah itu ditemui di sebagian besar wilayah Maluku di Utara, Tengah maupun Maluku Tenggara, Aliran shufi yang berpengaruh di Maluku adalah Syamaniah, Qadariyah dan Naksyabandiyah. Aliran-aliran ini dapat

dibedakan dan dikenali dari praktek zikir dan wirid yang dilaksanakan dalam hubungannya dengan ibadah kepada Allah.

Pembaharuan agama Islam yang dipelopori gerakan Muhammadiyah di Yogyakarta sejak tahun 1912 telah berpengaruh pula terhadap penganutan agama Islam di Ambon dan Maluku umumnya. Orang-orang Islam dari Maluku yang belajar di Jawa dan di Mekah telah membawa pembaharuan ajaran-ajaran Islam yang lebih menekankan pada sumber Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad s.a.w. Pengaruh ini telah ada sebelum masa kemerdekaan akan tetapi berkembang pesat sejak tahun 1950-an dengan berdirinya Lembaga Pendidikan Agama baik pada tingkat dasar, menengah dan tinggi di Maluku.

Dalam proses sejarahnya di Maluku agama Islam telah mengalami salah satu fase yang oleh Radjawane disebut masa stagnasi yaitu menarik diri dari percaturan politik, sosial maupun budaya sejak zaman VOC sampai berakhirnya pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia. Pada masa ini agama Islam seakan-akan menarik diri dari percaturan politik dan pemerintahan karena kekuatan pemerintah jajahan yang tidak bisa dilawan. Hal ini tidak berarti agama Islam mengalami kemunduran ; karena dalam masa penjajahan penganut agama Islam di Maluku tidak mau bekerja sama dengan penjajah. Terdapat tiga faktor yang menyebabkannya, yaitu ¹⁾ secara politis agama Islam bertentangan dengan agama Kristen yang dibawa oleh Belanda ²⁾ , dalam lapangan pendidikan penganut agama Islam dianaktirikan dalam mendapatkan pendidikan bukan karena tidak mau dididik tetapi karena adanya peraturan yang mengutamakan mereka yang beragama Kristen, dan ³⁾ orang Islam Maluku tidak mau memasuki lapangan kemiliteran, karena yang masuk militer diutamakan yang beragama Kristen dan kemudian untuk berperang di daerah-daerah yang banyak penganut Islamnya, seperti Perang Makasar, Perang Banten, Perang Diponegoro dan Perang Aceh. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan Maluku seakan-akan diidentikkan dengan agama Kristen karena yang paling banyak memasuki lapangan

pemerintahan, pendidikan dan kemiliteran adalah orang-orang Maluku yang beragama Kristen. Sedangkan orang-orang yang beragama Islam umumnya menarik diri dari ketiga lapangan tersebut, sehingga tidak dikenal di seluruh Indonesia (Radjawane; 1960).

Dalam proses menuju kemerdekaan, peranan ummat Islam di Maluku mulai nampak dominan baik dalam mewujudkan kemerdekaan maupun dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Kemudian dapat diperhatikan peranan desa-desa Islam di Maluku Utara, Tengah dan Tenggara pada fase revolusi fisik khususnya dalam perjuangan menghadapi pemberontakan RMS yang diduga disponsori oleh pemerintah Belanda. Bukti historis yang sangat penting adalah kemenangan ummat Islam Maluku melalui Partai Masyumi dalam Pemilihan Umum tahun 1955. Kemenangan ini merupakan hasil proses islamisasi yang telah berlangsung sejak abad ke 15 dan mempengaruhi kehidupan politik, sosial dan budaya di Maluku.

Di Maluku Utara telah terjadi perubahan dalam bidang politik dan pemerintahan. Kelompok-kelompok pemerintahan masyarakat tradisional yang semula berbentuk empat buah kolano, yaitu Ternate, Tidore, Bacan dan Jailolo, dalam perkembangan selanjutnya sejak abad kelima belas, keempat kolano tersebut mengambil bentuk kesultanan. Sejak itu pula masing-masing kesultanan itu berusaha untuk meluaskan wilayah kekuasaannya. Tidore memasukkan Irian Jaya dan Ternate yang berhasil meluaskan daerah kekuasaannya meliputi daerah yang terbentang antara Sulawesi dengan Irian Jaya termasuk daerah kepulauan Ambon Lease, Seram, Buru dan Banda.

Pengaruh Islam bagi pertumbuhan dan perkembangan kesultanan adalah dalam bentuk perubahan struktural dari Kolano menjadi Kesultanan. Dalam bentuk Kolano ikatan genealogis dan teritorial sebagai faktor integrasi, dalam bentuk kesultanan Islam merupakan salah satu faktor integrasi. Oleh karena itu sebahagian dari daerah yang memeluk agama Islam

seperti Hoamual (Seram Barat), Saparua dan Haruku menempatkan dirinya sebagai bagian dari Kesultanan Ternate. Hal ini sangat menguntungkan Ternate, tatkala terjadi konflik dengan orang-orang Eropa terutama Portugis dan Belanda.

Perubahan lebih lanjut pada fungsi raja/sultan yang mempunyai fungsi ganda sebagai pemegang kekuasaan duniawi dan sebagai pemegang kekuasaan spiritual (keagamaan). Dalam kedudukan yang demikian sultan tidak hanya berusaha mempertahankan eksistensi kerajaannya tetapi ia juga mempunyai tanggung jawab menyebarkan Islam dan melindunginya. Oleh karena itu wilayah kekuasaan sultan dapat diperluas dengan menundukkan daerah-daerah lain.

Masa pemerintah Zainal Abidin (1486 - 1500) merupakan awal peralihan dari bentuk kolano ke bentuk kesultanan dan ia merupakan *sultan* yang pertama. Sebelum dinobatkan sebagai sultan, Zainal Abidin berangkat ke Jawa untuk belajar agama Islam di Giri. Setelah kembali, ia mendirikan lembaga-lembaga pendidikan agama Islam di Ternate dan mendatangkan guru-guru agama dari Jawa. Ia memerintahkan pegawai-pegawai syara' di wilayah kerajaan untuk belajar agama di Ternate.

Dalam struktur kesultanan dijumpai lembaga-lembaga keagamaan di samping lembaga-lembaga sosial tradisional yang ada. Urusan keagamaan ditangani oleh badan yang disebut *Jou Lebe* (Badan Syara'). Badan ini dikepalai oleh Kadhi (Kalem). Anggota-anggotanya terdiri dari para Imam dan Khatib. Tiap marga (soa) mempunyai Imam dan Khatib tertentu. Sultan selain sebagai pemimpin dunia, juga berkewajiban memimpin soal-soal keagamaan, sehingga secara teoritis Sultan adalah penerus tugas pengganti Rasul (*Tubaddilur Rasul*). Hal ini tercantum dalam Suba Puja-puji yang ditulis dalam bahasa dan tulisan Arab, yaitu laporan yang selalu dibacakan pada saat penobatan Sultan yaitu berupa peringatan bahwa Sultan adalah Khalifatur Rasjid dan Tubaddilur Rasul. Diingatkan pula bahwa Sultan memangku jabatan itu karena Rahmat dan Takdir Allah yang *tu'til mulka man tasya'* (memberi kekuasaan) kerajaan bagi siapa yang dikehendaknya. Dengan demikian

Sultan harus memberikan bantuan kepada pemerintah/masyarakat Islam yang memerlukan bantuannya. Sultan berkewajiban untuk mendatangi daerah-daerah lain untuk menyampaikan ajaran-ajaran Islam.

Dalam kaitan ini Sultan Ternate pernah mengadakan hubungan politik yang erat dengan kesultanan Buton, kesultanan Mangindanao di Filipina, begitu pula hubungan politik dengan Sulu. (Alex Ulaen Dea : 1997). Di wilayah Maluku Tengah terjalin hubungan yang erat dengan daerah-daerah yang telah memeluk agama Islam. Kerajaan-kerajaan kecil seperti Hitu di pulau Ambon, Hatuhaha di pulau Haruku, Iha di pulau Saparua walaupun tidak merupakan bahagian dari Kesultanan Ternate paling tidak telah menjalin hubungan baik karena persamaan iman dan mengakui kekuasaan Ternate. Sedangkan Hoamual yang merupakan pusat politik tradisional dan pusat perdagangan cengkih di Seram Barat, adalah bahagian dari kesultanan Ternate. Di sini ditempatkan seorang Kimelaha sebagai wakil Sultan yang berkedudukan di pusat pemukiman orang-orang Ternate, di kampung Gamsune. Di samping Hoamual, pulau-pulau Kelang, Manipa, Buano dan Buru merupakan daerah kekuasaan Ternate. Di sana ditempatkan juga beberapa orang Sangaji yaitu wakil Sultan yang memerintah di daerah-daerah.

Kedatangan orang-orang Eropa terutama Portugis dan Belanda telah menimbulkan konflik antara rakyat dengan mereka. Pergolakan yang berlangsung pada abad 16 dan 17, bukan hanya terjadi karena alasan ekonomi tetapi karena faktor agama. Penerimaan agama Islam membawa keuntungan ekonomi disamping meningkatkan peradaban dan kehidupan sosial rakyat Maluku. Bagi rakyat Maluku yang beragama Islam, agama ini merupakan arti yang tak ternilai. Faktor inilah yang menyebabkan rakyat Maluku yang beragama Islam sangat mempertahankan agamanya pada saat datangnya orang Portugis dan Belanda yang akhirnya bercokol di Maluku hampir 3 1/2 abad.

Seperti halnya di Maluku Utara, kerajaan-kerajaan kecil di Maluku Tengah yaitu Hitu, Hatuhaha serta Iha juga memiliki sistem pemerintahan, tetapi berbeda dengan sistem pemerintahan di Maluku Utara. Imam Ridjali di dalam Hikayat Tanah Hitu menceritakan tentang datangnya empat kaum yang menjadi cikal bakal penduduk Hitu. Merekalah yang menjadi pendiri kerukunan yang amat kuat yang kemudian dikenal dengan "Empat Perdana". Keempat kaum tersebut datang dari tempat yang berbeda. Yang pertama datang dari pantai tenggara pulau Seram. Kaum ini disebut *Saupele* atau *zaman-jadi*. Kelompok kedua menurut Rijali datang dari Tuban yang menurut Rumphius tiba pada tahun 1460 dan menetap di pantai dekat sungai Waipaliti. Kaum ketiga disebut *Latima* (Lating), datang dari Jailolo (Halmahera) dipimpin oleh Jamilu pada tahun 1465. Menurut Rumphius mereka juga menetap dekat Waipaliti. Kaum keempat bernama Olong datang dari Gorong (pulau Seram bahagian timur). Mereka dipimpin oleh Mata Lian yang terkenal dengan Patih Putih. Seperti yang telah dikemukakan Patih Putih inilah yang berkunjung ke Jawa sekitar tahun 1500, setelah tinggal beberapa bulan kembali ke tanah Hitu dan dikenal dengan nama Pati Tuban. Dialah yang bertemu dengan penguasa Ternate yang juga sedang belajar agama di Jawa, sehingga hubungan dengan kesultanan Ternate menjadi lebih erat. Hitu kemudian berhasrat menjadi suatu pusat kekuasaan politik dan agama yang diperintah oleh lembaga-lembaga kesultanan seperti di Ternate. Maka disusunlah pemerintah Hitu yang dikenal dengan Pemerintahan Empat Perdana. Pemerintahan Empat Perdana tersebut dijalankan secara periodik oleh empat orang yang merupakan pimpinan dari empat kaum utama dari masyarakat Hitu. Sedangkan di kerajaan Uli Hatuhaha terdapat sistem pemerintahan yang dikepalai raja sebagai pemimpin pemerintahan dan Imam sebagai pemimpin agama. Imam dipilih dalam suatu rapat (masorupi) yang dilaksanakan oleh raja bersama-sama kepala-kepala soa. Sistem seperti ini dapat terlihat sampai abad ke-20 dalam pemerintahan tradisional, terutama di desa-desa Islam di Maluku Tengah. Di sana lembaga agama merupakan suatu komponen yang penting dalam sistem pemerintahan.

2.3 Agama Kristen

Agama Kristen atau agama Nasrani masuk ke Indonesia melalui orang-orang Portugis pada awal abad ke-16. Berita-berita tentang ummat Katholik perintis dalam sejarah Gereja Katholik di Indonesia tahun 645--1700 menceritakan bahwa ketika orang-orang Portugis tiba di Maluku pada tahun 1512 mereka menyaksikan penduduk Tidore, Ternate, beberapa pulau kecil, Hitu di Ambon dan beberapa tempat lain sudah beragama Islam. Sementara penduduk Leitimur di Ambon, penduduk kepulauan Uliase, Buru dan Seram masih hidup dalam agama nenek moyang terutama mereka yang tinggal di pedalaman atau pegunungan. (Sejarah Gereja Katholik Indonesia : 645-1900, hal. 59). Setelah terjadi kontak dagang dengan para penguasa setempat, orang-orang Portugis kemudian berhasil mendirikan sebuah benteng di Ternate diberi nama Sao-paolo dan sebuah benteng di Ambon di beri nama Hatu Nuku. Orang-orang Portugis yang sebagian besar adalah pedagang dan prajurit tinggal di dalam benteng-benteng ini. Selain itu dipekerjakan rohaniwan sebagai pastor untuk mengurus iman Katolik orang-orang Portugis di Ternate. Para rohaniwan membangun sebuah gereja di dalam benteng. Dalam tahun 1534, panglima benteng Sao Paolo Tristao d'Atayde dan Gonsalo Veloso seorang saudagar Portugis memulai kegiatan penyampaian berita Kristiani di Ternate dan Moro. Diberitakan bahwa Kolano Mamuya di Moro menjadi salah seorang Kristen yang pertama di Morotai dengan nama Don Joao.

Pada mulanya hubungan orang-orang Portugis dan penduduk Maluku berjalan dengan baik, sehingga perdagangan mereka berjalan lancar. Namun karena keserakahan dan tindakan-tindakan para pedagang yang kurang berkenan timbullah ketidaksenangan rakyat, sehingga hubungan mereka dengan rakyat Maluku jadi memburuk. Bahkan penduduk Maluku yang mulai tertarik pada agama Kristen yang dibawa oleh para padri Portugis dimusuhi. Hal itu disebabkan oleh Tristao d'Atayde yang tidak berhasil membina persahabatan

dengan rakyat Maluku. Antonio Galvao yang dianggap sebagai seorang panglima dan penguasa yang lebih fleksibel dapat mengembalikan citra mereka untuk beberapa waktu. Selama masa pemerintahannya dari tahun 1536 sampai 1540 ia memperbaiki gereja Bunda Maria Ratu Rosari di dalam benteng Sao-Paolo, dan dalam tahun 1538 membantu karya misi di Ambon. Dengan bantuan Antonio Galvao beberapa kampung di Leitimur menjadi Katholik yaitu Hatiwi, Amantelu (Rumah Tiga) dan Nusaniwe. (Sejarah Gereja Katholik di Indonesia). Dalam upaya pengkristenan terhadap para penguasa di Ternate dan Tidore disebutkan bahwa, Sultan Tabariji tertarik masuk Kristen dalam pembuangannya di Goa (India). Sebagai tanda simpatik Raja muda Portugis di Goa lalu memerintahkan untuk memulihkan kedudukannya meng-gantikan Sultan Chairun yang telah naik tahta di Ternate. Akan tetapi dalam perjalanan kembali ke Ternate Tabariji meninggal pada 30 Juni 1545.

Berbagai usaha dan tipu muslihat dilancarkan sehingga Sultan Chairun ditangkap dan dibunuh oleh utusan Panglima Portugis di Ternate. Hal itu mengakibatkan hubungan antara Penguasa Ternate, Penguasa Hitu serta rakyatnya dengan Portugis semakin memburuk. Pengkristenan rakyat Maluku dipandang oleh penduduk yang sudah memeluk agama Islam sebagai suatu pemaksaan oleh Portugis. Banyak laporan dari para pedagang Portugis maupun pimpinan-pimpinan tentara di benteng-benteng atau kantung-kantung tertentu tentang jumlah orang-orang Maluku yang sudah Kristen dalam abad 16. Namun dalam analisis Van Schie, berita-berita itu terlalu dibesar-besarkan ditambah lagi dengan adanya ketidakkompakan antara kelompok-kelompok pedagang dan kelompok tentara, sehingga para missionari bahkan berkesimpulan bahwa tidak ada harapan untuk kelangsungan sebuah gereja di Maluku saat itu. (G. Van Schie : buku 3 ; 1995). Baru pada tahun 1546-1547 tiba di Maluku seorang missionari terbesar dalam sejarah gereja Katholik yaitu Fransiskus Xaverius. Missionari ini dianggap orang Kristiani masa itu sebagai orang suci yang dapat mengayomi dan menyembuhkan orang-orang Kristiani yang menjadi lemah dan sakit-sakitan

setelah ditinggal orang Portugis. Disebutkan bahwa Fransiskus Xaveriuslah yang telah membangkitkan lagi iman orang-orang Kristiani di tiga desa, Hatiwi, Amantelu dan Hukunala bahkan di Jazirah Leitimor setelah terjadi bentrokan antara Portugis dengan orang-orang Hitu.

Fransiskus Xaverius telah mengadakan perjalanan sampai ke pulau Seram (Tamilou) dalam tahun 1546. Bahkan kemudian hampir seluruh pelosok kepulauan Maluku dari Amboina sampai ke Morotai didatangi. Akan tetapi karena adanya persengketaan yang timbul di antara panglima-panglima Portugis dengan penguasa-penguasa setempat dan Sultan Ternate maka orang-orang Kristen dituduh sebagai kaki tangan Portugis dan dimusuhi penduduk.

Betapapun keadaan politik yang melanda Maluku dalam vase kolonial masa Portugis itu suatu perubahan telah terjadi bagi anak negeri (penduduk) Maluku. Pengaruh bahasa ke dalam pemikiran keagamaan Kristen mulai kritis. Dengan demikian dirasa perlunya pendidikan bagi penduduk yang sudah menjadi Kristen. Mereka harus mempunyai kecakapan membaca, menulis dan menghitung agar lebih memahami pengajaran keagamaan yang ada dalam Al-Kitab yang berhuruf latin. Memang sejak semula para rohaniwan telah memperkenalkan huruf-huruf melalui "sekolah gereja" atau sekolah minggu yang kemudian berkembang menjadi lembaga pendidikan agama. Akan tetapi setelah kurang lebih 100 tahun Portugis mendiami daerah Maluku tidak banyak kemajuan yang dicapai dalam bidang pendidikan. Di dalam segi adat istiadat dan bahasa, budaya Portugis banyak mempengaruhi kehidupan sosial dan budaya penduduk, terutama penduduk yang memeluk agama Kristen. Cara berpakaian, berbahasa dan ritual-ritual dalam *circle life*, seperti kelahiran, perkawinan dan kematian terdapat unsur-unsur budaya Portugis. Banyak kata-kata bahasa Portugis sampai dewasa ini tetap digunakan dan dianggap sebagai bahasa Melayu Ambon yang tersebar di seluruh propinsi Maluku. Kemudian dalam periode kolonial Belanda Agama Kristen Roma Katholik diganti dengan Protestan seperti yang dianut oleh pegawai VOC dan orang-

orang Belanda pada umumnya. Penduduk yang telah menganut Agama Roma Katholik yang lebih mengagungkan Perawan Maria, Ibunda Nabi Isa dan Nabi Isa sendiri diganti dengan Protestan. Walaupun begitu kedua agama Kristiani ini menggunakan kitab suci yang sama yaitu Kitab Injil atau Beibel yang juga disebut dengan Al Kitab saja. Hari-hari ibadahnya dilakukan pada hari minggu di gereja yang sekaligus merupakan tempat dan lembaga pendidikan bagi anak-anak. Pendidikan ini kemudian berkembang sebagai wadah penyebaran agama. Dalam masa kolonial Belanda, kemajuan di bidang pendidikan agama maupun pendidikan umum di Maluku lebih membaik bahkan dikatakan mencapai kemajuan yang pesat. Di Ambon khususnya terjadi perubahan-perubahan sesuai politik pemerintah kolonial. Sekolah-sekolah yang telah didirikan oleh VOC diambil alih oleh Pemerintah Belanda. Semua sekolah dibebaskan dari pengaruh-pengaruh agama dan dijadikan sekolah negara. Tujuan sekolah-sekolah lebih banyak diarahkan pada tujuan-tujuan umum yang berhubungan dengan pengembangan politik penjajahan, dan bukan untuk tujuan-tujuan penyebaran agama seperti pada zaman VOC. Namun masih ada lembaga pendidikan maupun sekolah-sekolah yang diselenggarakan serta diasuh oleh Badan-Badan Zending dan Missi dalam hubungan dengan pendidikan agama Kristen. Usaha-usaha yang terkenal misalnya dari pendeta Josep van Kam yang mendirikan sebuah sekolah guru Injil di Ambon pada tahun 1821. Seiring dengan perkembangan pendidikan Kristen itu di daerah pemeluk agama Kristen bahasa Melayu mulai berkembang dan kian lama menggantikan kedudukan bahasa daerah.

Dalam berbagai sumber sejarah, perkembangan pendidikan di Ambon ini lebih tinggi daripada daerah-daerah lainnya di Hindia Belanda. Akan tetapi kemajuan pendidikan itu tidak dialami oleh semua penduduk Maluku atau pun Ambon. Karena di dalam kenyataannya sebagian besar penduduk yang tidak beragama Kristen sangat ketinggalan dalam pendidikan barat atau modern tersebut. Hal ini menampakkan bahwa

pemerintah kolonial Belanda menggunakan agama sebagai alat politik dalam mencapai kemajuan-kemajuan tertentu bagi dirinya. Sampai berakhir masa penjajahannya di Maluku, tidak banyak rakyat Maluku yang mencapai pendidikan yang memadai, bahkan ajaran agama pun tidak dipahami secara mendalam.

2.4 Pengaruh Agama Kristen Terhadap Kebudayaan Penduduk

Kekuasaan Portugis di Maluku pada permulaan abad ke enam belas, (1512) yang berlangsung sampai awal abad 17 (1605), menampakkan pengaruhnya terutama dalam bidang perdagangan rempah-rempah dan penyebaran agama Kristen melalui Misi Katolik kepada penduduk Maluku.

Proses Kristenisasi yang berbarengan dengan kolonisasi oleh orang-orang Portugis dan Belanda itu banyak memberi warna dalam kehidupan penduduk Maluku. Selain pengaruh Islam yang sudah berjalan sejak abad 14 dan 15, pengaruh Kristen dengan unsur-unsur barat telah meninggalkan andilnya pula.

Cooley dalam penelitian antropologinya menyebutkan bahwa, di dalam perkerabatan, ada bukti-bukti tertentu bahwa di Seram, dan mungkin di Ambon-Lease juga, sebelum kedatangan pengaruh-pengaruh dari luar, sistem perkerabatan disusun berdasarkan garis keibuan (matrilineal). Kemudian pola kemasyarakatan yang pokok ini mengalami perubahan sehingga sekarang ini hampir seluruh daerah mengikuti garis kebapaan (patrilineal). Perubahan ini mungkin sekali akibat dari pengaruh-pengaruh dari luar, khususnya agama Islam yang kemudian diperkuat oleh agama Kristen dan kebudayaan Eropa yang semuanya menganut secara tegas garis kebapaan dalam sistem perkerabatannya. (Cooley: 1971, hal 121).

Unsur-unsur asing itu telah membawa perubahan-perubahan lain pula dalam lembaga-lembaga keagamaan, nilai-nilai dan kehidupan perekonomian rakyat.

Pusat operasi perdagangan, kolonisasi dan kristenisasi oleh Portugis yang berkedudukan di Ternate, Maluku Utara dipindahkan ke Maluku Tengah pada tahun 1570 karena hubungannya dengan Sultan Ternate mulai memburuk. Akibatnya terjadinya peperangan antara kedua belah pihak terutama pertentangan agama yang merupakan salah satu segi yang menyolok yang telah mengorbankan ribuan orang Maluku, baik pemeluk Islam maupun pemeluk Kristen. Hal ini disebabkan antara lain; guna mengembangkan dan melindungi usaha-usahanya dalam bidang perdagangan dan keagamaan, Portugis selalu menggunakan siasat serta kekuasaan politik militernya.

Sementara itu, akibat usaha-usaha misi Katolik, diantaranya oleh Pater Fransiskus Xaverius pada tahun 1546, agama Kristen Katolik telah diterima oleh sebagian penduduk Ambon-Lease, Seram dan Maluku Utara. Hal ini terutama agama suku atau agama asli diganti dengan agama Kristen, dengan segala implikasi dan konsekwensinya. Pengaruh agama Kristen itu terdapat juga dalam segi-segi lain dari kebudayaan asli, karena dalam kebudayaan asli penduduk agama merupakan suatu unsur yang pokok yang tidak dapat dipisahkan dari adat istiadat, bahasa dan unsur-unsur lain dalam kebudayaan penduduk setempat.

Guna memudahkan pihak kolonial dalam bidang perdagangan dan pengawasan, maka sejak masa Portugis dan kemudian Belanda, penduduk di beberapa pulau dari negeri-negeri lama di pegunungan diturunkan ke tempat-tempat baru di dekat pantai. Proses perpindahan ini, merupakan suatu peristiwa yang membawa perubahan-perubahan yang sangat luas dan penting, terutama dalam susunan masyarakat. Cooley menyebutkan bahwa tindakan tersebut, kalau dilihat dari perspektif manusia dan waktu hanya dapat digambarkan sebagai sesuatu yang amat radikal dan telah menggoncangkan manusia Maluku dan meninggalkan bekas-bekasnya dalam kejiwaan orang-orang Maluku sampai sekarang ini. (Cooley: Ibid. 122).

Adanya hubungan dan pergaulan sehari-hari antara orang-orang Portugis dan orang-orang Maluku selama puluhan tahun telah membawa berbagai perubahan. Akibat masuknya unsur-unsur kebudayaan Portugis ke dalam kebudayaan Maluku, nama-nama dari beberapa mata-rumah menggunakan nama Portugis seperti De Fretes, Da Costa, De Lima, Gomis, Gasperz dan sebagainya. Hal ini nampak pula dalam beberapa istilah dalam bahasa Melayu-Ambon sehari-hari seperti bendera, jendela, kemeja, kereta, gereja, kadera, meja, sekolah, roda, sabun, almari, banku, lampu, minggu, lenso, tempo, prangko, arloji, garpu, kampong, kartu dan lain-lain.

Kehadiran Portugis di Maluku yang kurang dari seratus tahun itu, diganti dengan kehadiran Belanda yang berlangsung jauh lebih lama, telah memberi corak yang khas kepada masyarakat dan kebudayaan Maluku, khususnya dalam agama Kristen. Segera setelah Belanda mengambil alih kekuasaan dari Portugis di Maluku pada tahun 1605, melalui badan dagang mereka yang beroperasi di nusantara yaitu VOC, maka segeralah Belanda mulai meluaskan kekuasaannya di atas dasar yang telah diletakkan oleh Portugis dalam bidang-bidang perdagangan, politik dan militer. Di dalam waktu yang relatif singkat (1605-1675) VOC berhasil mencapai dan mempertahankan suatu tujuan politik-ekonomi yang pernah dikejar Portugis, yaitu menguasai secara mutlak perdagangan rempah-rempah. Untuk mencapai tujuan tersebut dan guna memperoleh untung yang sebesar-besarnya, VOC melakukan berbagai tindakan seperti memindahkan pusat produksi rempah-rempah, terutama cengkeh, dari Maluku Utara ke Maluku Tengah agar lebih gampang dikontrol. Hal ini disebabkan karena di Maluku Utara, VOC mendapat saingan berat dari pedagang Inggris dan Spanyol di samping perlawanan dari Kesultanan Ternate dan Tidore yang semakin gih. Tindakan ini telah membawa suatu perubahan baru bagi masyarakat Maluku Tengah dalam kehidupan ekonomisnya yaitu memelihara atau mengelola suatu tanaman baru yang memberi hasil yang sangat tinggi nilainya. Itu berarti telah memberi suatu perubahan dalam kehidupan sosial dan ekonomi penduduk.

Dalam rangka kebijaksanaan politik-ekonomi tersebut, maka proses penurunan negeri-negeri dari gunung ke pantai yang telah dilakukan sejak masa Portugis dilanjutkan oleh VOC, kecuali di beberapa negeri di Pulau Ambon yang penduduknya tinggal di pegunungan sampai sekarang. Proses perpindahan yang dijalankan secara sistematis oleh VOC juga telah membawa perubahan-perubahan besar dalam pola-pola kemasyarakatan dan kebudayaan. Dinamika yang terjadi karena adanya eukulturasi itu oleh Cooley dinyatakan bahwa proses pemindahan ini disertai dengan perubahan agama dari kepercayaan asli menjadi agama Kristen.

Tentu saja perpindahan tempat tersebut, penggabungan kelompok-kelompok penduduk dan penggantian kepercayaan menyebabkan pula perubahan-perubahan yang tidak sedikit dalam bidang *adat-istiadat asli* yang selalu erat hubungannya dengan tempat dan kepercayaan. Oleh sebab itu masa 1605--1675 itu digambarkannya sebagai suatu periode perubahan dalam masyarakat negeri-negeri di Maluku terutama di Maluku Tengah yang mengalami kegoncangan-kegoncangan cukup besar. Dalam banyak hal cara hidup penduduk berubah akibat penurunan dari gunung ke pantai. (Cooley; *ibid*)

Perubahan sosial-kultural yang luas dan mendalam juga terjadi akibat politik Belanda mengadakan *hongitochten* guna mendirikan dan mempertahankan kekuasaannya atas perdagangan rempah-rempah. Seperti sudah diketahui *hongitochten* ini adalah ekspedisi-ekspedisi perang atau operasi pembersihan (*extirpasi*) terhadap penduduk yang tidak mentaati peraturan VOC yang mengharuskan supaya produksi rempah-rempah di jual kepada *compagnie* saja. Setiap tahun VOC menetapkan masing-masing negeri harus menyediakan sekian banyak kora-kora (perahu perang) lengkap dengan tenaga pendayung untuk membentuk pasukan yang dipimpin oleh Gubernur di Ambon dan dipergunakan untuk memukul daerah-daerah dan negeri-negeri yang menjual rempah-rempah kepada pedagang asing lainnya.

Diantara tahun 1625-1655 seluruh daerah Hoamoal yang oleh Portugis disebut Veranula (semennanjung Seram Barat di seberang Hitu), yang sebelumnya merupakan suatu daerah yang cukup padat penduduknya dan banyak kebun-kebun cengkehnya, dirusakkan dan dikosongkan sama sekali oleh *hongitochten* tersebut.

Akibat selanjutnya dari situasi tersebut banyak dikelompok masyarakat telah kehilangan kemerdekaannya. Dalam banyak hal kepentingan-kepentingan dan tujuan-tujuan dari pihak kolonial lebih diprioritaskan sebaliknya lembaga-lembaga sosial masyarakat seperti lembaga adat, saniri negeri, kehilangan fungsinya dan terpaksa menjalani fungsi-fungsi baru, fungsi-fungsi yang asing baginya seperti *hongitochten* tersebut.

Dalam lembaga-lembaga pemerintahan negeri telah mengalami pula pengaruh dan perubahan-perubahan yang drastis. Politik pemecah belah (*de vide at impera*) yang dijalankan pemerintah kolonoal Belanda menyebabkan masyarakat-masyarakat negeri berkembang menjadi satuan-satuan yang berdiri sendiri. Perkembangan ini mengakibatkan meningkatnya perasaan otonomi sehingga terlepaslah masing-masing negeri dari negeri yang lainnya. Hal ini telah menghambat perkembangan lembaga-lembaga pemerintahan dan politik yang lebih luas, yang dahulu mulai berkembang dalam sistem uli dan "Empat Perdana". Kepentingan penduduk diarahkan pada persekutuan negerinya sendiri, akibatnya egosentrisme dan lokalisme menjadi tebal dalam kesadaran masyarakat Maluku terutama di Maluku Tengah pada orang-orang Ambon dan Lease.

Lembaga-lembaga keagamaan mengalami perubahan juga. Pengaruh agama Kristen maupun Islam yang diterima penduduk agak dangkal dan formalistik (Radjawane: 1955). Hal ini ditambah pula dengan anggapan bahwa masing-masing agama mempunyai hubungan erat dengan kekuasaan politik dewasa itu. Kristen dengan kekuasaan Portugis dan Belanda, sedang Islam mempunyai hubungan erat dengan Ternate dan Tidore dan beberapa kerajaan lainnya di Nusantara bagian

barat. Kekuasaan-kekuasaan tersebut pada waktu-waktu tertentu amat bertentangan bahkan bermusuhan. Hal ini menyebabkan penganut masing-masing agama memandang kepercayaannya atau agamanya itu sebagai sesuatu yang sangat penting dan prinsipil. Mungkin ada diantara mereka yang kurang mengetahui tentang isi dan hakekat ajaran yang ada di dalam agama-agama tersebut namun mereka menyadari benar bahwa mereka adalah orang Islam dan orang Kristen dan hal itu tidak boleh diganggu atau dilanggar. Sementara itu bidang kebahasaan pun mengalami perubahan. Bahasa Melayu yang digunakan dalam pelajaran agama Kristen dan khotbah-khotbah di gereja lama-kelamaan mengganti bahasa daerah setempat atau bahasa tanah. Di negeri-negeri yang menerima dan menganut agama Kristen, bahasa tanah kian lama menjadi langka dan hanya digunakan dalam upacara-upacara adat.

Upacara keagamaan yang berkembang sampai sekarang adalah :

- Ibadah atau Gereja Minggu bagi penganut agama Protestan dan Katholik sedang bagi penganut agama Advent adalah ibadah hari Sabtu.
- Pada akhir pekan atau minggu diadakan gereja kunci Usbu yang di lakukan setiap hari Sabtu sore sebagai pengucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmatnya selama 6 hari. Ibadah ini juga sebagai persiapan untuk ibadah hari Minggu.
- Pada akhir bulan diadakan Ibadah atau Gereja kunci bulan juga sebagai pengucapan syukur.
- Ada pula gereja akhir tahun yang disebut Ibadah atau Gereja Kunci tahun. Diadakan pada malam tanggal 31 Desember, juga sebagai pengucapan syukur.
- Gereja anak Serani, yaitu upacara di gereja di mana anak-anak dibaptiskan dan diresmikan sebagai orang Kristen. Setelah dewasa diadakan upacara Sidi, yaitu upacara agama di gereja dimana seorang anak yang telah dewasa dilantik

sebagai anggota yang sah dan berdiri sendiri sebagai anggota gereja. Sidi dilakukan setelah seseorang selesai mengikuti semacam pendidikan agama yang disebut Katekisasi selama 2-3 tahun. Upacara tersebut dilakukan pada hari Jum'at yang agung sekitar bulan Maret/ April atau pada bulan Oktober.

- Gereja Besar, yaitu upacara agama di gereja pada hari Jum'at Yang Agung, yang diadakan dalam rangka peringatan hari wafatnya Yesus Kristus. Ibadah gereja ini hanya boleh dihadiri oleh orang dewasa dan sidi baru.
- Gereja kebangkitan yaitu upacara agama yang dilakukan pada hari Minggu yakni pada hari ketiga sesudah hari Jum'at Yang Agung, diadakan untuk memperingati kebangkitan Yesus Kristus dari kematiannya. Kemudian Gereja kenaikan, yaitu upacara agama untuk memperingati naiknya Yesus Kristus ke Surga pada hari yang ke 40 sesudah kebangkitannya.
- Gereja keturunan (=gereja keturunan Roh Kudus), yaitu upacara agama Kristen, sehubungan dengan turunnya roh kudus dari surga.
- Gereja kejadian (Natal) yaitu upacara agama diadakan pada tanggal 24 Desember malam untuk memperingati kelahiran Yesus Kristus.

Selain itu untuk memperingati atau menyongsong sesuatu kejadian yang penting diadakan upacara khusus misalnya memperingati hari lahir Gereja Protestan Maluku pada tanggal 6 September, hari Reformasi/hari Luther pada 30 Oktober, atau gereja menyongsong tahun baru 1 Januari.

BAB III

MALUKU UTARA

3.1 Geografi dan Politik

Betapapun juga, hubungan antara geografi dan politik cukup jelas di Maluku Utara. Sekalipun dari segi geografi, istilah Maluku terbatas pada pulau-pulau yang memiliki kedaton saja (Ternate, Tidore, Bacan dan Jailolo), namun tidaklah berarti bahwa jangkauan kekuasaan kerajaan-kerajaan itu terbatas pada pulau-pulau tertentu saja di Maluku Utara. Dari segi geografi nampaknya seluruh wilayah perairan di Maluku Utara (kini dinamakan Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram) merupakan sarana yang memungkinkan perluasan jangkauan kekuasaan dari kerajaan-kerajaan itu. Selain itu, wilayah maritim juga merupakan batasan interaksi perdagangan dan pelayaran penduduk yang berdiam di sekitarnya. Demikian pula persebaran budaya kedaton Maluku Utara memanfaatkan jalur-jalur politik dan perdagangan itu, dengan batasan-batasan geografi yang sama pula. Dengan demikian tidak mengherankan kalau interaksi antara Halmahera dan Seram Utara sangat menentukan pola masyarakat di kedua pulau itu; demikian pula interaksi antara pusat-pusat kekuasaan di Maluku Utara dengan pulau-pulau di sekelilingnya merupakan akibat langsung dari keadaan geografi itu. (Leirissa 1996, 1994).

Sebab itu, sebelum membahas masalah kaitan interdependensi antara geografi dan kekuasaan, ada baiknya dikemukakan terlebih dahulu ciri-ciri pokok geografi wilayah tersebut.

Maluku Utara adalah suatu wilayah perairan yang luas dengan ditaburi sekitar 353 buah pulau yang berbeda ukurannya. Luas perairan Maluku Utara itu adalah 107.383. km², tetapi luas pulau-pulau secara keseluruhan hanya 32.000 km². (Andili 1979 : 3-13). Halmahera adalah pulau yang terbesar, dikelilingi sejumlah pulau kecil di sebelah baratnya, seperti pulau Ternate dan pulau Tidore dan di sebelah timurnya, yaitu pulau Gebe. Selain itu terdapat sejumlah pulau kecil lainnya di selatan yang juga dikelilingi pulau-pulau yang lebih kecil lagi, seperti pulau Makian, dan pulau Obi.

Pulau-pulau ini merupakan bagian dari rangkaian gunung api yang menjangkau sampai ke Sulawesi. Sebab itu pulau-pulau yang penting itu sesungguhnya adalah puncak-puncak dari gunung api, seperti pulau Tidore dan pulau Ternate. Gunung api paling banyak terdapat di Halmahera bagian Utara. Perairan diantara pulau-pulau tersebut kini dinamakan Laut Maluku yang terbentang antara Halmahera dan Sulawesi Utara, Laut Halmahera antara pulau Halmahera dan Samudera Pasifik, dan Laut Seram antara pulau Halmahera dan pulau Seram yang menyambung ke Laut Banda di selatannya.

Menurut sensus 1971 tercatat 307.133 jiwa yang mendiami pulau-pulau itu, sedangkan sensus 1977 menunjukkan kenaikan hingga 378.537 jiwa; diperkirakan bahwa kenaikan penduduk rata-rata setiap tahun adalah 3,2% dengan kepadatan penduduk rata-rata 17 jiwa per km². (Andili, *loc.cit.*).

Keempat kerajaan di Maluku Utara di masa lampau masing-masing berpusat (berkedaton) pada sebuah pulau kecil menghadap ke pulau Halmahera. Hanya kerajaan Jailolo yang berpusat di pulau yang besar, yaitu pulau Halmahera sekalipun tidak seluruh pulau itu menjadi wilayah kekuasaannya. Ketiga

kerajaan lainnya memiliki kedaton pada pulau-pulau yang namanya sama dengan nama kerajaan. Kerajaan Bacan yang berkedaton di pulau Bacan dan berkuasa atas pulau-pulau kecil disekitarnya, kerajaan Ternate berkedaton di pulau Ternate, tetapi berhasil meluaskan pengaruhnya ke arah Barat hingga ke kepulauan Banggai dan sebagian dari pantai timur Sulawesi; kerajaan Tidore berkedaton di pulau Tidore, tetapi berhasil meluaskan jangkauannya ke Timur hingga ke kepulauan Raja Ampat serta pantai barat pulau Irian. Dalam awal abad ke-17 kerajaan Jailolo dihancurkan oleh Ternate, dan berangsur-angsur kerajaan Ternate dan Tidore membagi pulau besar itu dalam wilayah kekuasaannya. (Leirissa, 1996).

Untuk memudahkan pemahaman mengenai jangkauan kekuasaan kerajaan-kerajaan di Maluku Utara itu ada baiknya kita menarik garis-garis konsentrik mulai dari kota (kedaton) hingga ke wilayah-wilayah jajahan. Dengan demikian kita bisa membayangkan adanya empat garis konsentrik imajiner. Lingkaran pertama adalah kedaton-kedaton yang terletak di pulau yang menggunakan nama yang sama (Ternate, Tidore dan Bacan), serta kedaton Jailolo di Halmahera yang batasannya kini tidak jelas lagi.

Lingkaran konsentrik kedua adalah pulau-pulau kecil di sekitar pulau-pulau kedaton tersebut (kerajaan Jailolo mungkin sekali juga mencakup berbagai pemukiman di sekitarnya). Sebagian besar dari pulau-pulau kecil tersebut menghasilkan cengkeh sehingga dari segi ekonomi sangat penting bagi kedaton. Namun sejak abad ke-17, sehubungan dengan politik monopoli VOC, wilayah itu tidak dibenarkan mengeksport rempah-rempah, demikian pula seluruh Maluku Utara.

Lingkaran konsentrik ketiga dan keempat hanya berlaku untuk Ternate dan Tidore saja, karena wilayah-wilayah ekspansi kedua kerajaan itu, sedangkan kerajaan Bacan tidak memiliki wilayah ekspansi dan kerajaan Jailolo tidak jelas lagi karena seluruh pulau Halmahera sejak awal abad ke-17 telah menjadi bagian dari Ternate dan Tidore. Lingkaran konsentrik ketiga mencakup pulau Halmahera. Jazirah utara dan selatan pulau

Halmahera menjadi bagian dari Ternate, sedangkan Halmahera tengah yang terdiri atas jazirah-jazirah timur laut dan tenggara termasuk Tidore. Wilayah ini juga pernah (sebelum abad ke-17) menghasilkan rempah-rempah. Lingkaran konsentrik keempat adalah wilayah jajahan kedua kerajaan itu. Tidore meluaskan kekuasaannya ke Barat, sehingga mencakup pantai timur Sulawesi, kepulauan Banggai dan kepulauan Sula, sedangkan Tidore meluaskan kekuasaannya ke timur menjangkau kepulauan Raja Ampat, pesisir Irian Jaya, kepulauan Gorong-Seram Laut, dan Seram Utara.

Perbedaan pokok antara keempat wilayah konsentrik tersebut adalah pada hubungan wilayah-wilayah itu dengan kekuasaan kedaton yang diwujudkan dalam peran *sangaji* atau “*kepala distrik*” (menurut istilah yang digunakan VOC). Pada wilayah konsentrik pertama para *sangaji* yang terdapat dalam pulau kedaton merupakan bagian integral dari sistem kekuasaan kedaton. Mereka berhak menjadi anggota dewan kerajaan (*Bobato ma-dopolo*).

Para *sangaji* pada wilayah konsentrik kedua, yaitu di pulau-pulau kecil di sekitar kedaton, berada langsung di bawah kedaton tetapi tidak berhak menjadi anggota dewan kerajaan. Kekuasaan kedaton atas wilayah ini adalah langsung dan nampaknya bertujuan untuk mengamankan persediaan cengkeh melalui sistem upeti.

Para *sangaji* di wilayah konsentrik ketiga, yaitu di Halmahera, bersifat otonom tetapi memiliki ikatan tertentu dengan kedaton melalui sistem upeti dan pengerahan tenaga untuk hong. Di wilayah konsentrik ini pengawasan kedaton lebih longgar terutama daerah Halmahera Tengah yang berada dibawah kedaton Tidore. Di Halmahera-Ternate kekuasaan kedaton lebih terasa melalui para Utusan (wakil sultan) yang dilengkapi dengan tentara (baru-baru) di setiap *ke-sangaji-an*. Terutama ke-sangaji-an yang terdapat di jazirah utara memiliki interaksi yang lebih intensif dengan kedaton Ternate karena kewajiban menyediakan bahan makanan baik untuk kedaton maupun untuk VOC. Para *sangaji* dalam wilayah konsentrik

ketiga yang padat penduduknya itu pula yang wajib setiap saat menyediakan *juangga* atau kora-kora untuk *Hongi* kerajaan.

Keadaan tersebut sangat berbeda dengan para penguasa di wilayah konsentrik keempat yang sering juga dinamakan *sangaji*. Mereka tidak mengambil bagian dalam *Hongi*, tetapi didatangi *Hongi* kerajaan dengan tujuan mengumpulkan Upeti dari wilayah-wilayah itu. Jadi para *sangaji* di wilayah konsentrik keempat tidak memiliki hubungan patron-client dengan kedaton; mereka hanya menjadi daerah jajahan yang wajib menyerahkan upeti.

Kenyataan bahwa Upeti di wilayah konsentrik keempat itu dikumpulkan dengan paksa (melalui *Hongi*) merupakan perbedaan yang sangat berarti dengan wilayah-wilayah konsentrik lainnya. Dalam wilayah konsentrik lain tersebut para *sangaji* yang bersangkutan bersama para penguasa negerinya yang membawa Upeti itu ke kedaton, dan biasanya mereka mendapat imbalan tertentu dari kedaton. (Leirissa, 1996).

Kapan tepatnya sistem kekuasaan tersebut muncul di Maluku Utara tidak terlalu jelas. Menurut berbagai buku sejarah tradisional yang ditulis dalam abad ke-19 (*Hikayat*), dalam abad ke-13 telah ada seorang penguasa (*kolano*) yang bernama "Baab Mansur Malamo", sedangkan keempat kerajaan tersebut baru muncul sejak abad ke-14. Prof. Lapien memperkirakan bahwa kerajaan yang tertua itu adalah Bacan dengan jangkauan kekuasaan yang sangat luas. (Lapien, 1994 : 11--22).

Suatu hal yang dapat dikatakan dengan pasti adalah bahwa sejak abad ke-17 sistem kekuasaan tersebut di atas menjadi baku dan kaku. Melalui dukungan VOC yang berkepentingan mempertahankan larangan perdagangan rempah-rempah di wilayah itu, para sultan ketiga kerajaan tersebut makin lama makin memperkokoh kekuasaannya, dan dengan demikian pula makin membakukan sistem pemerintahan tersebut. Baru sejak bagian kedua dari abad ke-19 mulai muncul sistem birokrasi Belanda yang sedikit banyaknya mempertahankan pula struktur kekuasaan yang telah ada.

Permasalahan lain yang patut dipertanyakan adalah bagaimana, atau dengan cara apa, ekspansi kerajaan-kerajaan itu dilakukan, dan bagaimana kekuasaan kedua kerajaan utama itu (Ternate dan Tidore) ditegakkan di wilayah ekspansinya.

Jawaban atas pertanyaan itu memerlukan penelitian yang lebih mendalam. Dari data yang bisa diungkapkan dapat disimpulkan bahwa kaitan antara armada kerajaan (disebut hongi di sini) dan upeti dan tenaga kerja merupakan jaringan struktural yang bisa menjelaskan masalah ini. Wilayah Maluku disebut sebagai wilayah Maritim karena, terutama dalam zaman lampau, pemukiman penduduk lebih banyak memusat pada wilayah pesisir. Pulau-pulau yang pada umumnya merupakan puncak dari gunung-gunung berapi itu tidak memungkinkan penduduk membangun pemukiman di pegunungan. Pemukiman di pantai-pantai juga hanya terdapat di tempat-tempat di mana garis pantai agak melebar. (Leirissa 1996). Sebab itu pula komunikasi antar pemukiman lebih banyak dilakukan melalui laut dengan menggunakan perahu. Dengan demikian tidaklah mengherankan kalau budaya maritim merupakan salah satu unsur yang dominan dalam budaya Maluku Utara.

Kayu yang cukup banyak di hutan-hutan di pegunungan memungkinkan dibuatnya berbagai jenis perahu, mulai dari jenis oti mahera (perahu lesung tanpa cadik yang terbuat dari sebuah batang pohon yang *digali*), hingga jungga atau korakora yang lebih kompleks dan yang berbagai jenis itu. Pengembangan teknologi maritim memang disesuaikan dengan kondisi alam di sana. Berbagai bentuk perahu, mulai dari perahu lesung hingga yang bercadik terutama hanya berfungsi untuk komunikasi antar pemukiman atau paling jauh antar pulau yang bertetangga. Kalaupun terjadi arus perdagangan, seperti umpamanya antara Tidore hingga ke Irian dan Seram, maka pelayaran selalu dilakukan dari pulau ke pulau sehingga teknologi pelayaran pantai pula yang menonjol.

Namun untuk kepentingan politik kerajaan-kerajaan itu membangun sejenis perahu yang lebih besar dan lebih kokoh,

yaitu jenis jungga atau kora-kora. Jenis perahu itu terbuat dari papan dengan haluan dan buritannya menjulang ke atas beberapa meter dengan hiasan motif-motif sakral, seperti naga dan lain-lain. Cadik-cadiknya di sebelah kanan dan kiri badan perahu juga lebih besar. Malah sering di antara kedua batang cadik terdapat papan yang digunakan sebagai tempat para pengayuh. Perahu-perahu ini menggunakan layar segi empat (terbuat dari daun pandan yang dianyam) yang ditegakkan dengan tiga buah tiang yang menyatu di puncaknya (*tripot*) yang masing-masing bisa digerakkan menurut kebutuhan. Namun layar hanya digunakan dalam keadaan tertentu saja, karena pada umumnya perahu-perahu itu dikayuh. Muatannya bisa mencapai hingga 100 orang atau lebih (termasuk para pengayuh di cadik-cadik), yang terdiri atas pasukan tentara, pengayuh, dan para perwira yang duduk dalam sebuah bilik yang dibangun di tengah-tengah perahu. (Leirissa 1996).

Pada dasarnya setiap pemukiman diwajibkan memiliki sebuah jungga atau kora-kora, dan penduduknya secara bergiliran dan teratur berkewajiban menjadi awaknya. Sudah barang tentu hanya kedaton yang berhak memerintahkan pemuatan jungga atau menggunakannya. Pada saat-saat tertentu jungga-jungga itu dikumpulkan di kedaton sehingga membentuk sebuah armada kerajaan yang lazimnya dinamakan *Hongi*. Pimpinan *Hongi* adalah seorang pejabat kerajaan yang dinamakan Kapitan Laut, tetapi dalam ekspedisi-ekspedisi sering juga pejabat bawahan kerajaan yang menjadi pemimpinnya dengan mendapat sebutan Utusan. *Hongi* adalah alat politik yang utama dari kerajaan-kerajaan di Maluku, dan *Hongi* pula yang memungkinkan terjadinya ekspansi ke pulau-pulau yang letaknya jauh di luar wilayah kerajaan. (Leirissa 1996).

Batas jangkauan ekspansi kerajaan-kerajaan Ternate dan Tidore itu, besar kemungkinan, ditentukan oleh kemampuan jelajah *Hongi* kerajaan tersebut. Tenaga para pengayuh, makanan yang mereka butuhkan, dan lama perjalanan, semuanya merupakan pembatas jangkauan *Hongi*. Selain itu faktor iklim yang menentukan gerak arus dan arah angin juga

menentukan sekali. Demikian pula faktor geografis berupa pesisir Sulawesi dan pesisir Irian Jaya adalah batas-batas alamiah dari jangkauan ekspansi tersebut.

Kepentingan kedaton di wilayah-wilayah ekspansi seperti di kepulauan Banggai dan pantai timur Sulawesi (Ternate), atau kepulauan Raja Ampat, Irian dan Seram Utara (Tidore), adalah "Upeti" dalam bentuk hasil laut dan budak belian (terutama dari Raja Ampat dan Irian). Sistem Upeti, dengan demikian, adalah suatu sistem perdagangan pula. Melalui sistem upeti kedaton mendapat bahan-bahan keperluan yang dapat disalurkan kembali kepada para pejabat kerajaan dan warga kedaton. Selain sistem upeti, sudah tentu perdagangan rempah-rempah dan mutiara merupakan sumber penghasilan kedaton pula, selain melalui praktek dagang maupun melalui berbagai jenis pajak yang dikenakan oleh pihak kedaton pada kaum pedagang. Malah melalui gerak perdaganganlah kerajaan-kerajaan di Maluku, terutama Ternate dan Tidore, mendapat jangkauan cakrawala yang jauh melampaui batasan-batasan fisik dan geografis tersebut di atas. Perdagangan membawa Maluku Utara dalam batasan peradaban dunia yang silih berganti itu.

3.2 Perdagangan dan Kebudayaan

Pada dasarnya produk-produk dagang yang mahal seperti rempah-rempah dan mutiara, adalah monopoli kedaton. Sebab itu tidak mengherankan bahwa kekuasaan kedaton paling jelas nampak pada wilayah-wilayah yang menghasilkan komoditi dagang itu.

Di antara berbagai komoditi dagang yang mahal itu (*barang luks* kata Van Leur), cengkehlah yang memiliki makna yang paling menentukan dalam perkembangan peradaban di Maluku Utara. Karena satu dan lain hal cengkeh pada mulanya merupakan suatu komoditi dagang yang pada mulanya hanya dihasilkan di beberapa pulau kecil di Maluku Utara saja (pala lebih banyak dihasilkan di kepulauan Banda ketika itu).

Perdagangan rempah-rempah itu dimungkinkan karena struktur tanah yang memungkinkan tumbuhnya rempah-rempah itu pada satu pihak, dan pada pihak lain adanya permintaan akan jenis komoditi itu di kawasan-kawasan bumi lainnya. Bentuk interaksi ini mungkin sekali sudah berlangsung berabad-abad sebelum para pedagang Portugis memasuki wilayah ini dalam abad ke-16. Namun data mengenai masa sebelum itu sangat sulit ditemukan, sekalipun tradisi lisan dan berbagai *Hikayat* seperti *Hikayat Ternate* menunjuk pada adanya kegiatan politik dan perdagangan sebelum abad ke-14.

Agaknya di masa Majapahit perdagangan itu berpusat di kerajaan yang terletak di Jawa Timur itu. (Hall 1985: 232--260). Para pedagang dari Jawa, dan para pedagang dari Maluku, menjadi pembawa utama dari komoditi ini yang dipasarkan di Asia. Tetapi dengan hancurnya kerajaan Majapahit di abad ke-16 maka pusat perdagangan di Asia Tenggara itu beralih ke Malaka yang terletak pada jalur dagang yang strategis antara India dan Cina, sehingga rempah-rempah Maluku pun disalurkan melalui kota pelabuhan itu. (Reid 1993 : 2--24).

Kaitan antara perdagangan dan perubahan budaya kini mulai mendapat perhatian para ahli sejarah Asia Tenggara,

khususnya Indonesia. Sudah sejak disertasi Jacob Cornelis van Leur (1934) diterbitkan pada tahun 1950 permasalahan itu menjadi permasalahan yang dianggap patut dipelajari oleh para akademisi. (Van Leur, 1950). Kenneth R. Hall, umpamanya, dengan tegas hendak membuktikan bahwa pertumbuhan kerajaan-kerajaan tradisional di Asia Tenggara, termasuk Majapahit, sangat berkaitan dengan perdagangan. (Hall, 1985). Kemudian, Jan Wisseman Christie, seorang ahli sejarah yang juga mahir dalam arkeologi dan epigrafi, membuktikan bahwa kerajaan-kerajaan awal di Asia Tenggara (abad ke-5 hingga ke-9) tidak mungkin muncul tanpa adanya gerak perdagangan. (Wisseman Christie, 1995).

Namun studi dari Anthony Reid mengenai hubungan antara perdagangan dan perubahan budaya dalam masa *Kurun Niaga* (abad ke-15 hingga abad ke-17) di Asia Tenggara tersebut di atas (Reid 1988) berhasil lebih banyak membuka cakrawala pengetahuan kita mengenai permasalahan itu. Sayangnya perkembangan di Maluku Utara (bahkan seluruh Maluku) kurang mendapat perhatian dalam buku itu, kecuali data mengenai arus jumlah ekspor rempah-rempah.

Reid menunjukkan, bahwa pola dasar dari kaitan antara perdagangan dan perubahan budaya itu adalah sebagai berikut : para pedagang asing yang bermukim di kota-kota dagang di Nusantara memiliki gaya hidup dan pandangan hidup yang khas yang dibawa dari daerah asalnya masing-masing, dan yang sangat berbeda hanya hidup dan pandangan keagamaan dengan penduduk lokal pada umumnya. Kehidupan para pedagang asing di kota-kota pelabuhan itu memancarkan kemewahan dalam bentuk pakaian yang terdiri dari bahan-bahan yang beraneka warna dengan harga yang bervariasi; perumahan mereka dihiasi dengan berbagai kain tenun dan barang-barang kebutuhan hidup impor lainnya yang mewah, pandangan hidup mereka mengikuti ajaran-ajaran agama Islam yang dalam abad ke-15 belum lazim di Nusantara.

Status khas dari kaum pedagang itulah yang kemudian ditiru oleh penduduk lokal. Bermula dari para penguasa dan

aristokrasi lokal, dan kemudian berangsur-angsur menyebar juga ke pemukiman-pemukiman lainnya yang memiliki kemampuan dagang yang dapat memikul kemewahan itu. Maka berangsur-angsur nampak perubahan pada lapisan atas lokal tersebut. Kemewahan dalam berpakaian dan perumahan membedakan mereka dari penduduk biasa pada umumnya. Agama Islam juga menyebar di kalangan mereka dan membuat mereka setara dengan para pedagang asing itu. Dengan demikian pola budaya yang mulanya hanya terdapat di kalangan pemukiman asing di kota-kota pelabuhan tertentu, menyebar ke lapisan-lapisan elite kerajaan dan menjadi ciri khas dari kerajaan-kerajaan yang bersangkutan. (Reid, 1988).

Proses ini agaknya terjadi juga di Maluku Utara, sekalipun belum dipelajari secara tuntas. Dalam dokumen-dokumen VOC jelas nampak adanya perbedaan budaya antara penduduk pemukiman-pemukiman di pesisir Halmahera yang bercorak Islam dan penduduk pedalaman yang tidak tersentuh dengan kebudayaan kaum pedagang tersebut di atas. Desa-desa di pesisir umumnya secara nominal bercorak Islam. Setiap desa dilengkapi oleh rumah ibadah, dan para pejabat agama (*bobato akherat*) merupakan bagian penting dari elite negeri (*bobato*). Pada umumnya para penguasa negeri ditandai dengan jubah hitam serta tutup kepala hitam atau destar ngongare yang merupakan pemberian sultan sebagai tanda status kedudukan *bobato*. Penduduk pada umumnya juga berpakaian yang terbuat dari aneka macam tekstil yang diimpor atau hasil produksi kota-kota kedaton. Ini membedakan penduduk negeri-negeri pesisir itu dengan penduduk pedalaman yang umumnya hanya bercawat.

Rumah-rumah di negeri-negeri pesisir pun berbeda dengan di pedalaman. Di negeri-negeri pesisir rumah-rumah penduduk berdiri di atas tanah dan pada umumnya adalah rumah untuk satu keluarga. Di pedalaman rumah-rumah pada umumnya adalah rumah panjang untuk keluarga besar dan berdiri di atas tiang-tiang. Perbedaan itu menunjuk pada kenyataan, bahwa di pesisir budaya kaum pedagang telah merata, paling kurang

sejak abad ke-18, sedangkan di pedalaman perubahan yang diakibatkan perdagangan itu tidak nampak. (Leirissa, 1996). Namun demikian tidak berarti bahwa di negeri-negeri pesisir pola budaya lama, yang di Maluku pada umumnya dinamakan kebudayaan *halefuru* (Maluku Utara) atau *alifuru* (Maluku Tengah), sesungguhnya tidak lenyap sama sekali.

Kesamaan dalam corak budaya pesisiran di Maluku Utara itu mempunyai implikasi politik pula. Persamaan budaya antara negeri-negeri dengan kedaton-kedaton melahirkan integrasi yang lebih mantap antara kedaton dan negeri-negeri, terutama dalam lingkaran pertama, kedua, dan ketiga. Namun keadaan itu tidak berlaku bagi masyarakat *halefuru* dalam hubungannya dengan kedaton-kedaton. Pada umumnya struktur pemerintahan di negeri-negeri sedapat mungkin mengikuti pola yang ada di kedaton.

Di kedaton-kedaton Maluku Utara terdapat sejumlah pejabat kerajaan sebagai pelaksana administrasi kerajaan (*bobato madopolo*), seperti Jogugu (pejabat utama), *Kapitan Laut* (Urusan Hongi dan Upeti), dan dua orang *Hukum* (hubungan dengan rakyat). Di negeri-negeri di luar kedaton pada umumnya sangaji merupakan semacam raja (*local chieftain*) yang dilengkapi dengan aparat pemerintahan yang sedapat mungkin mengikuti pola *bobato ma-dopolo* di kedaton tersebut. Walau jumlah pejabat negeri tersebut tidak selalu lengkap seperti halnya kedaton, tetapi jabatan *Kapitan Laut* selalu ada di setiap negeri karena pentingnya jungga atau kora-kora dalam struktur politik kerajaan. (Leirissa, 1996).

Dengan demikian, aspek perdagangan bisa banyak menjelaskan tatanan politik. Bagaimana kekuasaan kerajaan-kerajaan Maluku Utara itu muncul sehingga mencakup wilayah kekuasaan yang hierarkhis yang digambarkan melalui lingkaran-lingkaran konsentrik imajiner tersebut tidak dapat dikatakan dengan pasti. Tetapi dalam abad ke-17 jelas sekali nampak bahwa hubungan-hubungan politik itu menjadi baku karena pengaruh VOC. VOC berkepentingan dalam mempertahankan, malah memperkuat, hubungan-hubungan

politik tersebut, demi terlaksananya politik monopolinya di Maluku Utara.

Namun dalam tatanan itu terdapat suatu kelemahan yang inheren. Perbedaan politik dan budaya antara pesisir dan pedalaman tersebut menimbulkan keadaan masyarakat yang kadar integrasinya juga sangat lemah. Pada satu pihak negeri-negeri pesisir terintegrasi dengan baik dengan kedaton-kedaton, pada pihak lain penduduk pedalaman yang dalam masa tiga kali lebih banyak jumlahnya daripada penduduk pesisir, agak terpisah dari pusat-pusat kekuasaan (kedaton). Pada umumnya hubungan penduduk pedalaman (*halefuru*) dengan kedaton bersifat tidak langsung, karena untuk kepentingan ekonomi mereka lebih banyak terkait dengan negeri-negeri terdekat karena kepentingan-kepentingan, dan sebab itu mereka juga bisa dikerahkan untuk Hongi oleh *Sangaji* negeri bersangkutan. Dalam situasi-situasi tertentu, seperti umpamanya dalam masa Gerakan Raja Jailolo (1796-1832) kelompok elite politik yang menolak kekuasaan yang berlaku bisa mendapat dukungan dari kalangan *halefuru* untuk menolak kekuasaan kedaton, bahkan membentuk kedaton baru. (Leirissa, 1996).

Dengan demikian dapatlah dipahami betapa pentingnya peranan VOC sebagai faktor stabilitas dalam kawasan tersebut. Hanya dalam keadaan dimana kekuasaan Belanda menjadi lemah, seperti pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19, maka keadaan yang tidak terintegrasi itu bisa menimbulkan pergolakan sosial, seperti di masa Nuku dan Raja Jailolo tersebut diatas (1780-1832).

Namun berbeda dengan kaum pedagang lainnya, kaum pedagang Belanda yang terorganisasi dalam *Verenigde Oost-indische Compagnie* (VOC) tidak membawa perubahan budaya. (Van Leur, 1950). Keadaan itu sangat jelas di Maluku Utara. Hanya di pusat pemukiman VOC, yaitu di benteng Fort Oranye di pulau Ternate, nampak ada pengaruh budaya Barat dalam bentuk pemukiman kaum *burgers* dan perluasan agama Kristen.

Keadaan di Maluku Utara itu sangat berbeda dengan di Maluku Tengah yang akan dibahas di bagian lain. Sebab itu masalah ini memerlukan penjelasan mengenai sebab-musababnya. Salah satu penjelasan yang bisa diterima adalah bahwa VOC di Maluku Utara sama sekali tidak meluaskan jaringan birokrasinya seperti halnya di Maluku Tengah. Selain Gubernur VOC yang berkedudukan di *Fort Oranye* tersebut bersama para pegawai dan tentaranya, tidak terdapat jaringan kekuasaan berupa Residen atau Asisten Residen, Gereja, dan lain-lain. Di Maluku Utara VOC menjalankan kekuasaannya melalui para sultan dan birokrasinya yang sebagai kelompok sosial disebut sebagai *bobato*. Tentara VOC di *Fort Oranye* dan berbagai benteng lainnya di pusat-pusat kekuasaan Tidore dan Bacan, hanya berfungsi sebagai pendukung tentara kerajaan dan honginya. Nampak jelas bahwa VOC menjadikan birokrasi kerajaan dalam sistem kekuasaan *indirect rule* atau pemerintahan tidak langsung, yang umum terdapat di Nusantara.

Kepentingan VOC di Maluku Utara memang bersifat *negatif*, dalam arti mempertahankan larangan memproduksi dan memperdagangkan rempah-rempah. Sejak pertengahan abad ke-17 produksi dan perdagangan cengkeh oleh VOC telah dipusatkan di kepulauan Ambon, Haruku, dan Nusa Laut. (Knaap, 1987). Sedangkan kepulauan Banda digunakan sebagai wilayah monopoli pala. (Hanna, 1983). Dengan demikian, VOC tidak membutuhkan sebuah aparat untuk mengawasi produksi rempah-rempah seperti di Maluku Tengah. Pemerintahan VOC dan kemudian juga Hindia Belanda di Maluku Utara semata-mata berupa *pemerintahan tidak langsung*. Keadaan itulah yang terutama bisa menjelaskan mengapa budaya kaum pedagang VOC samasekali tidak mempengaruhi Maluku Utara. Perubahan mulai nampak dalam bagian kedua abad ke-19 ketika birokrasi Hindia Belanda mulai merambat di wilayah ini pula. Modernisasi yang melanda wilayah-wilayah Nusantara lainnya sejak awal abad ke-20 juga nampak di sini, namun sifat *pemerintahan tidak langsung* tersebut tidak hilang samasekali.

3.3 Bahasa-bahasa Lokal

Wilayah Maluku Utara merupakan suatu wilayah kebahasaan yang memiliki ciri-ciri yang khas yang tidak terdapat di wilayah lainnya di Nusantara. Sebab itu tidak mengherankan kalau sejumlah ahli linguistik pernah mengadakan penelitian yang mendalam atas struktur kebahasaan wilayah ini.

Pada umumnya bahasa-bahasa di Nusantara ini tergolong bahasa Austronesia. Keadaan di Maluku Utara pun demikian. Tetapi disamping bahasa-bahasa yang tergolong Austronesia itu terdapat pula bahasa-bahasa yang memiliki ciri-ciri yang lain samasekali sehingga disebut bahasa-bahasa Non-Austronesia. Di Indonesia bahasa-bahasa yang tergolong Non-Austronesia itu lebih banyak terdapat di sekitar Kepala Burung (Irian Jaya), sehingga para ahli bahasa menamakan bahasa Non-Austronesia yang terdapat di Indonesia itu sebagai bahasa Non-Austronesia dari kelompok *West Papua Phylum*.

Kalau dikaji lebih teliti lagi maka ternyata di antara bahasa-bahasa *West Papua Phylum* itu terdapat perbedaan-perbedaan yang penting. Pertama adalah jenis bahasa tersebut yang terdapat di kalangan orang-orang Halmahera Utara seperti yang digunakan di Sahu, Galela, Loloda, Tobelo, Pagu, Modole dan Tobaru; termasuk di sini adalah bahasa-bahasa di Kepulauan Ternate, Tidore. Kedua adalah bahasa-bahasa Non-Austronesia yang digunakan oleh penduduk pulau Makian Barat yang jelas merupakan suatu variasi tersendiri pula. (Voorhoeve, 1984).

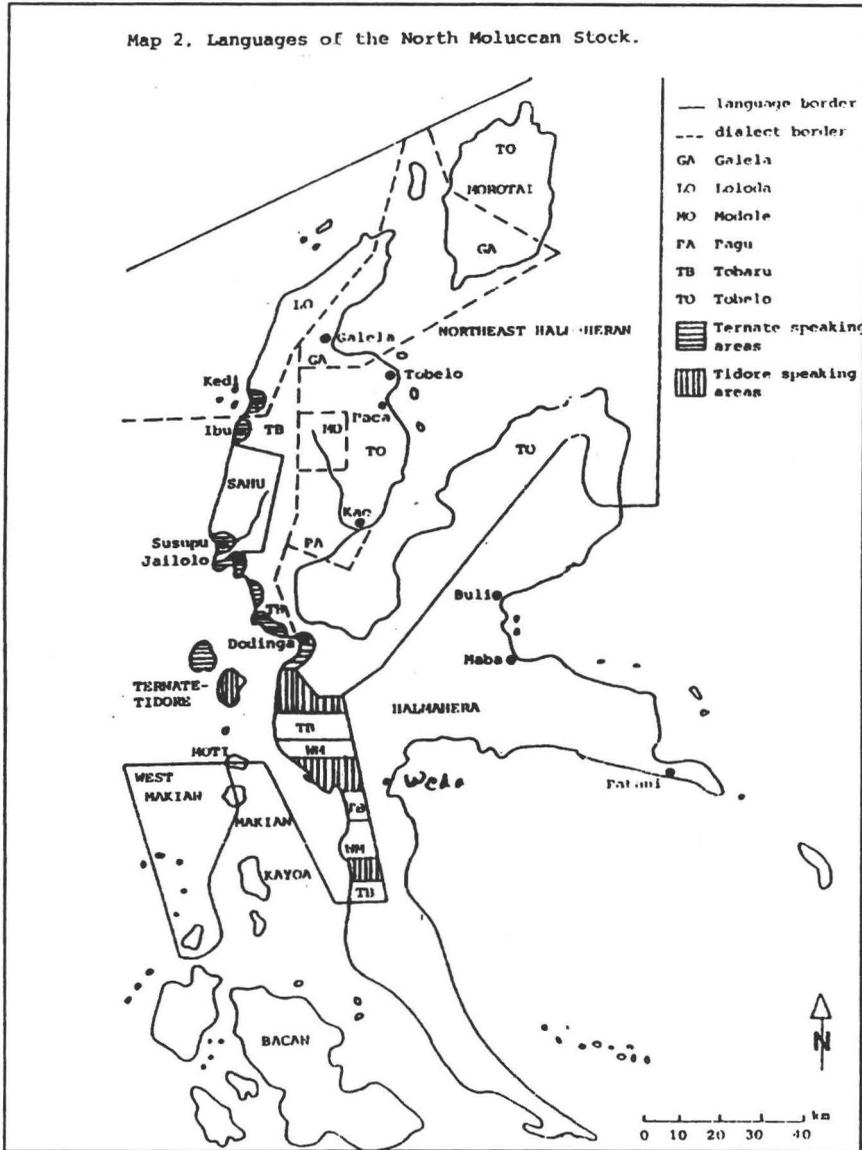
Penduduk Halmahera Timur (Maba, Weda, Patani) ternyata menggunakan campuran dari bahasa-bahasa Austronesia dan Non-Austronesia. Keadaan yang khas ini pernah dipelajari oleh Prof. Masinambouw yang menyebutnya sebagai wilayah "konvergensi bahasa" atau wilayah dimana terdapat percampuran antara dua jenis bahasa. (E.M.K. Masinambouw, 1976). Bahasa yang digunakan penduduk di wilayah Halmahera Timur, seperti di seluruh Maluku, (dan seluruh Indonesia) pada

umumnya tergolong bahasa Austronesia. Namun di masa lampau wilayah Halmahera Timur tergolong dalam wilayah kekuasaan kerajaan Tidore yang penduduknya menggunakan bahasa Non-Austronesia. (Leirissa, 1996). Nampaknya pengaruh keraton-keraton Maluku itu demikian besarnya sehingga terjadilah percampuran atau perpaduan itu.

Bahasa-bahasa Austronesia di Halmahera timur yang tergolong bahasa-bahasa *Austronesian Phylum* itu sama dengan bahasa-bahasa yang digunakan di seluruh Indonesia yang oleh para ahli bahasa sering dinamakan bahasa-bahasa Malayo-Polinesia. (Grimes & Grimes, 1984). Kelompok bahasa terakhir itu bisa dibagi tiga pula, yaitu kelompok Malayo-Polinesia Barat, Tengah dan Timur. Bahasa-bahasa yang termasuk kelompok Malayo-Polinesia Barat yang terdapat di Indonesia bagian barat. Namun anehnya bahasa Melayu yang digunakan di Maluku Utara sejak paling kurang abad ke-16, termasuk kelompok bahasa Malayo-Polinesia Barat itu. Malayo-Polinesia Tengah terutama terdapat di Maluku Tengah dan Tenggara, sedangkan bahasa-bahasa Malayo-Polinesia Timur terdapat di Halmahera Selatan dan Irian Barat serta Oseania.

Keadaan menjadi lebih rumit lagi karena, sekalipun kelompok bahasa Malayo-Polinesia Tengah terutama terdapat di Maluku Tengah dan Tenggara, namun di Maluku Utara terdapat beberapa pulau dimana bahasanya termasuk dalam kelompok ini pula, seperti di kepulauan Sula, Mangole, Taliabu, dan di pulau Bacan. Sedangkan yang termasuk bahasa Malayo-Polinesia Timur yang terdapat di Halmahera Selatan itu dapat dibagi pula antara bahasa-bahasa Halmahera Barat Daya (Gebe dan Makian Timur, Weda dan Sawai), Halmahera Tenggara (Patani, Maba, Buli) dan di pulau Gebe. (Grimes & Grimes, *loc.cit.*).

PETA KEBAHASAAN DI MALUKU UTARA



Sumber : Visser & Voorhoeve, 1987 : 4

3.4 Bahasa Melayu

Seperti dikemukakan di atas, selain bahasa-bahasa yang tergolong rumpun bahasa Non-Austronesia, di Maluku Utara terdapat pula penutur bahasa Austronesia (Malayo-Polinesia). Para penutur bahasa ini justru terdapat di wilayah-wilayah yang bukan menjadi inti kerajaan-kerajaan besar (Ternate dan Tidore), seperti kepulauan Banggai, kepulauan Sula, pulau Bacan, Halmahera Timur dan Halmahera Selatan, dan pulau Gebe.

Namun suatu hal yang menarik pula bahwa bahasa Melayu juga digunakan di kedaton-kedaton untuk berinteraksi dengan dunia luar. VOC jelas menggunakan bahasa ini dalam berkomunikasi dengan para sultan, seperti yang bisa dibuktikan dalam dokumen-dokumennya yang masih tersimpan di Arsip Nasional R.I. Jakarta. Biasanya korespondensi antara pihak kedaton dan pihak VOC dilakukan dalam bahasa Melayu serta aksara *Arab Gundul* atau *Jawi*. Untuk menerjemahkan surat-surat itu, atau untuk menulis surat balasan VOC mempekerjakan sejumlah *translatuer* (penerjemah) yang biasanya berasal dari kaum pedagang asing yang telah bermukim lama atau bergenerasi di Ternate. Dapat diperkirakan bahwa dalam komunikasi lisan pun digunakan bahasa Melayu.

Keadaan ini jelas menunjukkan betapa pentingnya budaya pedagang tersebut di atas dalam kedaton-kedaton di Maluku Utara. Tetapi di antara kedaton-kedaton itu, Ternate-lah yang paling banyak menerima unsur-unsur tersebut. Dalam mengkisahkan kerajaan-kerajaan di Maluku Utara, Valentijn menemukan kenyataan bahwa sastra pesisir yang berasal dari kerajaan-kerajaan Islam lainnya di Nusantara juga terdapat di Ternate. (Valentijn, Jilid I, bagian A, 1734).

Namun kenyataan bahwa bahasa lokal (Non-Austronesia) samasekali tidak terdesak dibuktikan dalam sebuah kitab sejarah yang ditulis oleh Naidah (orang Ternate) di abad ke-19. (Van der Crab, 1878). *Hikayat Ternate* tersebut jelas mengikuti

tradisi penulisan sejarah pesisiran yang mekar di zaman Kurun Niaga tersebut di atas. Dalam hal gaya dan isinya jelas nampak bahwa Naidah berupaya keras untuk mengikuti pola yang telah lazim itu. Namun bahasa yang digunakan adalah bahasa Ternate, walau diberi terjemahan bahasa Melayunya. Dualisme ini nampaknya merupakan pola utama dalam kedaton Ternate sejak masa VOC, bahkan mungkin juga sebelum itu. Budaya lokal mengikat kedaton dan warganya, tetapi budaya pesisiran mengikat seluruh wilayah kerajaan dengan wilayah-wilayah lainnya di Nusantara. Budaya lokal mewujudkan *Maluku Kie Raha*, sedangkan budaya pesisiran mengikat *Maluku Kie Raha* dengan bagian-bagian lainnya dari dunia sekitarnya. Dalam abad ke-19 kedua unsur itu nampaknya, telah memadu secara serasi dan menjadi ciri khas dari budaya kedaton, paling kurang di Ternate.

3.5 Maluku Kie Raha

Perpaduan antara unsur-unsur budaya lokal dan budaya pesisiran yang datang dari luar melalui perdagangan itu nampak sangat jelas dalam budaya politik kedaton-kedaton di Maluku Utara, terutama di Ternate.

Budaya politik di *Maluku Kie Raha* paling jelas terekam dalam mitos-mitos tentang asal-usul raja-raja Maluku yang dipertahankan pihak-pihak kedaton. Tetapi selain itu, dalam kehidupan sehari-hari terdapat pandangan hidup serupa sehingga mewujudkan suatu masyarakat *Maluku Kie Raha* yang terintegrasi.

Sebagai mitos mengenai asal-usul keempat raja di Maluku Utara mitos itu bisa disebut sebagai *Maluku Kie Raha*, atau Maluku empat gunung yang menunjukkan keempat kerajaan itu (Ternate, Tidore, Bacan dan Jailolo). Salah satu versi dari mitos itu yang berasal dari abad ke-17 menceritakan mengenai seorang yang menemukan empat buah telur naga di bawah serumpun bambu. Lalu terdengar suara bahwa orang itu harus memelihara telur-telur itu dengan baik hingga menetas. Ketika menetas maka muncullah empat pria yang gagah yang

kemudian menjadi raja di Ternate, Tidore, Bacan dan Jailolo. (Valentijn, Jilid I, 1724).

Hikayat Ternate dari Naidah yang ditulis dalam abad ke-19 itu membuktikan bahwa mitos-mitos asal-usul yang berasal dari budaya lokal itu telah terintegrasi dengan sempurna dengan budaya pesisiran yang muncul berabad-abad sebelumnya. Versi Naidah mengemukakan, bahwa pada suatu ketika (tidak dikemukakan kapan) seorang ulama dari timur yang bernama Jafar Sadek datang ke Ternate melalui Jawa. Di Ternate ulama itu menikah dengan seorang bidadari, Nurus Safa, dan menurunkan raja-raja Maluku. Lengkapnya versi itu adalah sebagai berikut (dikutip dari Van Fraassen 1978, II: 11--12):

Pernah seorang Arab datang ke Ternate; namanya Jafar Sadek. Ia memanjat gunung dan melihat tujuh bidadari yang sedang mandi di sebuah danau. Ia berhasil menyembunyikan sayap dari salah seorang bidadari itu. Ketika para bidadari itu selesai mandi dan hendak terbang kembali ke kayangan, bidadari yang bungsu tidak dapat menemukan sayapnya sehingga terpaksa tinggal di bumi. Bidadari yang bernama Nurus Safa itu lalu hidup bersama Jafar Sadek. Nurus Safa dan Jafar Sadek mendapat tiga orang putra. Putra tertua bernama Buka, yang kedua bernama Darajat, dan yang ketiga bernama Sahadat. Kemudian, ketika Nurus Safa sedang memandikan putranya yang termuda, ia melihat sayapnya yang disembunyikan suaminya itu tersangkut di atap. Ia mengambil sayapnya dan sampai tiga kali ia mencoba terbang. Tetapi tidak berhasil. Ia mendengar putranya yang paling bungsu itu menangis dan untuk terakhir kali ia kembali lagi. Ia memeras susunya dalam sebuah mangkok dan berkata pada putranya yang sulung : "Kalau si bungsu menangis, berikan susu ini. Dan bila ayahmu kembali, katakan padanya bahwa aku telah kembali ke tempat asalku." Setelah itu ia terbang menghilang. Ketika Jafar Sadek pulang dan mendengar pesan dari istrinya itu, ia menangis. Seekor elang (*guheba*) mendengar tangisannya dan bertanya padanya mengapa ia menangis. Setelah Jafar Sadek menceritakan mengapa ia sedih, maka elang itu menawarkan padanya untuk membawanya ke kayangan dengan menaiki punggungnya untuk mencari

istrinya. Dengan bantuan elang itu Jafar Sadek tiba di kayangan. Ketika penguasa kayangan bertanya padanya apa yang dicarinya, Jafar Sadek menjawab : "Istriku, yang adalah putrimu." Penguasa kayangan itu lalu memanggil ketujuh putrinya yang wajahnya sama semua. Dikatakan pada Jafar Sadek, bahwa bila ia bisa menunjuk mana istrinya, maka ia boleh membawanya pulang. Namun kalau gagal, ia akan dibunuh. Ketika Jafar Sadek sedang putus asa, datanglah seekor lalat biru (*gufu sang*) yang mengatakan bisa menolong Jafar Sadek bila diberi imbalan. Jafar Sadek menjawab, bahwa apa saja yang bau tidak enak di bumi akan menjadi miliknya. Lalat itu menerima usul itu, dan berhasil melakukan apa yang ia janji karena Nurus Safa pernah menyusui anak sehingga bau pentilnya berbeda dengan para bidadari lainnya. Lalat itu berkata pada Jafar Sadek : "Perhatikan baik-baik, aku akan mengelilingi putri-putri itu dan yang saya singgahi adalah istrimu". Dengan demikian Jafar Sadek berhasil menunjuk istrinya, sehingga penguasa kayangan itu sendiri yang mengawinkan mereka. Di kayangan lahirlah putra keempat yang paling bungsu yang bernama Masyhur-ma-lamo (yang paling masyhur), yang berbeda dengan ketiga saudaranya, lahir dari perkawinan yang sah.

Setelah beberapa lama berdiam di kayangan, Jafar Sadek ingin kembali ke bumi dengan istri dan anaknya itu. Penguasa kayangan setuju, namun sebelum mereka turun ke bumi Masyur-ma-lamo tidak berhenti menangis. Penguasa kayangan itu lalu berkata : "Mungkin ia menginginkan kopianku. Ketika kopian itu dipakaikan pada anak itu, ia berhenti menangis. Dengan demikian mereka kembali ke bumi, dengan Masyhur-ma-lamo memakai kopian kakeknya dari kayangan.

Ketika Jafar Sadek dan Nurus Safa tiba kembali di bumi dan berjumpa kembali dengan ketiga putra mereka yang ditinggalkan itu, maka Nurus Safa memberi tempat duduk kepada setiap putra itu. Putra sulung, Buka, mendapat batang kayu (*age*) sebagai tempat duduknya. Ia berangkat ke Makian dan menjadi cikal-bakal dari raja-raja Bacan. Putra kedua mendapat kayu apung (*ginoti*) sebagai tempat duduknya. Ia bertolak ke Moti dan menjadi cikal-bakal dari raja-raja Jailolo. Putra ketiga, Sahadat, mendapat batu (*mari*) sebagai tempat duduknya. Ia bertolak ke Tidore dan menjadi cikal-bakal dari raja-raja Tidore. Putra keempat yang bungsu, Masyur-ma-lamo, mendapat kursi sebagai

tempat duduk dan menjadi cikal-bakal raja-raja Ternate. Kopian dari Kakeknya di langit menjadi mahkotanya.

Mitos yang terjalin dalam Hikayat dari Naidah itu mengacu pada beberapa hal yang memang merupakan kenyataan, sekalipun kronologinya tidak ditegaskan. Memang diketahui dari sumber-sumber Portugis, bahwa sejak abad ke-15 telah terdapat empat kerajaan di Maluku, masing-masing di sebuah pulau dengan nama yang sama. (Van Fraassen 1987, II:19-21). Namun baik sumber-sumber Portugis, maupun sumber-sumber Belanda tidak membentangkan sistem status yang berlaku di antara kerajaan-kerajaan Maluku itu. Hal ini justru menjadi pokok masalah dalam Hikayat Ternate. (Penekanan mengenai hal ini mungkin berkaitan dengan kenyataan bahwa dalam abad ke-19 masalah sistem status itu telah banyak dilupakan orang).

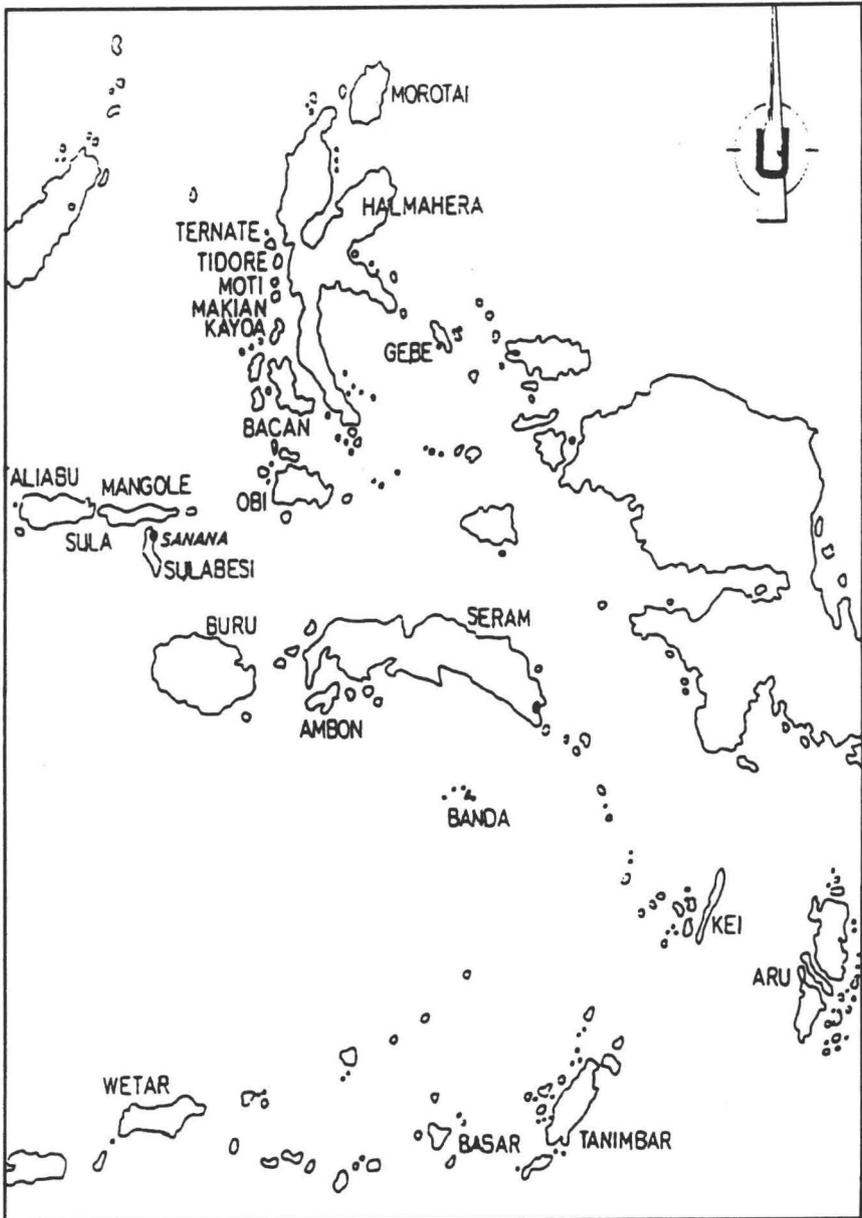
Selain memiliki tempat duduk (*dodego*) masing-masing, menurut Hikayat Ternate, keempat raja pertama di Maluku itu juga memiliki gelar (*ronga*) masing-masing. Buka, raja Bacan, bergelar *Dehe ma-kolano* (Raja Ujung Tanjung; kolano = raja), putra kedua, Darajat, bergelar *Jiko ma-kolano* (Raja Teluk), putra ketiga, Sahadat, bergelar *Kie ma-kolano* (Raja Gunung), dan yang keempat, Mashur-ma-lamo, bergelar *Alam ma-kolano* (Raja Alam).

Asal-usul yang sama itu, sekalipun derajat berbeda, menunjukkan bahwa antara keempat kerajaan itu terdapat semacam federasi. Dalam *Hikayat Ternate* dikisahkan bahwa pada saat-saat tertentu keempat raja itu berkumpul di suatu tempat (biasanya pulau Moti), untuk menentukan struktur kekuasaan federasi itu. Salah satu diantara mereka dipilih menjadi *primus inter paris* yang berhak memakai umbul-umbul ketiga raja lain yang masing-masing memiliki warna sendiri, disamping umbul-umbunya sendiri sehingga melambangkan federasi itu. Salah satu pertemuan itu terjadi sekitar pertengahan abad ke-14. Pada saat itulah Ternate mendapat kehormatan menjadi *primus inter paris*. Nampaknya mitos Maluku Kie Raha yang dikemukakan Naidah tersebut di atas menunjuk pada peristiwa itu. Kedudukan Ternate itu

nampaknya berlangsung hingga abad ke-17 karena, seperti dikemukakan di atas, ketika Belanda tiba di sana sultan Ternate menyandang gelar *Kolano Maluku*.

Sekalipun pandangan dunia Maluku Kie Raha tersebut di atas telah menjadi pegangan yang menentukan dalam pergaulan antara kerajaan-kerajaan di Maluku sejak abad ke-18, dan dengan demikian sesungguhnya telah menjadi sebuah mitos seperti yang diungkapkan dalam Hikayat Ternate, namun pengaturan masyarakat pada taraf yang lebih rendah tetap mengikuti pandangan itu. Hal ini dibuktikan oleh Dr. Chris van Fraassen yang telah dikutip beberapa kali di atas. Dalam disertasinya yang khusus membicarakan pulau Ternate dimana prinsip organisasi sosial yang didasarkan pada prinsip genealogis-teritorial yang disebut *soa* (= bagian) itu dikatakan bahwa "organisasi *soa* berkaitan erat dengan organisasi sosio-politik dari kesultanan". Keadaan ini juga terdapat di pulau Tidore. (Leirissa, 1996).

PROPINSI MALUKU





BAB IV

MALUKU TENGAH

ISTILAH “MALUKU TENGAH”

Istilah Maluku pada nama kabupaten Maluku Tengah memang mengacu pada istilah Maluku seperti yang diuraikan dalam Bab I. Namun sebelum abad ke-19 tidak ada kebiasaan untuk menyebut kepulauan antara Sulawesi dan Irian Jaya itu dengan istilah Maluku. Sebab itu pula sebelum abad ke-19 tidak ada istilah *Maluku Tengah* ataupun Maluku Tenggara. Sampai abad itu istilah Maluku masih tetap digunakan dalam pengertian *Maluku Kie Raha* seperti yang dikemukakan dalam Bab I.

Perubahan itu adalah perbuatan Belanda. Dalam masa VOC (abad ke-17 hingga ke-18) kepulauan antara Sulawesi dan Irian itu terbagi dalam tiga *gouvernement*, yaitu pertama *gouvernement Ternate* untuk Maluku Utara yang berpusat di Benteng Oranye di Ternate, kedua, *gouvernement Amboina* untuk Maluku Tengah yang berpusat di Benteng Victoria di pulau Ambon, dan ketiga *gouvernement Banda* untuk Maluku Tenggara yang berpusat di Benteng Belgica di Bandaneira.

Setelah VOC dibubarkan Belanda membentuk Hindia Belanda pada tahun 1817. Ketiga *gouvernement* tersebut di atas lalu disatukan menjadi satu *gouvernement*, dan pusatnya ditempatkan di kota Ambon di pulau Ambon. Satuan administrasi pemerintahan yang dibentuk pada tahun 1817 itu

diberi nama *Gouvernement der Molukken*, dan sejak itu pula muncul kebiasaan untuk menggunakan istilah Maluku bagi seluruh kepulauan antara Sulawesi dan Irian Jaya. Ketiga bagian dari masa VOC itu lalu dijadikan *residentie*, masing-masing dengan seorang residen yang berkedudukan di Ternate, Ambon dan Banda. (Leirissa, 1971).

Sejalan dengan perkembangan administratif itu, penduduk yang mendiami kepulauan antara Sulawesi dan Irian Jaya mulai dinamakan orang Maluku (*Molukkers*), sekalipun sesungguhnya dari segi budaya terdapat perbedaan yang cukup besar antara ketiga wilayah tersebut. Kemudian orang juga mulai menggunakan istilah *orang Ambon (Ambonezen)* untuk penduduk di Maluku Tengah. Dalam hal pada mulanya istilah itu hanya digunakan untuk penduduk kota Ambon saja yang memiliki budaya *meztizo*. (Ludeking, 1868).

Dalam perkembangan sejarah (terutama dalam abad ke-20) istilah *Ambon* mengacu penduduk Maluku Tengah. Sekalipun demikian, istilah itu tidak mengacu pada satu sistem budaya yang utuh, karena terdapat cukup banyak perbedaan, pertama-tama antara penduduk yang beragama Kristen dan yang beragama Islam, penduduk pesisir dan pedalaman (terutama di pulau Seram), penduduk di pulau-pulau utama Maluku Tengah (Ambon, Haruku dan Nusalaut) dan pulau-pulau di sekitarnya, dsb.

Asal-usul atau etimologi dari istilah Ambon tidak mudah ditentukan. Salah satu keterangan yang umum diberikan penduduk wilayah itu adalah bahwa istilah itu berasal dari kata *ombong*, suatu bentukan lokal dari kata embun. Keadaan cuaca pulau Ambon memang membantu ke arah itu. Pada saat-saat tertentu puncak-puncak gunung-gunung di pulau itu ditutupi embun yang tebal sehingga kota Ambon praktis tertutup atau gelap. Di masa kini keadaan itu sering bisa mengganggu lalu-lintas udara sehingga kadang-kadang pesawat udara tidak bisa mendarat dan terpaksa melanjutkan penerbangan ke Irian Jaya.

Benteng VOC di Ambon dibangun oleh pihak Portugis pada tahun 1571 (Jacobs, 1975), dan direbut oleh badan dagang Belanda itu pada tahun 1605 dan dinamakan *Casteel Victoria*. Tetapi ketika itu tempat itu lebih dikenal oleh penduduk dengan nama *Kota Laha* (laha = pelabuhan). Kini istilah *laha* masih melekat pada sebuah negeri yang berbatasan dengan Bandar Udara Pattimura.

Sejak tahun 1950 Pemerintah Republik Indonesia memperkenalkan istilah Maluku Tengah, untuk membedakan kabupaten tersebut dengan kabupaten Maluku Utara (sekarang dibagi menjadi dua kabupaten, yaitu kabupaten Maluku Utara yang berpusat di Ternate, dan Halmahera Tengah yang berpusat di Tidore) dan kabupaten Maluku Tenggara. Istilah yang digunakan dalam masa penjajahan, yaitu Maluku Selatan (*Zuid Molukken*), tidak digunakan dalam masa RI. Pertama-tama karena istilah itu terkait dengan sebutan *RMS*, dan kedua (alasan yang lebih penting) karena wilayah itu telah dibagi pula menjadi dua kabupaten pula yaitu kabupaten Maluku Tengah dan kabupaten Maluku Tenggara.

Dengan demikian istilah Maluku Tengah sesungguhnya mengacu pada suatu sistem geo-politik dalam tatanan Republik Indonesia. Istilah Ambon mengacu pada sistem (atau sistem-sistem) budaya yang terdapat di wilayah itu. Sekalipun demikian, kesatuan wilayah itu tidak saja disebabkan kesatuan politis tersebut karena, walaupun bersifat multikultural, terdapat pula faktor-faktor integratif lainnya yang tidak kurang penting.

4.1 Geografi dan Ekonomi

Pulau-pulau utama di Maluku Tengah adalah Ambon, dan kepulauan Uliase di sebelah timurnya yang terdiri atas Haruku, Saparua dan Nusalaut. Keistimewaan pulau-pulau tersebut adalah karena ciri-ciri demografi dan ekonominya. Hal ini berbeda dengan Maluku Utara, dimana pulau-pulau utamanya (Ternate, Tidore dan Bacan) justru menjadi lebih penting

karena ciri-ciri politiknya (sebagai pusat-pusat kerajaan), sedangkan wilayah sekitarnya memiliki arti demografi dan ekonomi yang lebih penting.

Pulau-pulau lainnya tidak penting di masa VOC, yaitu pulau Seram dengan kepulauan Gorong dan Seram laut di timurnya, pulau-pulau kecil lainnya di sebelah baratnya, serta pulau Buru. Pulau-pulau ini selalu diawasi melalui Hongi yang dikerahkan sewaktu-waktu, untuk mencegah terjadinya penyelundupan cengkeh dari pulau-pulau inti tersebut.

Kepulauan Ambon dan Uliase (sering juga disebut Lease) menjadi penting karena sejak pertengahan abad ke-17 oleh VOC dijadikan wilayah monopoli produksi cengkeh yang dipindahkan dari Maluku Utara. Sejak itu hingga tahun 1862 kepulauan Ambon dan Uliase menjadi satu-satunya produsen cengkeh bagi Belanda, sedangkan wilayah asli cengkeh di Maluku Utara menjadi daerah larangan produksi cengkeh. Monopoli produksi pala dibangun oleh VOC di kepulauan Banda. (Hanna, 1983). Perpindahan dari Maluku Utara ke Maluku Tengah itu berlangsung melalui suatu peperangan yang cukup lama (berselang-seling masa damai sepanjang 50 tahun dari 1600 hingga 1650). Kejadian ini dicatat oleh seorang pejabat VOC, Arnold de Vlaming van Oudshoorn, yang dari tahun 1647 hingga tahun 1650 menjabat sebagai *Gouverneur van Ambon*, tetapi hingga tahun 1661 masih berada di wilayah itu untuk mengawasi jalannya peperangan, dibukukan sebagai *Ambonsche Oorlogen* (Perang Ambon). Selain itu G.E. Rumphius, seorang pegawai VOC yang berkedudukan di Hila dan banyak berjasa bagi perkembangan ilmu pengetahuan, juga membukukannya dalam *Ambonsche Historie-nya*. (Rumphius, 1910).

Dalam masa VOC yang berlangsung sekitar dua abad itu terbentuklah suatu masyarakat perkebunan cengkeh yang khas di Maluku Tengah. (Knaap, 1997). Sistem pemukiman (*negeri*) dan pemilikan tanah direkayasa demi kelangsungan sistem perkebunan itu. Struktur negeri ditata sedemikian rupa sehingga penduduk dapat dikerahkan dengan efisien untuk kepentingan perkebunan dan kepentingan pengerahan tenaga

lainnya. Sistem pemerintahan negeri juga disesuaikan sedemikian rupa sehingga antara elite negeri dan pimpinan VOC terdapat ikatan politik yang kuat.

Status pemimpin negeri ditentukan sesuai keberhasilan negeri yang bersangkutan dalam soal produksi cengkeh dan kewajiban-kewajiban lainnya. Gelar-gelar yang diberikan oleh VOC kepada para pemimpin negeri tersebut menggambarkan keadaan itu. *Orang kaya* adalah gelar yang terendah yang diberikan kepada seorang pemimpin negeri yang baru diangkat oleh masyarakat yang bersangkutan (dengan surat keputusan dari VOC). Bila yang bersangkutan berjasa, maka gelarnya dinaikkan menjadi *Pati*, dan kemudian bisa meningkat lagi sehingga menjadi *Raja*.

Pada setiap gelar melekat pula atribut-atribut lainnya. Seorang *Orangkaya* diberi tongkat yang terbuat dari rotan, *Pati* mendapat tongkat rotan dengan kepala perak yang diukir dengan lambang VOC; dan *Raja* mendapat tongkat rotan berkepala emas dengan ukiran lambang VOC pula. Payung dan umbul-umbul untuk dipakai di perahu juga menggunakan warna-warna yang berbeda yang menunjuk pada status pemimpin yang bersangkutan.

Pengaruh VOC atas masyarakat kepulauan Ambon dan Uliase dengan demikian jauh lebih intensif dibandingkan dengan di pulau-pulau Seram dan Buru. Beberapa negeri di kepulauan Ambon dan Lease berkembang menjadi pusat-pusat kekuasaan VOC karena menjadi tempat kedudukan seorang residen (kemudian di masa Hindia Belanda menjadi kontrolir), yang berkedudukan dalam sebuah benteng (fort) yang dilengkapi tentaranya. Selain kota Ambon dengan benteng Victoria yang menjadi pusat seluruh wilayah Maluku Tengah itu, muncul pula kota-kota yang jauh lebih kecil karena posisinya sebagai pusat kekuasaan VOC di daerah-daerah. Pusat-pusat kekuasaan itu sesungguhnya terdapat dalam benteng-benteng kecil yang terletak di sekitar negeri-negeri tertentu, seperti benteng Duurstede di Saparua yang menjadi pusat kepulauan Uliase (Haruku, Saparua dan Nusalaut),

termasuk Seram Barat (Seram Timur termasuk gouvernement Banda); dan benteng Amsterdam di Hila yang menjadi pusat wilayah jazirah Hitu (di pulau Ambon) dan jazirah Hoamoal (di pulau Seram). Di pulau-pulau lain di Uliase yang menghasilkan cengkeh juga terdapat benteng yang lebih kecil lagi (*redout*), seperti di Haruku (pulau Haruku) dan di Amet (pulau Nusalaut). Di Hoamoal, Buru dan Seram Utara terdapat pula benteng-benteng kecil sebagai warisan dari masa Perang Ambon (wilayah-wilayah itu tidak dibenarkan memproduksi cengkeh).

Negeri-negeri yang dilengkapi perbentengan itu kemudian berkembang sejak abad ke-19 (masa Hindia Belanda) menjadi pusat-pusat administrasi pemerintahan, dan kini meneruskan tradisi itu sebagai kota-kota kecamatan.

Dengan sendirinya negeri-negeri di pulau Seram dan pulau Buru yang tidak diizinkan memproduksi cengkeh memiliki struktur sosial yang terbelakang dibandingkan di kepulauan Ambon dan Uliase. Status pemimpin negeri pun sangat jarang bisa melampaui pejabat yang bergelar *Pati*. (Van Fraassen, 1972).

Berbeda dengan di Maluku Utara, pulau-pulau inti tersebut tidak memiliki kedudukan dominan dalam soal politik atas pulau-pulau di sekitarnya itu. Hubungan politik pulau-pulau Seram dan Buru, seperti halnya dengan kepulauan Ambon dan Uliase, hanya terkait dengan birokrasi Belanda yang berkedudukan di kota Ambon dan Hila (di pulau Ambon) dan Saparua. Persamaannya dengan Maluku Utara adalah larangan memproduksi cengkeh. Kepentingan VOC di sini, seperti juga di Maluku Utara, adalah mencegah perdagangan rempah-rempah itu, yang dilakukan (juga sama dengan di Maluku Utara) dengan mengerahkan Hongi setiap saat diperlukan. Dengan demikian, baik dari segi politik, ekonomi, maupun budaya, kepulauan Seram dan Buru adalah periferi dari kepulauan Ambon dan Uliase.

Maka tidaklah mengherankan kalau wilayah pedalaman pulau Seram dan pulau Buru tidak terdapat tanda-tanda adanya pengaruh VOC. Hindia Belanda pun baru masuk di kedua pulau itu setelah pertengahan abad ke-19. Masyarakat dan budaya wilayah pedalaman itu, dengan demikian, berbeda dengan penduduk pada masyarakat budaya pesisiran, terutama di pulau-pulau inti tersebut. Seperti halnya di Maluku Utara, masyarakat dan budaya pedalaman itu oleh masyarakat pesisiran (dan Belanda) dinamakan *alifuru*.

Sistem budaya dari masyarakat *alifuru*, seperti halnya masyarakat *halefuru* di Maluku Utara, sangat berbeda dengan negeri-negeri pesisir tersebut. Perbedaan itu terutama terletak pada agama dan bahasa. Di negeri-negeri pesisir berkembang agama Islam maupun agama Kristen, sedangkan di pedalaman terdapat berbagai macam bahasa suku (yang disebut sebagai bahasa-bahasa Nunusaku) dan agama suku. Baru sejak pertengahan abad ke-19 ada upaya untuk mengintegrasikan suku-suku pedalaman tersebut dengan pola bahasa dan budaya pesisiran. (de Vries, 1927; Tauern, 1918; Sachse, 1907).

Keadaan politik yang khas di Maluku Tengah itulah yang tidak memungkinkan timbulnya suatu pergolakan sosial yang berlangsung lama seperti di Maluku Utara (Nuku dan Raja Jailolo). Selain tidak mengenal sistem pemerintahan kerajaan dengan berbagai konsentrasi kekuasaan seperti di Maluku Utara, penduduk di wilayah perbatasan seperti di Seram dan Buru tidak memungkinkan pengembangan motivasi yang menjurus pada pergerakan sosial semacam itu.

Namun demikian, tidaklah berarti bahwa masyarakat pedalaman tidak menjadi permasalahan politik bagi VOC dan kemudian Hindia Belanda. Khususnya di Seram Barat terdapat sebuah lembaga budaya yang dinamakan *kakehan* yang hanya terdapat di Seram Barat. Arti kata itu sendiri tidak jelas, namun maksudnya dapat dipahami dari kegiatan anggota-anggotanya yang terekam dalam dokumen-dokumen Belanda hingga akhir abad ke-19. Intinya adalah suatu ritus yang harus dijalani para pemuda agar bisa diterima sebagai anggota

masyarakat yang bertanggung-jawab. (Dyuvendak, 1926, *loc.cit.*; Knaap, 1993, *loc.cit.*). Menurut pendapat saya, ritus kakehan adalah mekanisme seleksi pimpinan dalam masyarakat primitif di Seram Barat.

Anggota-anggota yang telah mengikuti ritus *kakehan* itu ditandai dengan *tatoo* di dadanya. Simbol-simbol yang di *tatoo* itu pun tidak jelas, namun nampaknya pemuda yang terseleksi sebagai pemimpin mendapat *tatoo* yang lebih banyak. Perang di antara berbagai klan pedalaman di Seram Barat itu, agaknya merupakan salah satu dorongan ke arah terbentuknya sistem seleksi itu.

Sudah sejak abad ke-17 Belanda mencatat adanya suatu pembagian atau pengelompokan dalam masyarakat Seram Barat itu menjadi tiga bagian besar (Knaap, 1993; Duyvendak, 1926; Deacon, 1925; Van Ekris, 1867) dengan mengambil aliran sungai besar sebagai patokannya. Di sebelah barat dari Seram Barat terbentuk pengelompokan Eti sesuai dengan nama sungai yang mengalir di wilayah itu; di sebelah timurnya terdapat saniri pengelompokan Tala menurut nama sungai pula, di utaranya terdapat pengelompokan Sopalewa (nama sungai lagi).

Ketiga kelompok besar itu memiliki persamaan karena anggota-anggota prianya di *tatoo* sesuai dengan ritus *kakehan*. Sebab itu kesatuan dari ketiga kelompok itu dinamakan masyarakat *Waele Telu* (tiga sungai), atau dalam bahasa Melayu *Tiga Batang Air*. Dari waktu ke waktu anggota-anggota *Waele Telu* berkumpul di suatu tempat untuk menyelesaikan pertikaian mereka secara musyawarah. Tempat musyawarah (saniri) ditentukan bersama, di salah satu pengelompokan tersebut. Organisasi saniri tersebut semata-mata bersifat sakral seperti halnya upacara *kakehan*. Tokoh utama adalah apa yang dinamakan Ina-ama (Ina = wanita, ama = pria) yang merupakan pimpinan spiritual tertinggi yang terdapat dalam setiap pengelompokan. Untuk mengurus pelaksanaan saniri Tiga Batang Air terdapat petugas-petugas yang menghubungi

setiap pengelompokan, yaitu yang dalam bahasa Melayu dinamakan *Tiang Bendera* dan *Ujung Bendera*. (Duyvendak, 1926, loc.cit.).

Pengumpulan ratusan orang di tempat saniri memerlukan waktu berbulan-bulan, sehingga masalah *logistik* merupakan lembaga adat tersendiri pula bahkan ada tempat-tempat tertentu yang dinyatakan milik bersama Tiga Batang Air untuk dijadikan tempat saniri. Musyawarah berlangsung di tempat yang ditandai oleh dua batang pohon yang dibaringkan sejajar. Di ujung-ujungnya duduk para petugas saniri yang dinamakan *Tiang Bendera* dan *Ujung Bendera*. Para petugas itu mempersilahkan mereka yang ingin mengemukakan pendapatnya untuk berdiri di tengah-tengah kedua batang pohon itu dan berbicara. Keputusan diambil secara aklamasi, dan pihak-pihak yang bersalah dikenakan denda berupa sejumlah gong perunggu. (Duyvendak, 1926, loc.cit.).

Lembaga *Saniri Tiga Batang Air* bertahan hingga akhir abad ke-19. (Knaap, 1993, loc.cit.). Sebabnya terutama karena intervensi Belanda melalui senjata dengan maksud mengakhiri perang-perang suku yang disertai pengayuan itu.

Tidak dapat dikatakan dengan pasti apakah lembaga saniri seperti yang diselenggarakan masyarakat Waele Telu yang dibakukan melalui upacara *kakehan* itu terdapat juga di wilayah-wilayah lainnya di Maluku tengah. Ada tanda-tanda bahwa institusi semacam itu memang pernah ada. Pertama-tama istilah saniri masih tetap digunakan di negeri-negeri di Maluku Tengah pada umumnya untuk menyebut musyawarah penduduk negeri. Selain itu, penelitian kebahasaan yang akan dikemukakan dalam bagian di bawah ini menunjuk pada kenyataan, bahwa di negeri-negeri Maluku Tengah tersebut pernah digunakan pula sistem kebahasaan yang masih terdapat di kalangan alifuru (di sini dinamakan bahasa-bahasa proto Maluku Tengah yang merupakan cabang dari bahasa-bahasa proto-Austronesia). Sebab itu tidak mengherankan bila sejak awal abad ke-20 budaya *alifuru* menjadi salah satu sumber inspirasi masyarakat pesisir di Maluku Tengah yang nampaknya telah dilanda oleh proses modernisasi yang berawal di

pertengahan abad ke-17. Mengenai hal ini akan dikemukakan dalam bagian akhir bab ini.

Lenyapnya lembaga saniri Waele Telu dan kakehan terutama disebabkan karena sistem budaya tersebut tidak didukung oleh suatu sistem politik yang kuat. Kekuasaan Belanda yang menjalar ke pulau Seram sejak abad ke-17, akhirnya berhasil mematahkan institusi yang semata-mata berdasarkan lembaga ritual itu saja dan tidak dilengkapi dengan aparat pemerintahan seperti administrasi dan tentara yang tetap. (Manuhutu, 1985).

Sekalipun proses perkembangan sosial di Maluku Tengah tidak melahirkan sistem politik yang dinamakan kerajaan atau kesultanan seperti halnya di Maluku Utara, namun tidak berarti bahwa hal itu samasekali tidak pernah terjadi di masa lalu. Proses itu pernah muncul sejak paling kurang abad ke-15 di jazirah Hitu (pulau Ambon) yang penduduknya beragama Islam. Khususnya negeri Hitu pernah memperlihatkan dengan jelas adanya proses itu. Hal ini terutama berkaitan dengan kenyataan, bahwa negeri Hitu merupakan salah satu mata-rantai dalam pelayaran-niaga di Nusantara yang menghubungkan daerah-daerah cengkeh di Maluku Utara dan pulau Jawa.

Sistem politik di Hitu tersebut memiliki pola dasar yang sama dengan di Maluku Utara, yaitu pembagian dalam empat bagian. Negeri Hitu menjadi pusat kekuasaan dengan empat penguasa yang disebut *Perdana*, masing-masing dari satu garis keturunan yang menjadi cikal-bakal dari negeri Hitu. Keempat Perdana tersebut adalah Tanahitumeseng, Nustapi, Totohatu, dan Pati Tuban. Di antara empat perdana tersebut salah satunya, yaitu Tanahitumeseng, merupakan *primus interparis* yang sering juga oleh orang-orang Barat dinamakan *Raja Hitu*. (Manusama, 1977). Unsur kelima (Raja Hitu) merupakan pemersatu yang mewujudkan keutuhan masyarakat atau *soasiwa*, seperti yang terdapat pula di Tidore. (Leirissa, 1996).

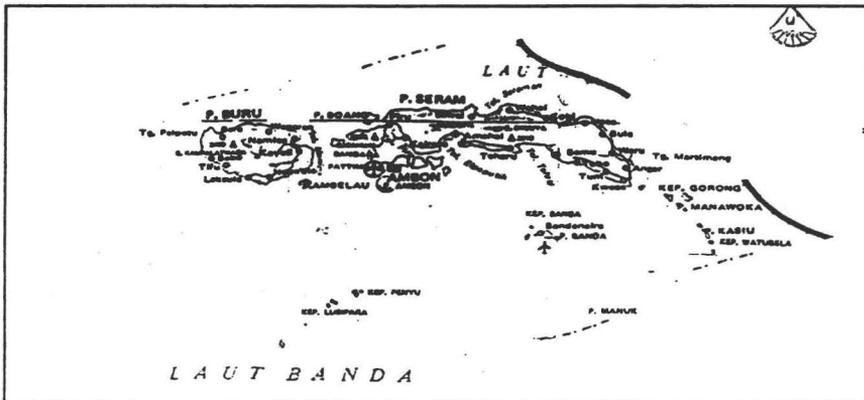
Sistem pemerintahan ini mengingatkan kita pada apa yang dinamakan sistem federasi yang menurut Reid sangat umum

terdapat di Indonesia Timur. (Reid, 1993, II, 213-214). Lambang-lambang kekuasaan seperti payung, warna-warna, tanah, dll terdapat pula disini. Setiap *perdana* dilengkapi dengan sebuah payung dengan warna tertentu (hitam, merah, kuning, biru). Hanya tokoh yang mewujudkan Raja Hitu (Perdana Tanahitumeseng) dibenarkan menggunakan empat payung dengan keempat warna tersebut. (Manusama, 1977, *loc.cit.*).

Pemukiman-pemukiman dalam jangkauan kekuasaan Empat Perdana tersebut (sekitar 30 buah) dibagi dalam 7 buah *uli*, sehingga melahirkan istilah *hitu* (= tujuh). Ketujuh *uli* tersebut adalah : (1) Solemata, (2) Sailessy, (3) Halawan, (4) Sawani, (5) Hatunuku, (6) Ala, dan (7) Nauhenalehu. (Lestalu, 1988 : 35). Negeri Hitu yang menjadi pusat pemerintahan itu tercakup dalam Uli Halawan atau uli emas.

Sistem pemerintahan ini mengalami kemunduran dalam pertengahan abad ke-17. Dalam rangka *Perang Ambon* proses pertumbuhan politik itu dipatahkan oleh VOC yang nampaknya merasa khawatir akan munculnya suatu kekuasaan tandingan yang bisa membahayakan politik monopoli cengkeh mereka di Maluku Tengah. (Rumphius, 1910). Namun demikian hingga abad-abad ke-20 kedudukan istimewa yang pernah dimiliki negeri Hitu itu masih tetap terukir dalam tradisi lisan penduduk setempat. (Von Benda-Beckmann, 1987).

PETA GEOGRAFI MALUKU TENGAH



4.2 Bahasa-bahasa Lokal dan Kapata

Seperti telah dikemukakan di dalam bab III, bahasa-bahasa di Maluku Tengah termasuk dalam rumpun bahasa-bahasa Austronesia, seperti halnya di seluruh Nusantara. Namun demikian, bahasa-bahasa lokal tersebut kini hanya terdapat di kalangan penduduk Islam saja, serta penduduk Seram atau Buru. Beberapa negeri Kristen di Ambon dan Uliase juga masih menggunakannya secara insidental, khususnya dalam hal upacara *panas pela*. Di samping itu digunakan pula bahasa Melayu yang juga termasuk bahasa-bahasa Austronesia. Dalam bagian ini akan dibahas bahasa-bahasa lokal saja, sedangkan bahasa Melayu akan dibahas dalam bagian berikut.

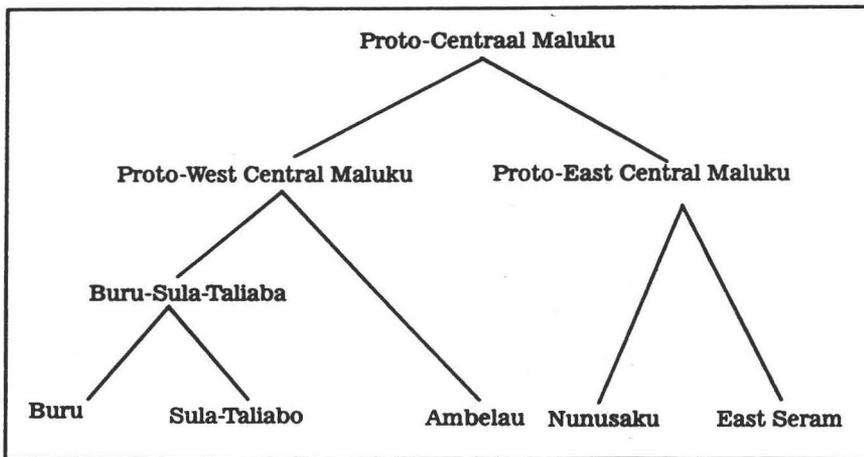
Demikian *anehnya* bahasa-bahasa lokal di Maluku Tengah sehingga para ahli linguistik yang mempelajarinya menyebutnya sebagai bahasa-bahasa *Proto-Austronesia*. Sudah sejak awal abad ke-19 sejumlah orang Belanda berusaha memahami bahasa-bahasa itu, seperti umpamanya Van Ekris (1864-1865), Van Hoevell (1877), dll. Sejumlah ahli linguistik juga mencoba mempelajarinya dalam rangka penyusunan suatu klasifikasi umum mengenai bahasa-bahasa *Proto-Austronesia* itu, tetapi yang khusus mempelajari bahasa-bahasa itu di Maluku Tengah adalah Streseman (1927) dan Collins (1983).

Pada umumnya para ahli bahasa tersebut sepakat bahwa bahasa-bahasa lokal di Maluku Tengah memang termasuk bahasa-bahasa *Proto-Austronesia*. Malah salah seorang di antaranya menamakan bahasa-bahasa itu sebagai sub-kelompok *Maluku Tengah*. Penamaan itu diikuti pula oleh Collins yang mencoba melengkapi hasil penelitian Streseman sebelumnya.

Penelitian mengenai bahasa-bahasa lokal di Maluku Tengah tersebut memang belum tuntas. Berbagai peneliti memiliki kriteria sendiri, dan dengan demikian mengemukakan aspek-aspek tertentu pula dari bahasa-bahasa itu. Penelitian Collins, umpamanya hanya berdasarkan aturan bunyi (*Phonology*) dari bahasa-bahasa tersebut, namun klasifikasinya adalah yang paling lengkap sampai saat ini. (Collins, 1983).

Collins mengemukakan bahwa bahasa-bahasa *Proto-Austronesia* di Maluku Tengah yang dinamakannya *Proto Maluku Tengah* itu terbagi dalam dua bagian besar, yaitu bagian barat dan bagian timur. Dalam bagian barat termasuk bahasa-bahasa yang digunakan penduduk di pulau Buru dan pulau Ambalau; sedangkan bagian timur adalah bahasa-bahasa yang digunakan di pulau Seram, Ambon, Haruku, Saparua dan Nusalaut. (Collins, 1983: 20-22).

PETA BAHASA LOKAL MENURUT COLLINS



Sumber : Collins, 1983 : 20

Selain sebagai alat komunikasi dalam desa-desa yang penduduknya berbahasa lokal tersebut, bahasa-bahasa lokal itu mengandung nilai historis pula. Sebagian besar dari peristiwa-peristiwa sejarah yang dialami penduduk Maluku Tengah diungkapkan dalam bentuk syair yang menggunakan bahasa-bahasa lokal itu. Dua jenis sajak yang paling dikenal adalah *kapata* dan *lania*. Kalau *kapata* lebih banyak menonjolkan peristiwa perang, maka *lania* lebih banyak menyangkut soal-soal yang menyedihkan seperti pengkhianatan dan lain-lain.

Sejumlah pegawai Zending, seperti van Hoevell (van Hoevell, 1882) pernah mencoba mencatat beberapa *kapata* yang sempat mereka dengar. Demikian pun Perpustakaan Nasional di Jakarta menyimpan beberapa catatan mengenai *kapata*. (Katalog, 1980).

Namun hingga kini rupanya berbagai peristiwa di masa lalu masih tercatat dalam tradisi lisan dalam bentuk *kapata dan lania*. Berikut ini akan dikemukakan dua buah syair seperti yang dicatat oleh Dra. H. Maryam Lestaluhu (1988). *Kapata-kapata* ini menyangkut peristiwa di abad ke-17 yang termasuk dalam apa yang dinamakan *Perang Ambon* tersebut di atas. Apakah bentuk aslinya di abad-abad yang lalu sama dengan yang dicatat sekarang memang tidak bisa dipastikan. Pentingnya kutipan-kutipan ini hanyalah untuk menunjukkan, bahwa penduduk Maluku Tengah memiliki semacam *kesadaran sejarah* yang terwujud dalam *kapata*.

Kutipan pertama adalah sebuah *kapata* yang menceritakan sebuah episode dalam Perang Wawani (1633-1643), khususnya yang menyangkut serangan VOC atas perbentengan Hitu di Gunung Kapahaha (kini nama Kapahaha diabadikan sebagai nama Makam Pahlawan di Ambon). (Rumphius, loc.cit, 1910; Knaap, 1992). *Kapata* ini menggunakan bahasa Morela di Hitu, dan dicatat pada tahun 1978 dalam sebuah penelitian di Kapahaha. (Lestaluhu, 1988: 176, 178).

Kapalau kanama haita sawatelu,
Kota nyiwele sele
Kompanyia si kolo ia sialeha Kapahaha,
Kolo lete Kapahaha nala hulane siwa
Hiti maeneha lowa sue lainuli,
Lihi julata syanaki loloosi
Lisa e makana tapane lauhaha,
Lisa e makana sawatelu lauhaha
Lisa e makana Nandaluhu lauhaha,
Kutu kaite jow tumbanbessy
Hulu eliyate pory
Yata pory eituru nusu meita
Turu nusu meita lia nandaluhu
Yane sula eya, sula eya pela

Lihī tikane tikane tikanesi lawa lowa
Tikane lawalowa kimula molo-molo
Minat tara holo lia Nandaluhu
Nima sahureya luasasena
Manu rihupasa tihupasa sama
Manu rihupasa tihupasa sama
Nala puti hee hale pajare hee lia
Lumainasi waa liya lataela
Lumainasi waa elya lataenu
Lumainasi waa liya ialauli
Liya laulli makakika lawalewa
Heha Leusi mai heha mai
Hiti hinio utatapa ombolo
Luasi kala lutusi manu jambela
Nunu jambela seli eka pale mahu
Hata jambela seli eka karanulu
Huwa jambela seli eka lopoleti

Terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut :

Kapal-kapal telah berlabuh di teluk Sawatelu
Di sana terdapat deretan pohon nyiur
Kompeni berada di Sawatelu untuk mengalahkan
Kaphaha
Di sana ia menunggu sembilan bulan
Diperintahkan kurir mendaki ke Kaphaha
dari tepi pantai mengikuti jalan terjal
Di teluk Tapan serta labuhan Sawatelu dan Nandaluhu
ada pertahanan VOC dengan armada yang sangat kuat
Kemarahan-kemarahan datang dari Tulukabessy
terhadap Yatapori yang turun menimba air di Nandaluhu
karena dia telah ditipu dengan sekantong beras
sebagai penunjuk jalan tanpa diketahui
sehingga VOC mendaki mengikuti jejaknya
Di tengah malam mereka mengepung Kaphaha
Bunyi tembakan bertubi-tubi
Gemparlah penduduk Kaphaha
Pertempuran berlangsung hingga fajar menyingsing
Sebagian penduduk menyelamatkan diri ke Lataela
sebagian lagi ke Lataenu
Mereka yang berada di Jalauli sebagainya pulang
Penduduk yang cerai-berai sebaiknya kembali
untuk berkumpul lagi.

Kutipan kedua berasal dari pulau Haruku dan merupakan sebuah lania yang berkaitan dengan munculnya agama Kristen di pulau itu semasa Perang Alaka yang diperkirakan berlangsung dalam tahun-tahun 1625 hingga 1637. Kutipan ini berasal dari hasil wawancara H.A.B. Sangaji, seperti dikutip oleh Dra. H. Lestaluhu (1988: 182-186, 200).

Apa nene, youwa sui
Waa looka yama Rima Lounussa
Nunu lau malaka
lau mau noo Loto Yasa i Lounussa
Sana isa ekita lei Timuro
Upu Latua Makakuku
Sana isa ekoti lea matai
Pikai hehe Laisina
Siiria u pasiri - sana eru pasana heu
Karia sina Surinai
Karia sina Surinai Ratua
Male irowa Lounussa
Male irowa Lounussa Yasalo
sala awwale jadi
Makakuku ihusa hale haita Pessy
Jikiro e kakura jawe
Nai kela Kakisame waelo
kurang ei waa salo
Karia sina i husa haita Humiase
i husa kura ayate
Kela ei wae Taniha Panano
Kana pasa sala i
Surinai ihusaa hale haita Seirambi
i husa kura salawate
I roha wa elo sanama isai
meito sanama rua
Rone sina ihusa haita nama latu
i husa kura takabiri
Kela i marikee wailo
kuru u wape, tohuwu u rila
Laisina i husa hoho haita Rakanyawa
i husa kura nahase
I rowai yamana mapututi
loko, tahia mala loko
Sou se elai, Upu Latua Ronessina

tai mangaku Nasarane
Suratu u ralai waa
Monia Makakuku, tai mangaku Nasarane
Sou miri marua waa Pikai hehe
Laisina i mangaku Nasarane
Turu au wasa sala Tualaisina
Rima i hoho e peki uwa
ia ei yoi naimingguwa
wara huwani - nawaina sala latu
Pusu rasatalea yurui silato
I saka eni sapu ratu
Kehe ei ma uri heri haasi
Ni sahadate maheri
Rone sina - Makakuku Monia
sala pari ase - Mara Wakan
Ratu Ruri Rusun - kura Monia
Makakuku - Mara hua wai
Pinano - Kura Laisina
si supu alamana - Lounussa Yasalo
Hatua Hahai taha isi tewa
Isi salawai muria
Nasi nahu ire sane
Isi sature Laisina
Loko - taha - mala - loko
I kuru kurai kahani
I kuru heri hatama larira loto Lounussa
I kalalati wai Tanusa
I Rawa wai e Matasiri Yasalo
loko - taha malaloko
I kita ei amano mapututi
Loko - taha - malaloko
Pasu rasa talea uru silato
kara ele Lounussa
Karu ele Lounussa yasalo
Waa ni waa rua, Ronesina Makakuku
Loto isi sa ia ele,
Loto isi sa ia ele
wa a ehe isi bujia ru maheeri
Kuwa muri, Matasiri Yasalo
Tani te Pauna rua
Isi rei Marikee
I pasa sahu e Wailapia
Ia ei pala laue maai-maai

I rena laina i hahiku sohura
 I husa hoho haita Rakanyawa
 I husa hoko Rakanyawa haita
 I rowo loto Haturesi
 I rowa loto Haturesi Yasalo
 Rulu mata waina ruwa
 Tiha si amanue Rumasinggi Nambuasa
 Tani teus si aelee
 Teus isi aelee waa hoho Haturesi
 Rulu mata waina rua
 Awa wai e surate padoana ru molo
 Taru hatua - Naru molo - taru hatua
 Waa iana - waa meito e pama miri
 Kuru hoho Hatu malaka
 Rimba waela mala pone
 Kuru hale wae uta tulano
 Rimba waela maarita
 Hoho si a olo si gareja Teuso
 Ia ei pala e Poruta Hariaa
 Seru eni Tiha meelee
 La e muria u waloko ei
 Kurang ei waa salo

Terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut :

Dengarlah kisahku, kisah untuk kita sekalian
 dari lima negeri sepulau pohon beringin jenis Malaka
 Beringin yang berdaun kecil
 itulah umpama bagi kita kelima negeri Lounussa
 Satu dahannya mengarah ke barat,
 itulah umpama Latua Ronesina [raja Pulau]
 Yang satu dahan mengarah ke timur
 itulah umpama Monia Makakuku [raja Ruhomoni]
 Dahan yang satu arahnya menentang jalannya matahari
 itu seumpama Pikai Hehe Laisina [raja Hulaliu]
 Beringin bertunas pula dahannya
 itulah umpama Karia Sina Surinai [raja Kabau dan raja
 Kailolo]
 Karia Sina Surinai, raja!
 mari kita mendaki ke Lounussa
 Mari kita mendaki ke kelompok negeri Lounussa
 sesuai ciptaan Allah sejak semula
 Makakuku muncul di pelabuhan Pessy [Ruhomoni]

Dengan bacaan zikir dan nyanyian pujaan
Ia lalu menyusun air Kakisame
Apakah kekurangan yang dijumpainya?
Kakiasina [raja Kabau] muncul di sana
di pelabuhan Huniase
Ia muncul sambil membaca ayat-ayat
Ia telah mendarat melalui Wai Tahina
gerakannya lonjak dan dinamis
Surinai [raja Kailolo] muncul di sana di labuhan Seirambi
[Kailolo]
Ia muncul dengan bersalawat
Didapatnya air tawar hanya sepertiga
sedang air laut dipergunakannya dua per tiga
Rone Sina [raja Pelau] muncul di labuhan Namalatu
[Pelau]
Ia muncul sambil bertakbir
Ia menyusur sungai Marike ke udik
Di sana pisang sama pala masak
sementara batang-batang tebu sampai melengkung
Laisina [raja Hulaliu] muncul di labuhan Rakanyawa
[Hulaliu]
Ia muncul membawa naas (celaka)
Didakinya negeri-negeri tandus gersang
sedih, sungguh sedih
Pernah utusan datang menjumpai Latua Ronesina [raja
Pelau]
Tetapi ia tidak bersedia menjadi Nasrani
Hanya bujuk dan tipu muslihat
datang kepada Pikai Hehe Laisina [raja Hulaliu]
dan ia telah mengaku menjadi Nasrani
Lalu, kupersalahkan dia Tua Laisina [raja Hulaliu]
Tangannya telah menjabat tongkat kekuasaan
untuk pergi menuju gereja
Lenggang lagaknya sebagai penguasa
Gugur sudah mahkota keislamannya
Dipasang di kepalanya topi raja-raja
Ia telah terguling tinggalkan empat raja
Kalimah Syahadahnya telah lenyap
Raja Pelau - Raja Ruhomoni
pernah mendapat kesempatan berbincang-bincang
perbincangan yang berlangsung di negeri Lounussa
tanpa diketahui penduduk Hatuaha
Mereka bertolak belakang

Telah gugur seorang di antara mereka
Mereka turunkan Laisina
sedih sungguh sedih
Ia turun sambil meratap
Ia turun tinggalkan Khatam sunah-sunah
terbengkalai di Lounussa
Dilampauinya Wai Tanussa
Dihindarinya negeri Matasira
sedih, sungguh sedih
Gugurlah destar tanda sembahyang dari kepalanya
Dititipnya di Lounussa kepada kedua abangnya
raja Pelau dan raja Ruhomoni
Destar itu ada mereka simpan
agar tidak seluruh pujaannya lenyap
Ia membelakangi negeri Matasiri
Ratap meliputi keduanya [Kabau dan Kailolo]
Mereka berjalan menyeberang sungai Marikia
dan melintasi sungai Waipia
Kiranya ia sadar baik-baik
Jalannya menyusur pantai menjelajah pecahan ombak
Ia muncul di labuhan Rakanyawa [Hulaliu]
Kemudian mendaki ke Haturesi
Mendaki negeri Haturesi
dengan gugur air mata keduanya
Telah dicampakkannya hanyut mesjid asalnya
mesjid Mambuasa
Dibangunnya gereja Theos untuk Haturesi
Gugur air matanya
Sungguh sia-sia suratan-suratan dan doa-doa
Ibarat batu-batu yang telah tenggelam
Tenggelam dalam simpanan
Hanya tinggal sebagai pujaan bagi ikan-ikan lautan
Mereka turun ke Hatumalata
Menimba air memang sukar
Kalau mereka menuju Wai Uta Tulano
pun menimba air yang serba kering
Mereka telah mendirikan gereja Theos
Untuk mengajak orang Portho dan Haria
Lonceng gereja itu sebagai pengganti beduk mesjidnya
Pada akhirnya aku kasihani dia
Kucari apa kekurangannya!

4.3 Bahasa Melayu dan Agama Kristen

Bahasa Melayu di Maluku Tengah, nampaknya, pada mulanya merupakan bahasa pesisiran juga seperti di Maluku Utara. Perdagangan merupakan jalur utamanya. Selain itu, seperti halnya di Maluku Utara pula, bahasa Melayu di Maluku Tengah menjadi fungsi dari kekuasaan Belanda. Pertama-tama, seperti di Maluku Utara, sejak masa VOC bahasa Melayu menjadi alat komunikasi utama antara para pejabat Belanda dengan penduduk (atau lebih tepat para pemimpin negeri). Kedua, bahasa Melayu di Maluku Tengah menjadi alat Pekabaran Injil yang dilakukan oleh pihak Gereja Belanda dengan dukungan VOC. Fungsi kedua dari bahasa Melayu tersebut tidak terdapat di Maluku Utara, karena VOC tidak merasa berkepentingan mendukung Pekabaran Injil di wilayah itu.

Penelitian mengenai bahasa Melayu sebagai alat politik kurang mendapat perhatian para ahli bahasa dibandingkan dengan bahasa Melayu sebagai alat Pekabaran Injil. Selain itu, penelitian mengenai bahasa Melayu di Maluku Tengah lebih banyak mengarah pada masa kini atau apa yang dikenal sebagai *Melayu Ambon*. (Collins, 1980; Tetelepta, 1984; Grimes, 1985 dan 1991; Van Minde, 1990; Tjia, 1992). Malah ada kecenderungan untuk menyimpulkan bahwa bahasa Melayu Ambon harus dipelajari dalam rangka teori kreolisasi.

Padahal penelitian *sejarah bahasa Melayu* di Maluku Tengah amat dimungkinkan karena demikian banyaknya tersedia sumber sejarahnya berupa surat-menyurat antara pihak Belanda dan para pejabat negeri yang tersimpan di Arsip Nasional R.I. Jakarta. (Leirissa, 1981). Memang agak sulit menemukannya karena surat-surat itu biasanya tidak berdiri sendiri (bernomor agenda sendiri) merupakan lampiran dari surat-surat para pejabat Belanda. Surat-surat dari dan kepada para penguasa negeri-negeri Kristen biasanya menggunakan aksara Latin, sedangkan kepada dan dari para pejabat negeri-negeri Islam menggunakan aksara Arab.

Para pejabat Belanda, terutama di Fort Victoria, membiayai sejumlah penerjemah (*translateur*) untuk tugas-tugas menerjemahkan surat-surat itu dan menulis surat-surat balasannya. Terutama surat-surat kepada para pemimpin negeri-negeri Islam membutuhkan penerjemah khusus yang menguasai bahasa Melayu serta aksara Arab. Hingga bagian pertama abad ke-19 para *translateur* itu diambil dari penduduk *Kampung Makasar* di kota Ambon.

Salah seorang *translateur* dari awal abad ke-19 yang sangat terkenal adalah Daeng Rapahan yang oleh Belanda lebih dikenal sebagai *Guruw Primo*. Pada tahun 1838 ia diganti oleh H. Usman. Selain itu Belanda juga mempekerjakan orang-orang lain dari Kampung Makasar untuk mengantarkan surat-surat itu ke tempat-tempat yang jauh. Para *pengantar surat* itu kebanyakan adalah pedagang yang selain membawa surat juga berdagang untuk kepentingan sendiri. Sejak pertengahan abad ke-19 ketika Belanda meluaskan sistem pemerintahannya, dan orang-orang Kampung Makasar terdesak sama sekali sebagai *translateur* karena digantikan oleh para *pegawai Bahasa* dari kalangan orang Belanda sendiri. (Leirissa, 1993).

Sebagai contoh penggunaan bahasa Melayu di kalangan penduduk negeri-negeri Kristen berikut ini dikemukakan kutipan dari sebagian dari sebuah surat dari para penguasa negeri di kepulauan Uliase (Haruku, Saparua, Nusalaut) kepada Residen Saparua. (Leirissa, 1981) :

Saparoea ada 3 Mei 1869

Perhimonan sabitjara Radja2 Patty deri Uliassers, menjatakan dengan banjakh kerindahan dan hormat kepada tuwan Feijtaur deri Saparoea dan Haroekoe Bahuwa menurut itu conphrentie jang bermula kaly di negery Waay awleh tuwan Gubernadaur deri pulau2 Maluko serta Radja2 Patty deri Uliassers pada harry djumaat 22 April jbl.

Berikut itu, lagi conphrentie di Saparoea kaduwa kaly awleh Feijtaur deri Saparoea dan Haroekoe serta samowa Radja2 Patty deri Uliassers, pada hary idzenen 2 bulan ini, antara itu bowah2 tjenkej seperty sudah dekat arah dalam itu conphrentie2 tersebut

1. Bahuwa pada terlepas dan tyda terpaksa itu bowah2 tjenkej bayk pada akan terdjuwal pada barang syapa jang suka bely, tetapi apa sisa jang tyada laku bawleh kasy masok pada Gawbernement selama lima tahon, hanja komedyan deri pada itu Gawbernement tyada akan terima lagy, sebab itu kamy haris ramedy ataw tjoba dengan rajin tanaman pada membawa itu kaontongan pada bala2, sopaja luput itu karugyan deri Gawbernement.
 2. Akan itu dengan banjakh hormat deri kamy Radja2 Patty deri Uliassers menjatakan kapada tuwan jang mulja, bahuwa kamy ada merasa sewatu amat kabaratang pada kamy bala2 deri Uliassers, jang mana sudah hidop dibawa kapaliharaan Gawbernement selama duwa ratus lima pulu ampat tahon, dengan bawleh kasadapang deri itu harga bowah tjingkej
 3. Deri itu bala2 santyasa sudah taroh sawatu pengharapan dan bersandar kapada Gawbernement antara itu kaontongan deri bowah2 tjingkej
 4. Berikut itu atas titah deri Gawbernement sudah terangkat pamariksa Radja2 Patty dalam perdjalanen tahon 1830, 1832 dan 1834 sudah masokh dalam dussong2, mauw kajuw hutang dan pohon2 tatanamang jang basombar pohon2 tjingkej kamedyen deri pada itu sedang bala2 pada meluwaskan pohon2 tjingkej, adalah amat bajikh pada itu pohon2 tjingkej djady gerseer dan membery banjak bowah
-

Bahwa Bahasa Melayu dengan aksara Arab berkembang di kalangan penduduk negeri yang beragama Islam dapat dipahami, sekalipun dalam soal ini perlu juga diadakan penelitian yang saksama. Sebagai bagian dari tradisi perdagangan mereka, seperti juga di Maluku Utara, terkait dengan budaya pesisiran yang berintikan bahasa Melayu itu. Tetapi keadaannya berbeda dengan penduduk negeri-negeri Kristen di Maluku Tengah. Sekalipun mereka juga merupakan produsen cengkeh yang penting seperti penduduk negeri-negeri Islam, perkebunan cengkeh di kalangan mereka (terutama di kepulauan Uliase) tidak terkait dengan dunia perdagangan pesisiran tersebut. VOC-lah yang memprakarsai penanaman cengkeh di Uliase, dan produksinya tidak pernah dialirkan melalui jalur perdagangan pesisiran itu tetapi langsung dikelola oleh VOC sendiri.

Dalam berkomunikasi VOC juga menggunakan bahasa Melayu dengan penduduk Uliase tersebut. Dengan demikian muncul pertanyaan, pertama, mengapa VOC memilih bahasa Melayu sebagai alat komunikasi politik, dan kedua, mengapa dan bagaimana bahasa Melayu berkembang juga di kalangan negeri-negeri Kristen yang tidak terkait dengan jalur-jalur perdagangan dan budaya pesisiran tersebut.

Peran utama dalam penyebaran penggunaan bahasa Melayu di kalangan negeri-negeri Kristen adalah pihak gereja yang telah mengadakan kegiatannya di wilayah ini segera setelah VOC merebut benteng Portugis di Ambon pada tahun 1605. Bahwa pilihan jatuh pada bahasa Melayu nampaknya tidak jelas, karena bahasa-bahasa lokal, seperti dikemukakan di atas, terlalu beraneka ragam sehingga tidak praktis untuk digunakan bagi suatu kegiatan yang terkonsentrasi.

Setelah menguasai seluruh kepulauan Uliase dan pulau Ambon, VOC selain menegakkan kekuasaan politiknya melalui benteng-benteng dan aparat pemerintahan, juga mendukung pihak gereja membangun gereja-gereja dan sekolah-sekolah. Dengan demikian, dalam abad ke-17 berangsur-angsur setiap negeri Kristen memiliki gereja dan sekolahnya sendiri. Sampai

bagian kedua abad ke-19 sistem pendidikan tersebut adalah bagian integral dari gereja; sekolah menyiapkan anak-anak agar bisa membaca Kitab Injil dan mengikuti khotbah di gereja (selain pelajaran membaca dan menulis, ada juga pelajaran berhitung). Bahasa yang diajarkan di sekolah-sekolah itu adalah bahasa Melayu yang menggunakan aksara Latin.

Selain itu sejumlah pendeta yang berbakat juga menulis khotbah-khotbahnya dalam bahasa Melayu sehingga bisa digunakan oleh penggantinya. Kepentingan menulis khotbah-khotbah itu makin terasa ketika pada bagian pertama abad ke-19 dibuka sebuah Seminari untuk mendidik pekerja agama dari kalangan penduduk sendiri.

Selain itu, sudah sejak awal abad ke-17 bagian-bagian dari kitab Injil juga mulai diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Namun baru pada abad ke-18 muncul sebuah terjemahan lengkap dari Kitab Injil berbahasa Melayu. Penerjemahan itu adalah hasil karya dari Dr. Melchior Leydecker yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1733. Terjemahan ini (dikenal sebagai terjemahan Leydecker) kemudian mengalami berkali-kali cetak ulang dalam abad ke-19. (Swellengrebel, 1978). Sekalipun kemudian terdapat terjemahan-terjemahan lain yang digunakan di wilayah-wilayah lainnya, namun karena satu dan lain sebab, penduduk Maluku Tengah tetap menggunakan terjemahan Leydecker hingga paroh pertama abad ke-20. (Leirissa, 1994).

Sesungguhnya kecuali Leydecker, Francoise Valentijn, seorang pendeta yang telah lama bertugas di Ambon juga mengambil prakarsa untuk menerjemahkan seluruh Kitab Injil yang terdiri dari dua bagian itu. Tetapi karena Leydecker mendapat penugasan dari pemerintah dan didukung oleh pimpinan gereja di Negeri Belanda, maka terjemahan Valentijn tidak pernah diterbitkan.

Masalah ini menarik karena menyangkut permasalahan bahasa. Valentijn, seperti dikemukakan sendiri, menggunakan apa yang dikenal sebagai *Melayu rendahan*, yang banyak

digunakan secara lisan. Ia yakin bahwa tipe bahasa itu akan lebih komunikatif sehingga anggota-anggota jemaat akan lebih mudah memahami isi Kitab Injil. Sebaliknya Leydecker menggunakan *Melayu Tinggi* yang lebih banyak digunakan secara formal oleh para pejabat pemerintahan dan dalam surat-menyurat para penguasa negeri.

Selain itu, sebagai seorang yang pernah mengikuti pendidikan theologi di Perguruan Tinggi, Leydecker juga menguasai bahasa Arab. Selain itu ia juga mengenal sastra istana dari masyarakat pesisiran yang menggunakan bahasa Melayu dan aksara Arab. Melalui kedua kemahiran itu ia menyadari bahwa berbagai istilah untuk konsep-konsep abstrak dalam agama Kristen nampaknya dekat dengan istilah-istilah dalam bahasa Arab untuk pengertian yang sama atau hampir sama. Ini sebabnya pula mengapa istilah Alah dan Tuhan juga terdapat dalam agama Kristen, padahal sebelumnya lebih banyak digunakan istilah Theos (lihat sajak dari Haruku tersebut di atas).

Dengan demikian, bahasa Melayu yang digunakan di Maluku Tengah, khususnya di kalangan penduduk yang beragama Kristen sesungguhnya adalah suatu jenis bahasa Melayu yang bisa dinamakan *Melayu Leydecker*. Sekalipun bahasa Melayu sendiri mengalami perkembangan, namun keadaan terisolasi dari kepulauan Maluku Tengah hingga abad ke-20 menyebabkan jenis bahasa itu menjadi baku dan dianggap bahasa yang baik dan benar.

Bahwa bahasa *Melayu Leydecker* itu tidak baku diilustrasikan oleh Swellengrebel dengan mengambil sebuah fragmen dari otobiografi Abdullah bin Abdulkadir Munshi (*Hikayat Abdullah*). Munshi Abdullah menceritakan sebuah pengalaman mengenai pertemuannya dengan seorang penginjil Inggris di Malaya. Sang penginjil Inggris itu meminjamkan terjemahan Leydecker kepadanya dengan pesan agar dibaca. Dialog yang terjadi antara kedua orang itu dalam pertemuan mereka berikutnya adalah sebagai berikut (Leirissa, 1994: 48) :

“Sudahkah Tuan membaca buku itu?”

“Sudah Tuan.”

“Apakah cara berbahasa memang seperti itu?”

“Tidak Tuan.”

“Kalau bukan bahasa Melayu, bahasa apakah itu?”

“Saya tidak tahu, Tuan. Hanya Allah dan penulisnya yang tahu bahasa apa yang digunakan di situ.”

Sifat khas dari bahasa Melayu yang digunakan dalam masyarakat Kristen di Maluku Tengah dalam abad-abad yang lalu kini mulai mendapat perhatian para peneliti. James Collins, ahli linguistik dari University of Hawaii yang telah dikutip di atas, merupakan salah seorang pelopornya. Mengenai bahasa Melayu yang digunakan untuk menulis khotbah-khotbah dalam abad ke-17, Collins mengatakan : “Ini merupakan sejenis bahasa Melayu yang kaya dalam morfologinya, diperjelas dengan sistem paragraf dalam bahasa Belanda, penuh dengan kiat-kiat retorik, penuh dengan kata-kata pinjaman terutama dari bahasa-bahasa Asia, dan kalimat yang telah arkais dan sebab itu menjadi aneh.” (Collins, 1992: 104).

Collins mempelajari kitab kumpulan khotbah dari Pendeta Franchois Caron (lahir 1634) yang menjadi pendeta di Ambon selama 13 tahun (1660-1673). Sekembali di Negeri Belanda ia menerbitkan kumpulan khotbah-khotbahnya dalam tiga buku. (Collins, 1992: 101). Pertama adalah buku yang diterbitkan tahun 1678 dengan judul *Tsjeremin acan Pegang Agama* (286 halaman), kedua berjudul *Adjaran dalam jang manna jadi Caberadjar Capalla Capallanja derri Agama Chistaon* (1682), dan ketiga berjudul *Djalang ca Surga* (1683).

Mengenai bahasa Melayu yang digunakan, Caron mengatakan sebagai berikut (Collins, 1992: 102) :

Liatlah dalam Tseremin ini, tsjara appa patut pitsaja, idop daan menjomba, acan djadi moumin, samoa Melayo massing, catoudjo dengan wactou, tempat daan orang Ambon: boucan agar tsjari namma deri apa bahassa tinggi, atoran pandei sacali-cali, daan issinja ca dalam, acan bacaboul pada orang acal jouga, daan sjappa meng'arti bahassa trus, tetapi agar bouca trang. Adjaran Christaon dan peara camou orang.

[Lihatlah dalam cermin ini, cara kamu percaya, hidup dan beribadah, agar diberkati, semuanya dalam bahasa Melayu sederhana, sesuai keperluan zaman, tempat dan orang Ambon; jangan menggunakan bahasa yang canggih, argumentasi yang mendalam dengan isi yang kabur yang menyenangkan mereka yang pandai dan memahami bahasa itu dengan baik, tetapi jelaskan ajaran-ajaran agama Kristen demi kehidupan kalian semua].

Penelitian lebih lanjut akan mengungkapkan apakah pandangan Caron itu memang umum dalam abad ke-17. Seperti dikemukakan di atas, seorang pendeta lainnya yang lama bertugas di Ambon, yaitu Francois Valentijn, juga menggunakan bahasa *Melayo massing* (Melayu sederhana) seperti halnya Caron. Kalau kesimpulan ini memang benar, maka sesungguhnya terjemahan Leydecker yang digunakan secara umum di kalangan masyarakat Kristen Maluku Tengah hingga paroh pertama abad ke-20 itu, sesungguhnya merupakan suatu *revolusi* dalam berbahasa. Perubahan besar-besaran itu terjadi justru karena penggunaan Kitab Injil terjemahan Leydecker itu mendapat dukungan dari pihak pemerintah, VOC dan kemudian Hindia Belanda.

Sementara menunggu penelitian kebahasaan selanjutnya atas bahasa Melayu yang digunakan di Maluku Tengah, dapatlah dibuat suatu kesimpulan sementara sebagai berikut. Sejak Belanda bercokol di Maluku Tengah (awal abad ke-17) terdapat dua jenis bahasa Melayu, yaitu bahasa *Melayu massing* dan bahasa Melayu *orang acal* atau orang pandai. Jenis pertama adalah bahasa sehari-hari (bahasa lisan), dan jenis kedua adalah bahasa yang digunakan oleh pemerintah. Sejak dekade kedua abad ke-18 kedua jenis bahasa itu cenderung menjadi sama. Terjemahan Kitab Injil dari Leydecker yang sejak itu digunakan di gereja-gereja dan sekolah-sekolah memang cenderung mendekati bahasa *orang acal* tersebut. Namun demikian, bahasa *Melayu massing* masih tetap digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara bahasa orang acal tidak berkembang karena tidak adanya kesusasteraan selain tulisan-tulisan keagamaan, bahasa Melayu

massing terus saja menjadi bahasa hidup yang digunakan masyarakat. Jenis bahasa resmi ini berkembang menjadi cikal-bakal bahasa Indonesia sekarang.

Sementara itu nampaknya bahasa *Melayu maessing* yang tetap digunakan itu kemudian berkembang menjadi bahasa *Melayu Ambon* yang menurut dugaan sementara pakar bahasa merupakan sejenis bahasa kreol.

4.4 Pela dan Siwa Lima

Berbagai aspek budaya yang telah dikemukakan di atas memberi kesimpulan, bahwa budaya Maluku Tengah mengandung banyak dualisme. Pertama-tama dualisme antara penduduk pedalaman dan penduduk pesisiran; penduduk yang secara berabad-abad telah menjadi produsen cengkeh dan yang baru saja memasuki bidang ini atau yang samasekali tidak mengenal pertanian cengkeh; antara wilayah-wilayah yang sejak abad ke-17 secara intensif mengenal budaya politik Belanda dan yang tidak sama sekali atau yang baru kemudian terserap dalam sistem pemerintahan Belanda; antara penduduk yang masih menggunakan bahasa-bahasa lokal dan yang menggunakan bahasa Melayu; antara yang beragama Islam dan yang beragama Kristen, dsb.

Namun demikian adalah kenyataan pula bahwa masyarakat yang serba dualis dalam soal budaya itu tetap bertahan hingga kini. Selain kekuasaan Belanda yang bercokol di wilayah itu sejak abad ke-17, dan kekuasaan politik Republik Indonesia sejak tahun 1950, adakah faktor-faktor lain yang bisa menjamin integrasi masyarakat Maluku Tengah?

Nampaknya ada. Para pakar kini yakin bahwa institusi *pela* selama berabad-abad menjadi jembatan antara berbagai perbedaan budaya sosial dalam masyarakat Maluku Tengah. Institusi *pela* merupakan unsur pemersatu antara berbagai desa dan pemeluk agama di Maluku Tengah. (Bartels, 1977).

Sulit menjelaskan arti kata *pela* karena demikian banyak pendapat yang beredar sekarang belum disaring melalui penelitian ilmiah yang mendalam. Menurut Dieter Bartels yang pernah mengadakan penelitian lapangan di Maluku Tengah, kata *pela*

... pada umumnya dianggap berasal dari salah satu bahasa-bahasa lokal di Maluku Tengah. Dalam bahasa Melayu Ambon yang digunakan di zaman sekarang, artinya adalah persekutuan, konfederasi, liga, atau persaudaraan. Namun kata itu hampir selalu digunakan untuk mengacu sistem aliansi antar negeri yang tradisional di Maluku Tengah. (Bartels, 1977: 56).

Demikian pula tidak mudah menentukan dengan pasti asal-usul dan sejak kapan institusi ini telah ada dalam masyarakat Maluku Tengah. Dieter Bartels, melalui penelitian atas oral traditions tentang *pela* di Maluku Tengah, berpendapat bahwa *pela* telah ada sebelum datangnya orang-orang Portugis di abad ke-16. Bentuk-bentuk *pela* yang pertama, menurut Bartels pula, terdapat di kalangan masyarakat pengayau yang memerlukan bentuk kerjasama ini untuk melaksanakan pengayauan dengan baik. Tetapi kemudian bentuk ini juga berkembang dalam perang-perang antar suku yang demikian banyak terjadi di wilayah-wilayah yang belum diduduki Belanda. Tetapi kemudian ada pula *pela* yang berguna dalam perdagangan. (Bartels, 1977: 34--56).

Dengan demikian, *pela* sesungguhnya adalah aliansi antara dua pemukiman. Bentuk aliansi semacam ini dengan sendirinya tidak terdapat di Maluku Tengah saja, tetapi terdapat pula di hampir setiap masyarakat. Lalu apa yang menyebabkan bentuk aliansi di Maluku Tengah itu begitu penting dan menarik bagi orang luas? Dieter Bartels berpendapat, bahwa "apa yang menyebabkan orang-orang Indonesia lainnya begitu mengagumi *pela* tentu saja adalah ciri utamanya sebagai bentuk kerjasama yang melampaui batas-batas agama-agama yang demikian berbeda, Islam dan Kristen, sehingga *pela* barangkali merupakan satu-satunya sistem pengaturan interaksi antara orang-orang yang berlainan agama itu dan jauh

melampaui hubungan-hubungan kekeluargaan yang ada di Indonesia.” (Bartels, 1977: 68).

Pada umumnya pela menyangkut dua negeri, tetapi setiap negeri bisa mengadakan hubungan pela dengan sejumlah negeri lain sesuai kebutuhan. Namun demikian hubungan tidak pernah ada suatu sistem pela yang menyangkut seluruh *pela* yang dimiliki suatu negeri; hubungan pela selalu hanya antara dua negeri saja.

Selain itu hubungan pela bisa juga dilakukan antara dua negeri yang berlainan agama (Kristen dan Islam), atau antara negeri yang terletak di pulau-pulau yang berbeda-beda. “Sistem pela adalah institusi yang paling penting yang mengintegrasikan masyarakat Ambon di atas tahapan ikatan desa. Pela dianggap sebagai hubungan persaudaraan yang abadi, dan pengadaan atau pembaharuan (*panas pela*) aliansi semacam itu disertai ritual-ritual dan sumpah-sumpah yang sakral.” (Bartels, 1977: 29).

“Wawasan utama yang mendasari *pela* adalah (1) negeri-negeri yang berpela saling membantu dalam masa krisis (bencana alam, perang, dsb); (2) kalau diminta, negeri mitra harus membantu dalam melaksanakan proyek-proyek kemasyarakatan yang besar; (3) bila anggauta sepela mengunjungi negeri pelanya, ia harus diberi makan; (4) setiap anggota negeri yang berpela dianggap sedarah daging, sehingga perkawinan antar anggota pela dianggap sebagai incest. Setiap pelanggaran atas aturan-aturan pela itu dapat dikenakan hukuman yang berat.” (Bartels, *loc.cit.*).

Sekalipun belum lengkap, tetapi studi Bartels mengenai pela di Maluku Tengah tersebut cukup menjelaskan lembaga yang mengatur integrasi masyarakat Maluku Tengah itu. Selain ada pela-pela yang bertujuan untuk perang seperti di Seram dahulu (umpamanya *pela* antara *Loiatala* dan *Honitetu*; antara *Ahiolo* dan *Sanahu*, *Samasuru* dan *Paulohi*, *Makariki* dan *Saleman*, terdapat pula pela antara klan-klan tertentu seperti antara *Waerisal* dan *Manusama*, antara *Salaruane* dan

Purimahua). Pela antara negeri-negeri yang berlainan agama umpamanya adalah antara Hatuaha (Islam) dan Tuhaha (Kristen); antara Hatuaha (Islam) dan Oma (Kristen); antara Werinama (Islam) dan Kilang (Kristen), antara Iha (Islam) dan Samnasuru (Kristen), antara Sanahu (Islam) dan Samasuru (Kristen), antara Ihaluhu (Islam) dan Ihamahu (Kristen), dan lain-lain.

Institusi pela juga merupakan wahana pemeliharaan bahasa-bahasa lokal yang telah dikemukakan di atas. Pembentukan pela antara dua negeri selalu disertai dengan sumpah yang diucapkan dalam bahasa lokal (bahasa tanah). Sebagai contoh, ketika Honitetu dan Lohiatala mengadakan hubungan pela, maka sumpahnya adalah sebagai berikut (Bartels, 1977: 231-232) :

Ooo! tunai-lasatale, pulane, leamatai, Tuwale, Babike, lanite, tapele, selu jami, ooo! kinu kwate kai Lohitalaoo kinu kwate kurele, pela jurule; saka mimise, noa mimise, lesi kena lumaio, sapu kena lumaio.

Ooo! saa marelo tetu matau; saa malau soa tetu peisoa, iane kete matau; timule keru matao; halate likio matao. Mata sakalele pelene.

Kinu kwate kurele, pela kurele; saka mimise, noa mimise, saka nunu rupu kena patu, patu rupu kena nunuee, nunu pali tolase, tolase pali nunuee, hioooo.....!

[Oh, yang maha kuasa, bulan dan matahari, Rabike dan Tuwale, langit dan bumi, pandanglah kami, kami sedang minum air sumpahan dengan Lohiatala, suatu sumpah yang abadi, sumpah yang kuat.

Perhatikanlah dan ingatlah baik-baik agar tidak menjadi marah dan bertengkar antara sesama.

(Bila tidak dilaksanakan, maka kalau) kau ingin memanjat pohon untuk menangkap kusu maka kau akan jatuh ke tanah, atau lebah akan menyengatmu sampai mati; kau akan mati ketika memakan sagumu yang masih hangat, kau akan mati ketika memakan

pinang, di laut kau akan jatuh dari perahumu ke laut dan ditelan ikan; kau akan mati ketika angin timur berhembus dan kau akan mati ketika angin barat menghembus, mati bagaikan kunang-kunang.

Kami sedang minum sebuah sumpah yang abadi, sumpah yang kuat; waspadalah, jangan lupa; (kita akan menjadi satu sekuat) pohon beringin dan batu karang, bagaikan batu karang dan pohon beringin, bagaikan pohon tolase yang bertumbuh bersama pohon beringin, hioooo.....!].

Dalam upacara *bikin panas pela* (menghidupkan kembali hubungan pela yang telah ada), terdapat pula upacara yang sangat rumit. Salah satu mata acara yang penting adalah menyambut sesama pela yang dilakukan dengan mengucapkan kapata. Selain itu sejarah hubungan pela juga dikemukakan dalam bentuk kapata. Selain pesta makan-makan dan acara kesenian, terdapat pula upacara doa menurut kedua agama yang berbeda itu. Berikut ini adalah contoh dari ucapan selamat datang dan sejarah pela yang diucapkan dalam bentuk kapata pada upacara panas pela antara negeri Titawai yang penduduknya beragama Kristen dan negeri Pulauw yang penduduknya beragama Islam (Bartels, 1977: 249) :

Kapata selamat datang diucapkan Titawai :

Lembe-lembe rima o
Lembe-lembe rima o
Gandong Matasiri lembe rima mae o
Lembe-lembe rima mae o
Lesinusa Matasiri hae lata Nunusaku o

[Mari dan ulurkan tanganmu
Mari dan ulurkan tanganmu
Persaudaraan Pulauw mari dan ulurkan tanganmu
Titawai dan Pulauw, keduanya berasal dari Nunusaku o]

Sejarah pela antara Titawai dan Pulauw :

Ito rua huka hoto Nunusaku oo
Kukuwano manu, loto Tala ina

Ale Kuku o

Tala ina yo sorak gandoing erwako

[Kita berdua berasal dari Nunusaku

berakit menyusur sungai Tala

karena rakit kita hanyut ke hulu

dari sungai Tala, kita adalah bersaudara]

Di atas berkali-kali disebut istilah Nunusaku. Ini pun merupakan simbol dari persatuan antara masyarakat Maluku Tengah. Nunusaku merupakan mitos asal-usul yang dimasukkan dalam hampir semua upacara panas pela di Maluku Tengah. Menurut versi yang umum diterima, Nunusaku adalah sebuah gunung yang tidak nampak bagi manusia dan terletak di suatu tempat di Seram Barat. Manusia Maluku Tengah dikatakan berasal dari Nunusaku. Mereka kemudian bercerai-berai ke berbagai pulau dan mendiami negeri-negeri mereka masing-masing. Melalui sungai-sungai Tala, Eti dan Sopalewa mereka dikatakan menyebar dan mendiami seluruh Maluku Tengah.

Selain mitos Nunusaku, dalam bentuk lain masyarakat asli di pulau Seram itu juga menjadi inspirasi bagi persatuan antara penduduk Maluku Tengah. Sampai abad ke-19 di pulau itu terdapat susunan masyarakat yang terbagi dalam dua bagian yang menyatu. Kedua bagian itu adalah Patasiwa (Seram Barat) dan Patalima. Dalam istilah-istilah itu terkandung konfigurasi yang juga terdapat hingga di Maluku Utara dan Maluku Tenggara, yaitu sembilan (*siwa*) dan lima (*lima*). Lima sesungguhnya adalah empat bagian dimana satu menjadi primus interparis, seperti halnya Empat Perdana dan Raja Hitu di Hitu tersebut di atas. Siwa atau sembilan adalah lima ditambah empat, jadi sesungguhnya terdiri dari konfigurasi yang sama pula walau konfigurasi kedua tidak mengandung unsur kesatuannya sendiri (raja) karena sudah disatukan melalui unsur persatuan dari konfigurasi yang pertama.

Pengertian persatuan dalam konfigurasi itu akan lebih jelas bila diingat bahwa sering pula unsur sembilan dilambangkan dengan perempuan (*ina*) dan unsur lima dilambangkan dengan

pria (ama). Wanita dan pria tidak bisa hidup terpisah karena tidak mungkin ada masyarakat kalau keduanya terpisah. Dengan demikian unsur-unsur yang berbeda itu (wanita dan pria) hanya bisa bertahan bila bersatu.

Dalam masa kini ketika timbul kebutuhan untuk menciptakan simbol-simbol persatuan demi integrasi masyarakat, maka konfigurasi yang umum tersebar di seluruh Maluku itu menjadi inspirasi. Dengan demikian terwujudlah semboyan *Siwa Lima* yang menjadi kebanggaan Pemerintah Daerah Propinsi Maluku sekarang. Seolah-olah hendak dikemukakan bahwa sesungguhnya seluruh Maluku adalah satu. Sekalipun terdapat unsur-unsur lain yang menyembunyikan ciri-ciri kesamaan itu, namun sesungguhnya sistem budaya orang Maluku (Utara, Tengah dan Tenggara) adalah sama juga. Semboyan *Siwa Lima* yang digali dari sejarah budaya Maluku itu, merupakan perwujudan *bhinneka tunggal ika* dalam konteks Maluku

BAB V

MALUKU TENGGARA

5.1 Geografi dan Penduduk

Maluku Tenggara adalah bagian terselatan dari propinsi Maluku, yang membentang dari Laut Banda ke arah Selatan agak menyerong ke Tenggara ke Laut Arafura di Selatan Pulau Irian. Ia merupakan gugusan pulau yang letaknya cenderung melingkar/membentuk setengah lingkaran, dimana gugusan pulau yang terakhir sangat dekat ke propinsi Timor Timur. Daerah ini merupakan salah satu Daerah Tingkat II dari Propinsi Maluku dengan ibukotanya Tual. Wilayahnya meliputi Kep. Key, Kep. Aru, Kep. Tanimbar, Kep. Babar, Kep. Damar, Kep. Moa, Sermata, Leiti, Lakor, Kisar, dan Wetar.

Penyebutan Maluku pada nama Kabupaten Maluku Tenggara adalah mengikuti istilah Maluku seperti yang diuraikan dalam bab I, bab III dan bab IV. Akan tetapi sampai dengan abad ke-19 belum ada penyebutan seperti itu untuk kepulauan di bagian tenggara di laut Banda ini. Pada abad 18, kepulauan ini masuk dalam wilayah administrasi *Gouvernement van* Banda yang berpusat di Benteng Belgica di Bandaneira. Kemudian setelah tahun 1817 seluruh wilayah administrasi *Gouvernement* Banda ini bersama dua *gouvernement* lainnya yaitu *Gouvernement van Amboina* dan *Gouvernement van Ternate*, berada di bawah *Gouvernement der Molukken*. Ketiga *gouvernement* itu disatukan sehingga

status ketiga bagian wilayah itu menjadi rendah, yaitu dengan sebutan *residentie*. (Leirissa, 1971). Residensi Ternate dikepalai seorang residen yang berkedudukan di Ternate, Residensi Ambon dikepalai seorang residen yang berkedudukan di Amboina dan Residensi Banda dikepalai seorang residen pula yang berkedudukan di Bandaneira. Yang membawahi ketiga residensi adalah seorang *Gouverneur* yang berkedudukan di Ambon.

Sistim administrasi pemerintahan ini berlangsung sampai akhir pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1942, yang kemudian diganti oleh pemerintah pendudukan Jepang. Pada saat itu daerah Maluku merupakan salah satu dari empat wilayah pemerintahan di Indonesia Timur yang dibentuk pemerintah Jepang. Keempat wilayah itu adalah Kalimantan dengan ibukotanya Banjarmasin, Sulawesi dengan ibukotanya Makassar, Nusa Tenggara dengan ibukotanya Bali dan Maluku dengan ibukotanya Ambon. Keempat wilayah ini berada di bawah komando Angkatan Laut Jepang yang disebut Kaigun. Masing-masing wilayah tersebut dikepalai seorang Gubernur Militer.

Di bawah Gubernur militer terdapat aparat-aparat pemerintahan sipil yaitu *Minseibu Chokan* yang merupakan semacam kepala daerah yang berkedudukan di Ambon, Ternate dan Tual. Sejak zaman Jepang itu, Tual yang berada di pulau Kei mulai diaktifkan sebagai pusat kegiatan pemerintahan di tingkat lokal. Selain itu Tual juga diarahkan sebagai pusat perkembangan budaya dengan cara mengajarkan nyanyian-nyanyian Jepang, tarian Jepang dan olahraga ala Jepang di sekolah-sekolah. Tual kemudian merupakan salah satu pintu gerbang ke Maluku Tenggara sehingga di sini terjadi kontak antara berbagai corak kebudayaan.

Kebudayaan asli di daerah Maluku Tenggara sendiri belum diketahui dengan pasti, namun diperkirakan pada dasarnya kebudayaannya hampir sama dengan kebudayaan penduduk di Nusa Tenggara Timur, Timor Timur, Maluku Tengah terutama Seram Timur sampai ke Kepulauan Gorom, Kuur, Kesui dan

Watubela. Demikian juga ada persamaannya dengan kebudayaan penduduk di pantai selatan dan barat daya Irian. Kebudayaan yang tersebar di antara wilayah-wilayah itu adalah kebudayaan Austronesia, Melanesia dan Polynesia. Di sekitar abad ke-16 sampai abad 19 kebudayaan dari kerajaan-kerajaan Islam Ternate dan Tidore masuk pula ke wilayah ini. Selain itu diperkirakan masuk pula unsur kebudayaan penduduk pulau Banda dari Maluku Tengah yang bermigrasi ke sana pada abad 17-18, ketika penduduk daerah ini berpindah ke Kepulauan Key dan Aru menghindari kekejaman VOC di masa J.P. Coen. Penduduk dari kepulauan Banda itu kemudian menetap di Elat di pulau Kei Kecil yang kemudian disebut dengan Banda Eli.

Di antara tahun 1500 dan 1800, Kepulauan Maluku Tenggara ini merupakan batas paling selatan dari Kesultanan Ternate dan Tidore sekaligus merupakan wilayah dari salah satu kesultanan tersebut. Karena letaknya yang jauh dari pusat kekuasaan induknya, maka sejak tahun-tahun tersebut Maluku Tenggara mulai merupakan tempat-tempat yang diincar para missionari Portugis dan Belanda untuk penyebaran agama Kristen. (Paul Michael Taylor & L.V. Aragon : 1992). Proses pembudayaan daerah ini walau tidak memperlihatkan penekanan-penekanan tertentu namun berbagai unsur kebudayaan yang masuk ke sana dan ciri-ciri fisik penduduknya dapat mengungkapkan berbagai proses asimilasi penduduk sekaligus kebudayaannya. Selanjutnya berbagai kebudayaan juga masuk ke sana seiring dengan kedatangan suku-suku bangsa pendukung kebudayaannya, seperti suku bangsa Bugis, suku bangsa Makassar, dan suku bangsa Jawa. Kontak-kontak kebudayaan tersebut telah meninggalkan warna dan corak-corak tertentu pada kehidupan sosial budaya masyarakat Maluku Tenggara.

5.2 Sistim Kesatuan Hidup

Berdasarkan uraian singkat di atas, penduduk Maluku Tenggara yang dikenal sekarang tentulah merupakan percampuran dari berbagai suku bangsa yang bermigrasi ke

sana puluhan dan ratusan tahun yang lalu. Pada awal perkembangan kebudayaan, ada manusia yang telah hidup di gua-gua dalam kelompok-kelompok masyarakat kecil yang dikenal dengan keluarga Batih. Keluarga Batih yang terdiri dari ayah, ibu dan anak, kemudian berkembang menjadi *masyarakat gua* dan membentuk kelompok-kelompok tertentu. (Kuncaraningrat : 1958).

Penemuan lukisan-lukisan di dinding gua di daerah Ohoider di Pulau Kei menunjukkan perkembangan tingkat kebudayaan masyarakat pada masa itu. Lukisan-lukisan di dinding gua berupa gambar telapak tangan, bentuk-bentuk manusia, perahu, binatang melata, ikan, burung dan berbagai simbol, memberi kesan magis-religius. Namun gambar-gambar tersebut pada dasarnya melukiskan situasi kehidupan manusia di dunia nyata dan aktivitasnya. Kemudian penemuan kapak-kapak batu berbentuk pacul atau cangkul menandakan masyarakat di masa itu sudah mengenal pertanian sederhana. Dalam perkembangan selanjutnya masyarakat mulai menggunakan peralatan logam seperti besi dan perunggu. Dari logam itu dibuatkan alat-alat seperti, tombak yang disebut Jok, panah yang disebut Temar-Yubil, Lembing (=Nganga), dan lain-lain.

Dengan menggunakan peralatan-peralatan sederhana itu, penduduk di kepulauan Maluku Tenggara melakukan aktivitas kebudayaannya secara bersama-sama dalam ikatan kekeluargaan dan kehidupan yang familiar dan dalam suasana keakraban dan kegotong-royongan. Mereka hidup dalam kelompok-kelompok yang masing-masing mempunyai kegiatan perekonomian tertentu dalam wilayah semacam desa. Di sini ada lembaga pemerintahan yang dipimpin seorang kepala dan beberapa pembantunya. Dalam perkembangan selanjutnya, lembaga pemerintahan desa ini merupakan suatu badan yang berbentuk *raadschap* dan dikepalai *orang kaya*. Ia merupakan pemimpin atau kepala desa yang bersama-sama stafnya bertanggung jawab dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. (Monografi Daerah Maluku : 1980).

Sistim yang hampir sama dengan ini pernah ada di Kepulauan Kei sekitar abad ke XV. Di dalam Sejarah Daerah Maluku, disebutkan bahwa sekitar permulaan abad XV muncul sebuah kerajaan yang mencoba mempersatukan negri-negri atau Ohoiratun-Ohoiratun di daerah itu yang kemudian disebut kerajaan Ohoiwur di Pulau Kei Kecil. Di samping itu ada pula dua bentuk perserikatan yang menggabungkan negri-negri atau desa-desa di sana ke dalam dua kelompok sosial yaitu kelompok *Ursiu* atau *Siu-Ivak* dan kelompok *Lorlim* atau *Lim-itel*. Kesatuan-kesatuan sosial yang dapat disebut juga sebagai kesatuan politis dikepalai seorang *Raja* atau *Rat* atau *Orang Kaya* atau *Halai*. Di dalam kesatuan-kesatuan sosial itu hidup berbagai norma. Norma yang merupakan faktor pengikat kesatuan hidup masyarakat adalah norma-norma adat. Norma-norma adat itu dapat menjamin hubungan antar anggota masyarakat sehingga berjalan dengan baik dan harmonis. Dari penelitian sosial yang telah dilakukan, diketahui bahwa perserikatan atau persekutuan adat yang terdapat di Kepulauan Kei tersebut di atas terdiri atas dua kelompok, yaitu Lorlim terdiri dari enam negri (enam orang raja) yakni : 1). Raja Tuble, raja negeri Tual; 2). Jarbadan, raja negeri Tesoat; 3). Ibes, raja negeri Nerong; 4). Ramaf, raja negeri Fer; 5). Songli raja negri Rumat dan 6). Kirkes, yaitu raja negri Ibra. Sementara Ursiu terdiri atas delapan raja dari delapan negri (Raadschap), Yaitu : 1). Ar Nuhu, raja negeri Danar, 2). Sakmas, raja negeri Wain; 3). Baldu, raja negeri Dulah; 4). Wahadat, raja negeri Ohoitahait; 5). Katel, raja negeri Ohoinangan; 6). Eckel, raja negeri Jamtil; 7). Borman Somlain, raja negri Watlaar; 8). Benar, raja Ohoilimwaf. Struktur semacam ini muncul pula di desa-desa (negri-negri) yang lebih kecil, yang kepala desanya disebut orang kaya dan di bawah itu ada lagi bentuk serupa yang disebut kepala soa. Dengan demikian susunan di atas hampir sama dengan struktur pemerintahan adat di Maluku Tengah yaitu Uli, seperti yang sudah dikemukakan dalam bab II. (Lihat juga Sejarah Daerah Maluku : 1976/1977).

Selanjutnya diantara wilayah-wilayah kesatuan politik tersebut ternyata terjalin hubungan kemasyarakatan dan

kekerabatan yang harmonis, terutama pada kesatuan-kesatuan yang lebih kecil karena adanya hubungan genealogis. Hubungan kemasyarakatan yang terjalin bukan saja merupakan suatu persekutuan yang tercipta atau terbentuk berdasarkan ikatan genealogis atau territorial melainkan juga jauh di luar jangkauan itu, yakni berdasarkan perjanjian perdamaian dan kesepakatan yang dicapai setelah terjadinya suatu insiden (musibah) ataupun peperangan. Persekutuan yang terbentuk ini disebut *Taibet* yang mirip dengan lembaga adat *Pela* di Maluku Tengah. (Ibid : 50/51). Persekutuan seperti itu (*Taibet*) biasanya melibatkan dua atau tiga desa, karena diketahui mempunyai hubungan genealogis dari leluhur mereka. *Taibet* juga bisa terbentuk karena adanya perjanjian perdamaian sekaligus perjanjian persahabatan dan persaudaraan yang dikukuhkan dengan sumpah setia. Kemudian di dalam lembaga *Taibet* tersebut dilengkapi berbagai aturan adat dan sangsi-sangsi. Kedua belah pihak wajib memelihara aturan adat tersebut. Hubungan-hubungan semacam ini dapat ditingkatkan sampai ke hubungan perdagangan demi untuk mempertahankan kehidupan perekonomian. Dalam upaya peningkatan perekonomian dan mengembangkan kreatifitas, kelompok-kelompok masyarakat di sana menenun bahan tekstil dengan motif tertentu dan membuat perhiasan dari manik-manik untuk diperdagangkan. Taylor dan Aragon dalam penelitiannya menyatakan bahwa tekstil yang ditenun di daerah-daerah setempat dengan motif-motif tertentu itu masih dipertahankan sampai sekarang. Begitu pula perhiasan-perhiasan dari manik-manik dan berbagai bebatuan merupakan kebutuhan kaum wanita sehari-hari maupun dalam upacara-upacara keagamaan. (Taylor dan Aragon : 1992). Barang-barang tekstil dan perhiasan hasil kerajinan rakyat itu dipertukarkan antara kelompok-kelompok masyarakat yang mendiami pulau-pulau yang berbeda. Di pulau Tanimbar misalnya barang-barang tekstil dan perhiasan manik-manik, dari dahulu sampai sekarang masih dipertukarkan untuk keperluan upacara ritual keagamaan dan dalam siklus kehidupan manusia. Hal itu dapat diidentifikasi dari rumah peninggalan para leluhur yang khas yang masih dimiliki penduduk dan relief-relief pada berbagai

ukiran kayu di rumah-rumah ibadah. (Taylor & Aragon, Ibid : 1992). Acapkali pertukaran juga dapat terjadi dalam suatu upacara keagamaan antara satu pulau dengan pulau lain yang mempunyai hubungan persahabatan ataupun persekutuan. Hubungan persahabatan antar pulau itu kemudian bisa meningkat menjadi suatu persekutuan yang didalamnya terdapat pula gabungan antar kelompok. Di dalam persekutuan atau gabungan seperti itu menurut Taylor & Aragon memberi peluang terjadinya pertukaran substansial secara musiman. Dalam hubungan itu pula bukan saja benda-benda perhiasan yang dipertahankan tetapi juga benda-benda yang dikeramatkan (benda pusaka). Bahkan para pemuda dapat memperoleh calon isteri dalam kesempatan tersebut yang diikuti dengan hubungan perkawinan. Hal semacam ini masih terdapat di pulau Leti dan Kei. (Tata cara adat orang Leti, Naskah MF.57/L.I/4/A, Bundel Maluku (1), Pustaknas; Adat istiadat di Pulau Kei, Naskah MF.66/L.I/5/A, Bundel Maluku (2), Pustaknas).

Sistim kekerabatan yang dianut adalah patrilineal sehingga dalam pergaulan kekerabatan (range of kindship of affiliation) anak-anak lebih banyak bergaul dengan kerabat dari pihak ayah. Berdasarkan sistim kekerabatan patrilineal ini berkembanglah berbagai organisasi kesatuan hidup pada masyarakat Maluku Tenggara. Di Pulau Kei misalnya berkembang sistim kesatuan hidup yang dapat dilukiskan sebagai berikut :

- Rinrahan* adalah keluarga-keluarga batih patrilineal.
- Rahanyan* adalah clan-clan yang terbentuk karena adanya persatuan rinrahan.
- Ohoiratut* adalah organisasi/persekutuan, yang terbentuk karena adanya penggabungan dari beberapa clan.
- Lor atau Ur* adalah kesatuan yang terbentuk karena penggabungan dari beberapa Ohoiratut. (Sejarah Daerah Maluku : 1976/1977).

Dewasa ini sebagian besar penduduk di Wilayah Maluku Tenggara beragama Kristen, tetapi organisasi sosial tradisional seperti tersebut di atas masih dipertahankan. Beberapa kelompok masyarakat di Wilayah Maluku Tenggara yang mempunyai sistim patrilineal menurut Taylor & Aragon masih mengadakan perkawinan asimetris seperti juga di beberapa wilayah NTB, NTT dan daerah Tapanuli (orang-orang Batak). Taylor dan Aragon menguraikan bahwa organisasi spiritual di Maluku Tenggara ini sangat bervariasi. Diceritakan bahwa dalam proses perkawinan keluarga pengantin pria di Pulau Luang, Leiti dan Babar tidak menyerahkan maskawin kepada istri. Sementara orang-orang Kisar dan juga Babar mempunyai sistim matrilineal yang indogamis, berbeda dengan orang-orang di Tanimbar. Pola-pola perkawinan antara tingkat-tingkat sosial yang tertinggi dan tertentu juga berbeda dari kelompok masyarakat biasa. Anggota masyarakat kelompok atas biasanya sangat mematuhi norma-norma ideal. Norma-norma mana telah ada di dalam struktur masyarakat adat sejak zaman kuno yang kemudian mengalami perubahan-perubahan yang perlu setelah masuknya pengaruh agama Islam dan kemudian bangsa-bangsa Eropa dengan pengaruh agama Kristennya. Masuknya pengaruh-pengaruh dan nilai kebudayaan asing itu membawa perubahan pula dalam struktur masyarakat dan pemerintahan. Dalam ceritera rakyat setempat disebutkan bahwa telah datang ke Kepulauan Kei seorang tokoh ternama yang dianggap sebagai nenek moyang para pemimpin sesudahnya. Ia kemudian terkenal sebagai seorang raja dari negeri Ohoiwur (Kei Besar) dengan nama Tabtut. Ia dianggap sebagai tokoh peletak *hukum dasar* yang mengatur ketertiban masyarakat. Ia memperkenalkan suatu *peraturan dasar* yang disebut *Hukum Larwul Ngabal*. (Sejarah Daerah Maluku : 1976/1977).

Hukum tersebut berisi norma-norma yang mengatur kesusilaan, hak milik, soal-soal kepercayaan, kepemimpinan dan soal-soal kriminal seperti larangan perzinahan, pembunuhan, pencurian, fitnah dan sebagainya. Selanjutnya dalam hukum tersebut masyarakat dibagi dalam golongan-

golongan *kasta* yang dampaknya masih terasa sampai sekarang. Golongan masyarakat yang menduduki tingkat teratas disebut *Mel-mel*, golongan menengah disebut *Ren-ren*, dan golongan masyarakat biasa (bawah) disebut *Iri-ri*. Pembagian masyarakat seperti itu disinyalir sebagai adanya pengaruh dan migrasi orang-orang Bali ke Maluku Tenggara. Atau mungkin juga karena adanya pengaruh kekuasaan Majapahit di masa patih Gajah Mada, seperti yang tersurat dan tersirat di dalam Nagarakartagama pupuh 14, bahwa Ambwan, Wandan dan Onin merupakan tempat-tempat yang diduga disinggahi ekspedisi patih Gajah Mada.

Selanjutnya dalam hukum Larwul-Ngabal itu, untuk melindungi hak milik perseorangan diciptakan tanda-tanda khusus atau lambang-lambang tertentu yang menyatakan larangan mengambil hak milik orang lain. Tanda-tanda atau lambang-lambang itu terbuat dari daun kelapa dan atau kayu, disebut *Balwarin*. Norma-norma tersebut selanjutnya dalam proses penerapannya disesuaikan dengan pola kehidupan masyarakat setempat, sehingga akhirnya menjadi milik masyarakat Kei sampai sekarang ini. (Ibid).

Pembagian masyarakat atas kasta-kasta di Maluku Tenggara itu diduga berasal dari sistim agama Hindu yang masuk ke daerah ini bersama orang-orang Bali yang bermigrasi ke sana. Keadaan masyarakat seperti ini umumnya terdapat pada kesatuan-kesatuan hidup di negeri-negeri yang mempunyai keterikatan *genealogis* yang kuat. Mereka dapat hidup dalam suasana damai dalam suatu ikatan teritorial pula, yang diperkuat pula oleh kepentingan sosial ekonomis yang sama. Kadang-kadang peperangan kecil bisa terjadi, karena timbulnya hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan persekutuan, misalnya pelanggaran adat atau daerah (petuanan) persekutuan maka akan segera terjadi perselisihan-perselisihan yang menjurus kepada peperangan antar suku. Akan tetapi apabila peperangan itu reda maka hubungan antara kesatuan-kesatuan politis dapat meluas sampai jauh dari batas-batas ikatan genealogis dan teritorial. Hubungan-

hubungan baru yang dijalin kembali dapat meningkat pada hubungan perdagangan yang lebih luas bahkan dalam merebut hegemoni perdagangan dan pelayaran secara sehat, baik itu perdagangan yang berupa penukaran barang-barang keperluan hidup sehari-hari sampai kepada perdagangan yang bersifat kapitalistis. Menurut van Leur dalam Indonesian Trade and Society, proses perdagangan seperti itu sudah terdapat di Kepulauan Indonesia sejak dahulu bahkan merupakan sisi lain dari perdagangan Asia Purba. (Burger Dh & Prayudi : 1970).

Selanjutnya disebutkan bahwa kemajuan dalam bidang perdagangan itu disebabkan oleh adanya kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam bidang pelayaran. Baik itu pelayaran dalam jarak-jarak pendek maupun pelayaran dalam jarak-jarak yang jauh dengan menggunakan perahu, kora-kora, atau jung-jung dalam ukuran besar seperti perahu-perahu vinishi dari Bugis (Sulawesi Selatan). Dengan begitu barang-barang kerajinan atau perindustrian juga mengalami kemajuan. Penduduk sudah menekuni kerajinan anyam-anyaman, pembuatan bahan-bahan tembikar serta kerajinan tekstil, menenun.

Di bidang pertanian penduduk telah mengusahakan perladangan dan perkebunan dengan menanam tanaman produktif seperti kelapa dan pala. Perkebunan-perkebunan pala dapat dijumpai di pulau Banda dan sekitarnya yang kemudian diperdagangkan ke seluruh Nusantara, bahkan ke mancanegara. Prof. Sartono menyebutkan bahwa dengan kedatangan para pedagang dan pelayar-pelayar Barat di perairan Indonesia bertambah banyak kontak-kontak penduduk dengan orang-orang Eropa yaitu Portugis, Spanyol dan Belanda. (Sartono Kartodirdjo : 1987). Akan tetapi setelah orang-orang Eropa terutama orang Belanda berhasil menjalankan politik kolonialnya dalam bidang perekonomian dan menjalankan sistim monopoli maka tanaman pala dan perkebunan-perkebunan yang luas di Banda dan sekitarnya itu dikuasai mereka. Harapan mereka untuk menemukan barang-barang berharga seperti emas dan rempah-rempah mendorong pelayar-pelayar Portugis dan VOC menjelajah sampai ke pulau

Kei, Aru, Seram bahkan sampai ke Waigeo, Waigama dan Bacan. Penguasaan terhadap wilayah dan penduduk Banda ini telah menimbulkan pertentangan dan perlawanan.

Di dalam sejarah tercatat perlawanan pertama yang dilancarkan oleh penduduk Maluku melawan *imperialisme* Belanda dilakukan oleh penduduk Banda. Perlawanan rakyat Banda ini terjadi pada tahun 1609, melawan armada VOC yang dipimpin admiral Verhoeff dan Witterea yang mencoba menduduki pulau tersebut. Verhoeff tewas dalam insiden itu, sehingga demi memenangkan politik monopoli perdagangan, VOC memberlakukan prinsip kekerasan yaitu *berperang* yang dirancang oleh Yan Pieterzsoon Coen. Coen menjabat sebagai Gubernur Jenderal pada tahun 1619 dan pada tahun 1621 ia memutuskan untuk menaklukkan Banda dengan segala kekerasan agar mereka tunduk kepada VOC.

Dalam peperangan itu hampir seluruh penduduk Banda dimusnahkan oleh Coen dengan sangat kejam dan tidak berperikemanusiaan. Penduduk yang selamat dan masih hidup mengungsi ke pulau-pulau di sekitar laut Banda yaitu ke pulau Kei, Gorom, Watubela bahkan sebagian ada yang mengungsi ke Makassar di Sulawesi Selatan. Sepeninggal penduduknya, pulau Banda kemudian dinyatakan sebagai milik VOC. Tanah-tanah dan perkebunan penduduk dijual dan dibagikan kepada pengusaha-pengusaha perkebunan asing seperti orang Jerman, Cina dan Belanda yang disebut *perkeniers* (pemilik kebun/tanah). Para pekerja pada perken-perken atau perkebunan-perkebunan tersebut diangkut dari Jawa, Sulawesi Tenggara dan juga Irian. Para pekerja ini diperlakukan sebagai kuli-kuli kontrak dan budak-budak dengan upah yang sangat rendah. Hal tersebut mengakibatkan pada tahun 1662 rakyat Gorom mengadakan perlawanan terhadap kedatangan Vinck. (MRL. Lestaluhu : 1987/1988).

Episode pada abad 16 dan 17 itu dapat memberi gambaran kepada kita tentang pembentukan mentalitas dan kebudayaan penduduk di sekitar laut Banda dan laut Arafura pada masa tersebut. Ada dua kemungkinan yang dapat dikemukakan.

Pertama mungkin saja kebudayaan dan tatanan masyarakatnya hilang sama sekali karena pemusnahan yang dilakukan Coen. Kedua sisa-sisa penduduk yang melarikan diri ke pulau-pulau sekitar dapat mengembangkan kebudayaannya dengan baik di daerah-daerah yang baru. Kemungkinan kedua ini dapat diterima apabila perkembangan yang terjadi di pulau Kei itu adalah hal yang baru seperti telah diuraikan di muka. Hal itu berarti para pengungsi atau penguasa-penguasa yang pindah ke kepulauan Kei itu telah mampu mengembangkan suatu tatanan masyarakat dan kebudayaan baru seperti yang pernah ada di daerah asalnya; Misalnya mereka yang disebut "orang kaya" di kepulauan Kei yaitu di pulau Kei Kecil atau Banda Eli dan Banda Elat adalah memang dahulunya orang kaya dalam arti harfiahnya di Banda. Para orang kaya itu merupakan penguasa-penguasa lokal di bawah para penguasa yang lebih luas kekuasaannya yang disebut Rat atau Raja ataupun Halaai. Besar kemungkinan tatanan masyarakat yang dikembangkan ialah sistim kesatuan hidup yang membagi anggota-anggota masyarakat ke dalam pelapisan-pelapisan atau strata sosial tertentu seperti kasta, cenderung berubah. Sistim kesatuan hidup yang terbentuk kemudian ialah, *Rinrahan*, *Rahanyaan*, *Ohoiratut*, dan *Lor* atau *Ur* yang sudah diuraikan di muka.

Sistim kekuasaan dan tatanan masyarakat atau pun sistim kesatuan hidup di daerah ini mungkin lebih sederhana daripada yang dikenal di Maluku Utara. Akan tetapi Pelapisan sosial seperti itu menurut Kuncaraningrat selalu ada di hampir semua masyarakat di dunia baik yang amat sederhana maupun yang amat kompleks sifatnya. Dalam pergaulan antar individu ada pembedaan kedudukan dan derajat (status). Dalam masyarakat yang kecil dan sederhana biasanya pembedaan kedudukan dan derajat itu bersifat minim, karena warganya sedikit dan individu-individu yang dianggap tinggi juga tidak banyak macam jumlahnya. Sementara di dalam masyarakat yang kompleks, biasanya pembedaan kedudukan dan derajat juga bersifat kompleks, karena warganya banyak dan individu-individu yang dianggap tinggi juga banyak macam dan jumlahnya. (Kuncaraningrat : 1977).

5.3 Kesenian dan Teknologi

Pertumbuhan seni dan teknologi di Maluku Tenggara dapat ditelusuri melalui gambaran kehidupan masyarakat tersebut melalui peninggalan archeologis dan gambar-gambar serta lukisan-lukisan yang ditemukan di gua-gua dapat memberikan arti simbolik tentang kehidupan penduduk sekaligus keseniannya. Dari ekspresi seni pada lukisan-lukisan tersebut dapat diduga bahwa kehidupan seni di Maluku Tenggara ini telah dijalani sejak zaman Mesolithicum.

Di gua-gua di kepulauan Kei dijumpai lukisan-lukisan dari masa itu dalam tata warna merah dan putih, berbentuk telapak tangan, manusia, perahu dan binatang melata. Juga ikan, burung dan berbagai simbol tertentu yang mempunyai arti-arti tertentu pula. Gambar-gambar pada dinding gua itu dilukiskan dengan teknik yang sudah baik, yaitu dengan cara menggores dan memahat. Peralatan-peralatan kerja yang digunakan seperti kapak lonjong yang ditemukan di daerah Tanimbar terbuat dari batu yang lebih bagus dan dikerjakan lebih halus dan licin. Bahkan pada tangkai dan permukaan (sisi kiri kanan) kapak sudah dibuat ukiran-ukiran sederhana. Selain itu ditemukan gelang-gelang dan kalung dari batu-batu indah yang diduga merupakan perhiasan wanita atau pun pria. Perhiasan-perhiasan ini ada pula yang dikombinasikan dengan kerang dan siput yang menambah keindahan dan nilai ekonominya. Ada juga hiasan gelang atau konde yang terbuat dari kerang dan tulang sudah dipoles halus dan indah. Juga mahkota dari batu dan siput yang merupakan perlengkapan pakaian pengantin. Peralatan dapur seperti periuk dan belanga terbuat dari tanah, juga diberi ukiran-ukiran hiasan tenun dengan pola anyaman, garis-garis miring dan lingkaran-lingkaran kecil. Selain itu ditemukan juga perhiasan-perhiasan dari perunggu dan kuningan dalam bentuk gelang kaki maupun gelang tangan yang dapat digunakan pria dan wanita.

Di duga bahwa kepandaian dan ketrampilan mengukir, mengasah, melicinkan batu-batu, didapat secara turun-temurun dan sudah menjadi milik masyarakat. Mereka juga

sudah memiliki jiwa seni sehingga dapat memahat patung-patung membentuk tembikar bahkan menuangkan patung-patung logam serta benda-benda keperluan hidup lainnya. (Sejarah Daerah Maluku: 1978). Dapat dikatakan bakat seni masyarakat telah dituangkan di berbagai segi kehidupan mereka. Semuanya itu tidak terlepas daripada pengaruh lingkungan sekitarnya serta kepercayaan dan pandangan hidup masyarakat terhadap kitaran alam.

Para penjelajah dari masa Porugis maupun Belaanda telah mencatat kemajuan-kemajuan di berbagai bidang seni dan teknologi. Diantaranya seni memahat, seni ukir, seni suara, seni tari, seni rupa dan seni hias maupun seni kriya. Pada dasarnya ada suatu pola umum dan persamaan yang dapat dijumpai di seluruh daerah Maluku, namun ada hal-hal khusus yang dapat dikemukakan di sini. Misalnya dalam segi berpakaian di Tanimbar dan Kisar sudah menggunakan bahan yang ditenun sendiri. Tenunan untuk pakaian wanita dan pria sudah diberi motif-motif hiasan yang menarik dan dengan warna-warna tertentu. Warna hitam, merah dan kuning merupakan warna-warna yang dominan. Warna-warna tersebut diramu dari berbagai akar-akaran dan kulit kayu sehingga menghasilkan berjenis warna yang diinginkan. Cara menguraikan benang, yang terbuat dari serat tumbuh-tumbuhan sudah mereka kuasai dengan baik. Dengan menggunakan peralatan tenun dari kayu, sehelai bahan untuk pakaian dapat diselesaikan dalam beberapa hari saja. Melalui pengalaman-pengalaman yang mereka miliki kain-kain yang ditenun semakin halus dan indah. Teknologi ini banyak dijumpai di pulau Tanimbar dan Kisar.

Berbagai motif dan hiasan dijumpai pula pada barang-barang anyaman, demikian pula berbagai lukisan pada bahan-bahan tembikar. Kepandaian membuat bahan-bahan tembikar dari tanah liat itu kemudian diperindah dengan memberi motif-motif hiasan yang menarik seperti benda-benda periuk-belanga dan tempayan-tempayan air yang banyak dijumpai di kepulauan Kei.

Jenis-jenis seni kriya lain yang dapat ditemukan antara lain seni anyaman. Seni kriya ini di kepulauan Kei sudah dijumpai sejak masa madya. Berbagai anyaman dari bambu, rotan dan tikar pandan yang halus dengan warna-warni yang baik dan menarik dikerjakan dengan teknik yang sederhana tetapi mempunyai nilai seni dan ekonomi yang tinggi. Sementara seni memahat sudah berkembang di pulau Tanimbar. Di sini sudah dikenal patung-patung dari kayu maupun batu yang dibuat dalam bentuk yang besar maupun yang kecil. Bahkan ada kemungkinan mereka sudah mengenal teknik menuang dan mencetak patung dari logam. Pembuatan patung dan arca tidak terlepas dari segi *religijs magis* yang ada di dalam kehidupan para leluhur mereka. Patung-patung mungil Maluku Tenggara memiliki bentuk-bentuk individu yang dikenang. Misalnya arca-arca leluhur, baik pria maupun wanita. Arca-arca ini disimpan sebagai hiasan, tetapi terutama sebagai warisan keluarga, bersama-sama dengan barang-barang lainnya.

Taylor dan Aragon yang mengadakan penelitian khusus tentang seni Maluku Tenggara, mengungkapkan bahwa arca-arca leluhur pria yang duduk dalam posisi tradisional dan diberi "penghormatan" dengan memasukkan unsur kursi yaitu suatu objek import merupakan simbol status yang tinggi. Meskipun ada patung atau arca yang hidungnya, anting-antingnya, dan perhiasan kepalanya sudah rusak dan mata kulit kerang yang ditempelkan sudah hilang, hanya giginya dari kulit kerang diukir yang masih tersisisa sosok itu tetap dihormati. Sosok leluhur lainnya yang dilengkapi dengan memberikan topi Eropa yang khas, menandakan sosok leluhur tersebut juga mempunyai kedudukan yang tidak rendah. Ada pula patung-patung kecil yang dipahat secara abstrak, menurut Taylor dan Aragon lebih mirip seperti sosok leluhur dari Nias. Ada patung-patung yang lebih kecil dipahat dari tulang sapi. Biasanya dibawa kemana-mana sebagai jimat dalam kantong siri milikny.

Keterampilan seni ukir yang sudah mereka miliki diwariskan pada generasi berikutnya. Ukiran-ukiran yang bernilai sakral dijumpai pada perahu-perahu yang disebut

Belang, Kora, alat-alat senjata dan barang-barang lainnya bahkan dijumpai pula pada bangunan-bangunan rumah seperti pada tiang-tiang penyangga dan dinding-dinding rumah. Di pulau Leti dan Lakor misalnya ada papan-papan yang dipahat dan dipakai sebagai pelindung kekuatan supranatural di depan rumah. Ada gambar ayam jantan dan pohon di puncak papan tersebut serta ikan dan katak di dalam jalur-jalur ombak yang lebih ke bawah. Hal itu mengingatkan kita pada pembagian kosmik antara dunia atas dan dunia bawah atau antara laut dan darat. Ada pula ukiran-ukiran pada papan perahu yang menggambarkan ayam jantan besar mencotok tanah, dengan gambar spiral muncul dari punggungnya sebagai sayap. Dari belakang ekor ayam dipahatkan spiral-spiral kecil yang menuju ke puncak ornamen yang berbentuk layar perahu. Ada papan perahu yang diukir menggambarkan binatang *mamalia*. Bagian depan papan dihiasi dengan sederet kulit kerang yang disemat dengan tali.

Banyak desa di Tanimbar, Babar, Damar, Leti dan Luang memiliki altar-altar yang bagus di tempat yang terbuka sebagai tempat pemujaan. Altar-altar desa tersebut juga diukir dalam bentuk perahu terbuat dari batu ataupun kayu yang keras. Dewasa ini perahu-perahu yang diukir bagus tidak lagi dibuat di Maluku Tenggara, namun upacara-upacara persekutuan desa masih tetap menggunakan perahu sebagai alat transportasi utama dan sarana untuk memperbaharui persahabatan. Bepergian dalam perahu-perahu seperti itu masih diadakan.

Lebih jauh Aragon dan Taylor menyebutkan bahwa di daerah ini terutama Tanimbar sangat mementingkan jenis (*gender*) di dalam mengklasifikasi objek, kegiatan bahkan kelompok sosial. Gejala ini tersimpul dalam pemberian barang-barang berharga berjenis kelamin laki-laki seperti perhiasan penutup dada (*korese*), anting-anting bulat (*loran*), pedang dan gading gajah diberi oleh keluarga pengantin pria kepada keluarga pengantin wanita dalam proses upacara perkawinan. Sebaliknya barang-barang berharga berkelamin wanita yang diberikan keluarga pengantin wanita kepada keluarga

pengantin pria antara lain, tekstil atau pakaian hasil tenunan yang bagus (eman untuk sarung), manik-manik, anting-anting yang dibuat dengan banyak lubang dan gelang kerang. Barang-barang tersebut kadang-kadang disimpan sebagai barang warisan. Barang-barang warisan yang bernilai tinggi dimiliki dan ditukarkan diantara keluarga-keluarga *aristokrat* atau ningrat. Sebaliknya barang-barang yang tidak begitu bernilai dipertukarkan diantara orang kebanyakan. Objek-objek berjenis pria cenderung solid dan kuat, diasosiasikan dengan kematian, panas dan berburu. Sedangkan objek-objek berjenis wanita cenderung ringan dan merujuk pada bahan sandang; misalnya, kain untuk membungkus dan benang untuk merajut atau menenun. Biasanya diasosiasikan dengan kelahiran, kesejukan dan berkebun. (Taylor dan Aragon : 1992). Banyak pria Tanimbar orang sudah membuat perhiasan dada (peniti) dari emas. Peniti tersebut dapat dikenakan pria ataupun wanita dan dianggap sebagai barang berharga berjenis pria. Biasanya diberi oleh kerabat suami kepada istri. Menurut Mc. Kinnon yang dikutip Aragon dan Taylor mengungkapkan bahwa barang-barang emas yang merupakan barang warisan dari leluhur dianggap mempunyai asal-usul dan kekuatan supranatural, biasanya disimpan sebagai barang warisan di rumah-rumah keluarga tertentu. Sampai pada abad 19 dan awal abad ke 20, belum banyak pertukangan emas di Maluku Tenggara ini. Kecuali untuk beberapa kerajinan anting-anting dan cincin emas yang khas ada di Luang. Jadi kemungkinan besar perhiasan-perhiasan emas itu diperdagangkan dari wilayah Indonesia lainnya. (Mc. Kinnon : 1988 dalam Taylor dan Aragon : 1992). Perhiasan emas dengan ornamen gantung yang diperoleh dari para leluhur juga diberi status suci dan dianggap berasal dari dunia lain. Disebutkan bahwa ornamen-ornamen gantung seperti itu dan emas bulat sering dipakai pria dan wanita di Leti, Moa, Lakor dan Luang. Dalam tata adat Luang disebutkan juga bahwa bukan saja sebagai perhiasan melainkan juga sebagai pembayar denda terhadap pelanggaran hukum adat. Umpamanya seorang pria mempunyai hubungan seks gelap dengan seorang wanita dari tingkat sosial yang lebih tinggi dihukum dengan membayar denda berupa bulatan pipih

emas. (Tata adat istiadat Negeri Luang, Naskah MF.66/L.I/6/A, Bundel Maluku (2), Pustaknas).

Keahlian dalam seni suara, dapat didengar ketika mereka melagukan syair-syair *Kapata* (lagu) yaitu, *nyanyian-nyanyian tanah* (lagu daerah) yang berhubungan dengan sejarah dan kepercayaan (religi). Juga lagu-lagu bebas sebagai pujaan terhadap keindahan alam dan kekayaan, dilagukan waktu beristirahat dari bekerja di kebun atau di laut, baik secara perorangan maupun secara berkelompok oleh para muda-mudi. Alat-alat musik yang umum mengiringi lagu-lagu dan tari-tarian adalah *tifa* dan *gong (totobuang)*, di samping alat-alat dari bambu seperti suling dan kulit siput (kulit bia). Dengan adanya kontak-kontak dengan dunia luar, penduduk mulai mengenal dan mempergunakan alat-alat musik baru seperti biola, gitar, sasando dan alat-alat tiup dari logam. Orkes-orkes gesek mulai berkembang di kampung-kampung di samping orkes-orkes suling dan orkes kulit siput (kulit bia).

Dalam dunia seni tari, berkembang berbagai jenis tarian dengan berbagai gerakan sesuai dengan isi, jiwa dan tujuan tarian tersebut. Sifat dari tari-tarian itu bermacam-macam, antara lain tari perang, tari untuk menyambut dan menghormati tamu, tari pergaulan muda-mudi dan tari yang berhubungan dengan upacara-upacara adat dan keagamaan. Di pulau Kei dan Tanimbar *tari panah* merupakan tarian perang, yang biasanya digelar pada upacara-upacara adat. Demikian pula *tari cakalele* seperti di Maluku Tengah dan Maluku Utara. Ada tarian yang disebut *tari sosoi* dan *tari ular* digelar untuk menghormati tamu dan tari sawat yang motifnya tari pergaulan.

Mengenai seni sastra, dikembangkan dalam bentuk syair dan pantun dalam bahasa daerah masing-masing suku. Cara mengucapkan syair-syair tersebut umumnya dengan irama dalam bentuk lagu *Kapata* atau *Legu*. Syair-syair *Kapata* pada umumnya selalu berhubungan dengan peristiwa sejarah dan adat, sedangkan pantun umumnya berhubungan dengan suasana pergaulan atau santai dan gembira.

Cara memelihara dan menurunkan ekspresi seni-budaya ini ialah melalui pendidikan tradisional yang berlangsung secara turun-temurun. Dari orang tua diturunkan kepada anak-anak atau dari orang-orang tua kepada pewaris yang berhak menerimanya. Semuanya berlangsung dan diatur oleh norma-norma adat. Di beberapa kampung di kepulauan Kei dan Seram terdapat jenis-jenis *Kapata* yang hanya boleh dilagukan oleh kampung-kampung tertentu, orang-orang tertentu dan juga pada saat-saat tertentu. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan mendapat sanksi berupa hukuman adat. bahkan kadang-kadang bisa menimbulkan perselisihan dan peperangan antar suku. Bentuk-bentuk kesenian asli yang dimiliki penduduk ini kemudian mendapat pengaruh-pengaruh luar seperti seni budaya suku bangsa Indonesia lainnya dan seni budaya Islam dan Eropa. Akibat daripada pertemuan tersebut menurut Pattikaihatsu dkk, telah terjadi perubahan-perubahan sosial-kultural. Dalam sejarah sosial daerah Maluku diungkapkan bahwa persentuhan sosial kultural itu telah menjurus ke arah suatu sintese atau integrasi sosial kultural baru, yang terdiri dari unsur-unsur yang sebagian berasal dari luar dan sebagian dari dalam. Perubahan-perubahan sosial-kultural tersebut terlihat dalam lembaga-lembaga pemerintahan, keagamaan, bahasa serta ekonomi dari masyarakat adat. Selanjutnya disebutkan pula bahwa perubahan itu memupuk pertumbuhan dan perkembangan beberapa lembaga baru di dalam masyarakat, yaitu gereja dan jemaat, mesjid dan langgar beserta jama'ahnya, tempat-tempat melakukan pengajian serta sekolah-sekolah minggu maupun sekolah umum.

Pada abad 18 dan 19, pengaruh dan akibat dari perubahan-perubahan yang telah dialami masyarakat Maluku itu terus berkembang. Pola-pola kemasyarakatan dan kebudayaan yang berkembang akibat kontak dengan dunia luar dikembangkan dan disesuaikan dengan fungsi-fungsi baru yang diharuskan oleh penguasa kolonial yang memerintah. Oleh sebab itu unsur-unsur budaya Barat mendapat tempat yang utama di kota-kota. Sedang di desa-desa atau daerah yang terpencil di mana adat

istiadat dan ikatan batin dan kekerabatan masih kuat, kebudayaan “asli setempat” masih nampak terpelihara.

BAB VI

SIMPULAN

Tulisan ini merupakan suatu gambaran sejarah perjalanan atau perkembangan kebudayaan yang terjadi di Propinsi Maluku sejak masa awal sejarah daerah itu. Memang masih banyak kekurangan dalam menampilkan wajah sejarah kebudayaan Maluku ini, karena kurangnya data dan bahkan kelemahan-kelemahan yang kami miliki. Namun kami tetap berusaha untuk menggambarkan sejarah kebudayaan Maluku ini dari segi sosial kultural sampai abad ke-19 dan kenyataan dan geografi dan budaya setiap daerah tingkat dua sampai dengan 50 tahun yang lalu. Pada masa itu telah terjadi berbagai rentetan peristiwa budaya yang terdapat dalam berbagai bidang. Peristiwa-peristiwa dan perkembangan-perkembangan yang terjadi itu mengakibatkan perubahan-perubahan yang mendasar dalam kebudayaan masyarakat Maluku. Dari beberapa aspek yang menjadi pusat perhatian kajian ini antara lain tentang sistem pemerintahan, sistem kesatuan hidup, agama, budaya dan bahasa masing-masing menampakan ciri-ciri tersendiri sampai tingkat tertentu namun masing-masing juga memiliki keterkaitan satu sama yang lainnya dalam perjalanan sejarah. Masing-masing aspek tersebut memperlihatkan anggapan yang tidak selalu sama terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam masa perjalanannya yang demikian panjang.

Dua abad pertama yang telah diidentifikasi para ahli sejarah dan budaya, yaitu sejak tahun 1400-an sampai 1600-an,

merupakan suatu masa yang disebut dengan masa *Sturm und Drang*. Telah terjadi berbagai peristiwa serang-menyerang, tekanan-tekanan, gangguan-gangguan, yang menentukan arah perkembangan sosial kultural Maluku dan sekaligus sejarah kebudayaannya. Persentuhan kebudayaan yang terjadi dulu itu ternyata telah berlangsung dalam suasana kekerasan dan juga paksaan. Kemudian pada masa-masa selanjutnya sampai dengan abad 20, pola-pola kemasyarakatan dan kebudayaan yang berkembang merupakan dampak dari persentuhan dengan budaya asing/dunia luar tersebut. Dimasa itu bentuk-bentuk kebudayaan disesuaikan dengan fungsi-fungsi baru yang yang dihadapkan oleh para penguasa, baik itu unsur yang sudah beradaptasi maupun unsur asing yang diambil alih. Telah berkembang kekuasaan-kekuasaan tradisional mulai dari bentuk yang “asli” sampai dengan bentuk kesultanan.

Empat bentuk kesultanan yang pernah berkembang hanya dua yang dapat dikatakan eksis dalam percaturan politik dan ekonomi sampai abad ke-20 yaitu Ternate dan Tidore. Keempat kesultanan itulah yang pada awalnya dikenal sebagai Maluku di daerah Maluku Utara sekarang. Kemudian seluruh kepulauan yang terbentang antara Laut Arafura, Laut Banda, Selat Makassar, Laut Halmahera disebut demikian karena adanya perkembangan administrasi pemerintahan di masa kekuasaan kolonial Belanda. Dalam administrasi pemerintahan Belanda, seperti sudah diutarakan dimuka lebih cenderung memecahkan sistem pemerintahan yang mulai membesar, sehingga akhirnya terpecah-pecah supaya mudah dikontrol.

Hal lain yang menonjol dari kebudayaan Maluku sampai sekarang adalah sistem kesatuan hidup. Tentu saja dengan implikasi /keterkaitan yang telah berproses sekian lama, sehingga muncul berbagai struktur kemasyarakatan yang bercorak pula. Sistem “*pela*” dan “*gandong*” adalah salah satu bentuk yang akhir-akhir ini ramai dibicarakan, karena mulai mengalami disintegrasi. Padahal sampai pada kurang lebih 40 tahun yang lalu, sistem tersebut merupakan suatu lembaga kemasyarakatan yang dapat mengikat erat kelompok-kelompok masyarakat dari berbagai lapisan.

Perubahan lainnya terjadi dalam bidang keagamaan dan kepercayaan. Kepercayaan asli yang telah beradaptasi dengan agama-agama besar (agama samawi) yaitu Islam dan Kristen dapat dikatakan hampir tersingkirkan. Akan tetapi dalam upacara-upacara adat rakyat unsur-unsur asli dimunculkan sebagai sesuatu yang sakral dan magis. Bahkan kadang-kadang dianggap bahwa unsur tersebut mempunyai hubungan keseimbangan antara macrocosmos dan microcosmos sehingga perlu dipelihara. Hubungan macrocosmos dan microcosmos disini tidak seperti konsep keseimbangan yang dianut dan dikenal dalam agama Hindu atau Budha ataupun juga dalam kebudayaan Bali dan Jawa. Namun dalam hubungan ini "kepercayaan asli" Maluku masih mengenal "*Upu lanite*" (penguasa langit), "*Upu latunusa*" (penguasa pulau) dan "*Lerwulan*" (matahari dan bulan), "*Aiwarat*" (pohon-pohon), "*Aiwat*" (batu-batu), "*Tun lair*" (tanjung dan labuan) dan "*Nuhut tanat*" (gunung dan tanah) yang kira-kira sama dengan penguasa lingkungan alam. Ketiga unsur ini masih hidup dalam kehidupan keberagaman penduduk Maluku sampai sekarang ini.

Dalam hal budaya khususnya kesenian boleh dikatakan mengalami perkembangan yang lambat. Hanya seni suara dan sedikit seni musik dapat dinikmati di Maluku Tengah terutama di Pulau Ambon dan Lease, sedang di Maluku Tenggara seni rupa (seni arca) tidak mengalami perkembangan. Di Maluku Utara yang masih menyimpan sisa kebudayaan keraton hanya sedikit sekali upaya untuk mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan keraton. Dewasa ini umumnya orang tidak dapat membedakan lagi tingkat-tingkat kesakralan ataupun kesopanan dalam aktifitas seni budaya maupun dalam struktur sosial. Oleh karena itu pengaruh-pengaruh dari luar dapat ditanggapi begitu saja tanpa menyaringnya atau menyeleksi dengan seksama. Arus pariwisata yang lemah ke Maluku mungkin disebabkan oleh kurangnya promosi.

Lingkungan alam Maluku memang dapat dikatakan indah dan masih menyimpan kekayaan yang melimpah terutama di

dalam lautnya. Namun tanpa kesadaran, rasa memiliki dan peningkatan segala sumberdaya, maka segala aspek dan komponen kehidupan yang ada akan tidak mempunyai dampak bagi generasi Maluku ke depan.

Daftar Pustaka

- Andili Bahar A., 1979 "Profil Daerah Maluku Utara", *Majalah Ilmu-ilmu Sastra Indonesia*, Jilid 8, No. 1.
- Bartels Dieter, 1977 *Guarding the Invisible Mountain: Intervillage Alliances, Religious Syncretism and Ethnic Identity Among Ambonese Christians and Moslems in the Moluccas*. Disertasi Cornell University.
- Burger Dh & Prayudi, *Sejarah Ekonomis Sosiologis Indonesia*, Jakarta: PN. Pradja Paramita.
- Collins James, 1992 "Research Report: studying seventeenth century Malay, dalam *Cakalele: Maluku Research Journal*, Jilid 3.
- Collins James, 1983 *The Historical Relationship of the Languages of Central Maluku, Indonesia*. Australian National University.
- Collins James, 1980 *Ambonese Malay and Creolization Theory*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Crab P.A. van der, 1878 "Geschiedenis van Ternate, in Ternate ansche en Maleische Tekst, Beschreven door den Tentaan Naidah, Met Vertalingn Aantekeningen door P.A. van der Crab", *Bijdragen*, Jilid 151, No. 2.

- Christie Jan Wisseman, "State Formation in Early Maritime Southeast Asia. A Consideration of the Theories and Data", *Bijdragen*, Jilid 151, No. 2
1995
- Deacon A.B., "The Kakihan Society of Ceram and New Guinea Initiation Cults", *Folklore*, No. 36.
1925
- Depdikbud, *Sejarah Daerah Maluku*, Ditjenbud, Jakarta.
1976
- Duyvendak J., *Het Kakehan-Genootschap van Seran*, Amelo: W. Hilarius.
- Ekris A. van, "Het Ceramsche Kakianverbond", *Mededelingen vanwege het Nederlandsche Zendingelingengenootschap*, No. 9
1986
- Ekris A. van, "Woordenlijst van eenige dialecten der landtaal op de Ambonsche eilanden", *Mededelingen vanwege het Nederlandsche Zendingelingengenootschap*, No. 8, No. 9.
1865, 1865
- Fraassen Ch. F. van, *Ternate, de Molukken en de Indonesische Archipel. Van Soa Organisatie en Vierdeling: Een Studie van Traditionale Sameleving en Cultuur in Indonesie*, Disertasi Leiden.
1987
- Fraassen Ch. F. van, "Court and State in Ternaten Society", makalah *Seminar Halmahera dan Raja Ampat*, Jakarta 1-5 Juni 1981.
1981
- Fraassen Ch. F. van, *Ambon Rapport*. Thesis M.A. Leiden
1972
- Hall Kenneth R., *Maritime Trade and State Development in Early Southeast Asia*. Honolulu: University of Hawaii Press.
1985

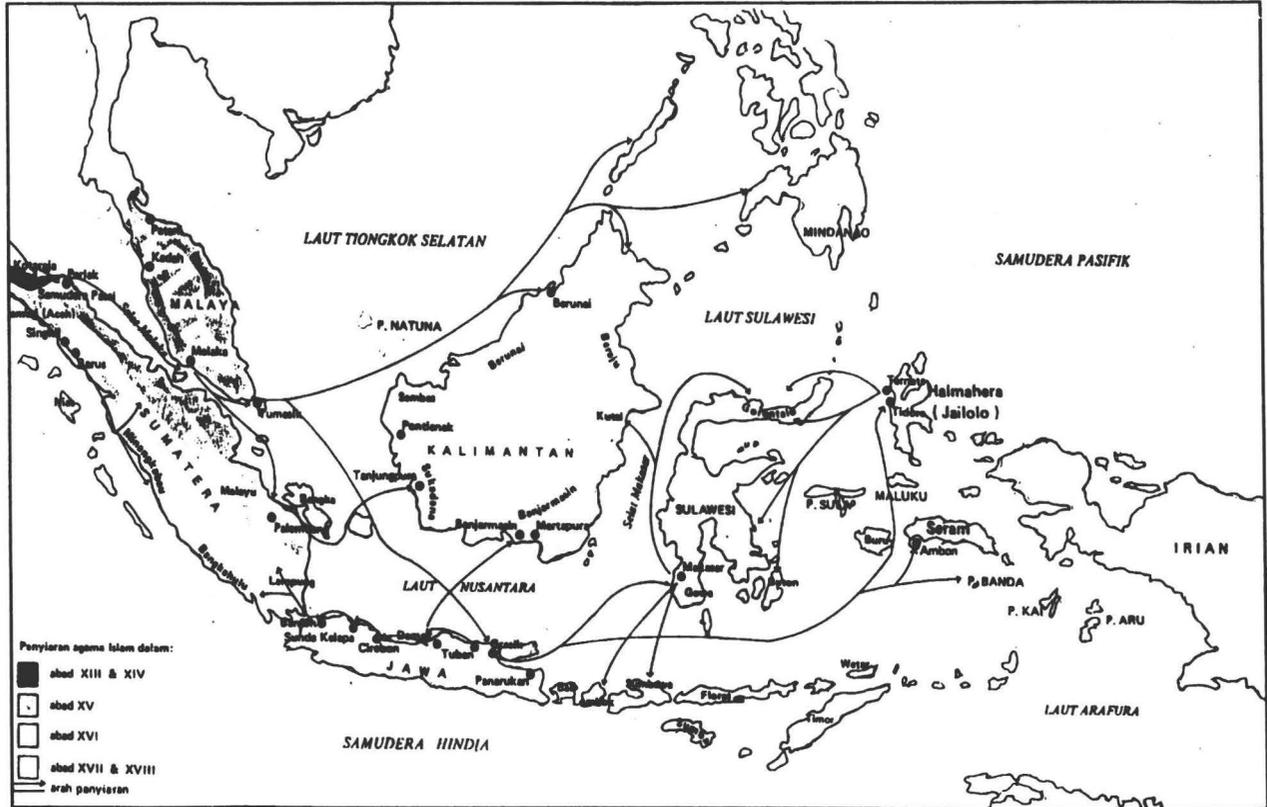
- Hanna Willard A., *Kepulauan Banda. Kolonialisme dan Akibatnya di Kepulauan Pala.* Jakarta: Penerbit Gramedia.
1983
- Hoevell G.W.G.C. van, "Twee zangen in de Ambonsche landtaal (bahasa tanah) vertaald en verklaard:, dalam *Tijdschrift voor Indische Taal, Land, en Volkenkunde*, Jilid 27.
1882
- Hoevell G.W.G.C. van, "Iets over de voornaamste dialecten der Ambonsche landtaal (bahasa tanah)", *Bijdragen*, Jilid 4.
1977
- Jacobs S.J. H., "Wanneer werd de stad Ambon gesticht? Bij eenvierde eeuwfeest", dalam *Bijdragen*, Jilid 131, No. 4.
1975
- Kartodirdjo Sartono, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Djambatan.
1987
- Kuncaraningrat, *Dokumen-dokumen Abad.*
1976
- Lapian A.B., "Bacan and the Early History of North Maluku", dalam Visser
- Leirissa R.Z., *Halmahera Timur dan Raja Jailolo*, Jakarta: Balai Pustaka.
1996
- Leirissa R.Z., *Bunga Rampai Sejarah Maluku*, Jakarta.
1971
- Leirissa R.Z., "Changing Maritime Trade Patterns in the Seram Sea", dalam G.J. Schutte (ed.), *State and Trade in the Indonesian Archipelago*, Leiden: KITLV Press.
1994
- Leirissa R.Z., "Penerjemahan Alkitab di Indonesia", dalam Weinata Sairin et.al. (eds.), *Persebaran Firman di Sepanjang Zaman*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, hlm. 3958.
1994

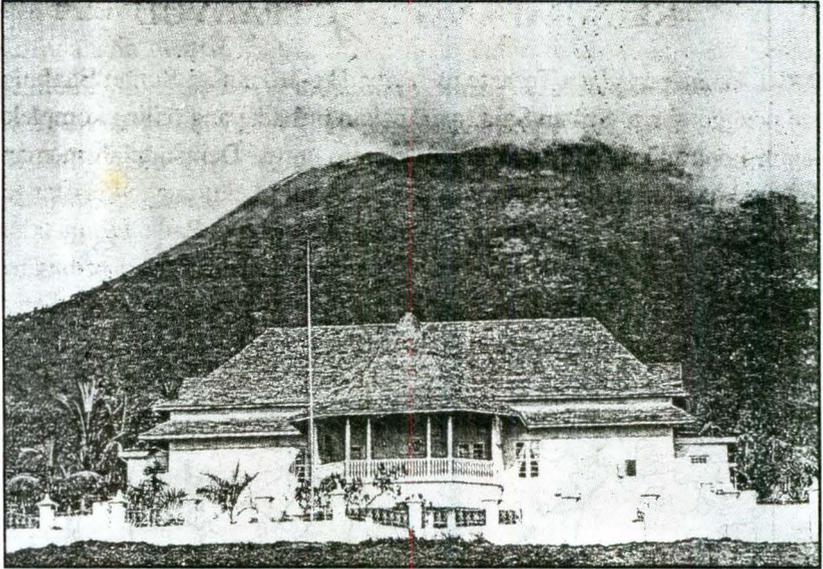
- Leirissa R.Z.,
1993 "The Structure of Bugis-Makasar trade in pre-modern Moluccas ", dalam *Review of Indonesian and Malaysian Affairs*, Jilid 27, No. Winter/Summer, hlm. 77-90.
- Leirissa R.Z.,
1981 "Dokumen-dokumen abad ke-19 yang berbahasa Melayu dari "Arsip Ambon" di Arsip Nasional R.I. Jakarta", *Seminar Bahasa Indonesia*, FSUI.
- Lestaluhu, M.R.L.,
1988 *Sejarah Perlawanan Masyarakat Islam Terhadap Imperialisme di Daerah Maluku*, Bandung: PT. Alma'arif.
- Leur J.C. van,
1955 *Asia Trade and Society. Essays in Asia Social and Economic History*. The Hague: Martinus Nijhoff.
- Ludeking, E.W.A.,
1868 *Schets van de Residentie Amboina*. Den Haag: Martinus Nijhoff.
- Manuhutu Wim,
1985 "Pacifiatie in practijk: de expansie van het Nederlands gezag op Ceram 1900--1942, dalam J. van Goor (ed.) *Imperialisme in de Marge: De Afronding van Nederlandsch Indie*. Utrecht : Hes, hlm. 267-315.
- Manusama, Z.J.,
1977 *Hikayat Tanah Hitu. Historie en Sociale Structuur van de Ambonse Weilanden in het Algemeen en van Uli Hitu in het Bijzonder tot het Midden der Zeventiende Eeuw*. Disertasi Leiden.
- Masinambouw E.M.K., (ed.). *Maluku dan Irian Jaya*. Buletin
1984 Leknas, Terbitan Khusus Jilid 3, No. 1.
- Masinambouw E.M.K., *Konvergensi Etnolinguistik di Halma-hera Tengah: Sebuah Analisa Penda-huluan*. Disertasi U.I.

- Minde van der,
1990 "The sound system of Ambonese Malay",
dalam Cakalele. *Maluku Research Journal*,
Jilid 1, No. 1/2., hlm. 61-98.
- Platenkamp J.D.M.,
1990 "The Severence of Origin: A Ritual of the
Tobelo of North Halmahera", *Bijdragen*,
Jilid 146, No. 1
- Reid Antony,
1987 *Southeast Asia in the Age of Commerce
1450--1680. Vol One: The Lands Below the
Winds*. Chiang Mai: Silkworm Books.
- Reid Antony,
1988 *Southeast Asia in the Age of Commerce
1450--1680. Vol Two: Expansion and Crises*.
Chiang Mai: Silkworm Books.
- Rumphius, G.E.,
1910 *De Ambonsche Historie*. Bijdragen Taal,
Land en Volkenkunde, No. 64
- Sachse, F.J.P.,
1922 *Seran*. Mededeelingen van het Bureau voor
de bestuurszaken der buitengewesten
bewerkt door het Encyclopaedisch Bureau,
Aflevering 29, Weltevreden: G. Kolff.
- Stresemann E.,
1927 Die Lauterscheinungen in den Amboi-
nischen Sprachen", *Zeitschrift fur Eingeborenen-Spragen*,
Supplement, 10, Berlin.
- Swellengrebel, J.L.,
1974 *In Leydecker's Voetspoor: Anderhalve
Eeuw Bijbelvertaling en Taalkunde in de
Indonesische Talen*. s-Gravenhag: Martinus
Nijhoff.
- Tauerer, O.D.,
1928,1929,1930,1931 "Beitrage zur Kenntnis der Spachen und
Dialecten von Seran", *Antropos*, No. 23,
hlm. 1000-1020; No. 24, hlm. 953-981; No. 25,
hlm. 567-578; No. 26, hlm. 109-139.
- Tauerer, O.D.,
1918 Patasiwa und Patalima: *Vom Molukkene
iland Seran und seinen Bewohnern*.
Leipzig: Voigtlander.

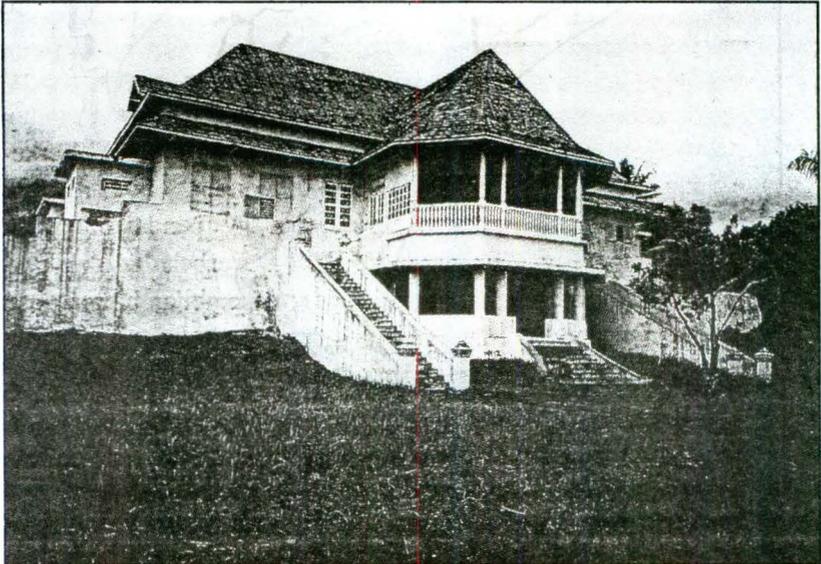
- Taylor dan Aragon, *Beyond the Java sea*.
1992
- Tetelepta J., (et.al.) *Struktur Bahasa Melayu Ambon*,
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengem-
bangan Bahasa.
- Tjia Johnny,
1992 "Partikel-partikel dalam klausa, kalimat,
dan wacana Melayu Ambon: catatan pen-
dahuluan", dalam *Cakalele: Maluku
Research Journal*, Jilid 3, hlm. 43-62.
- Valentijn Fr., *Oud en Nieuw Oost-indie*. Jilid Ia.
1734
- Visser Leontine E., (ed.). *Halmahera and Beyond. Social Sci
ence Research in the Moluccas*. Leiden:
KITLV Press 1994.
- Visser Leontine E., *My Rice Field is My Child. Social and Ter-
ritorial Aspects of Swidden Cultivation in
Sahu, Eastern Indonesia*. Dortrect Hol-
land: Foris Publications.
- Visser L.E. & Voorhoeve C.L., *Sahu-Indonesia-English Dictionary
and Sahu Grammer*. Foris Publication.
1987

MASA MASUKNYA ISLAM DI INDONESIA





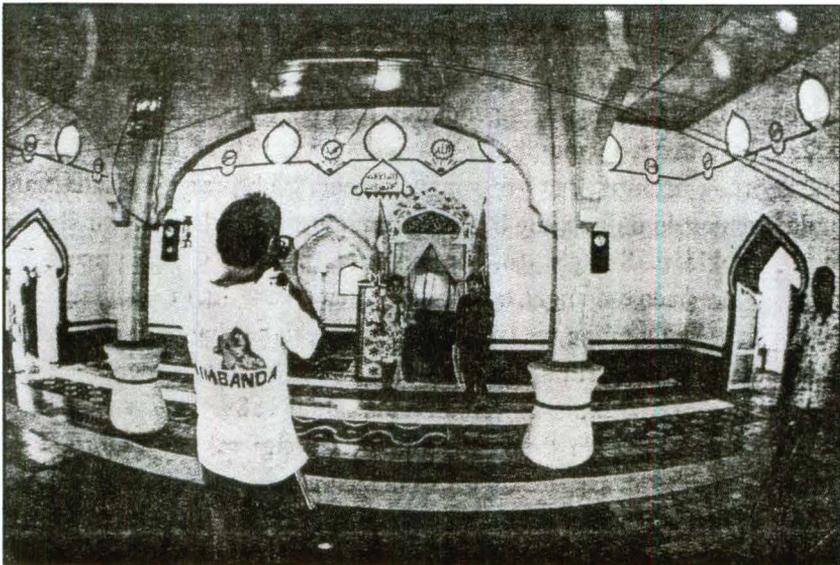
Istana Sultan Ternate, dengan latar belakang gunung berapi Gammalamma



Museum Kedaton di Ternate (kini)



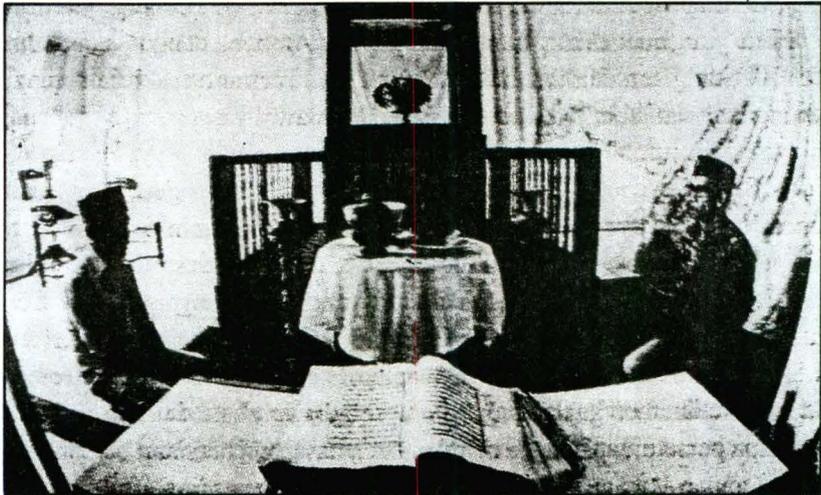
Mesjid Sultan Ternate



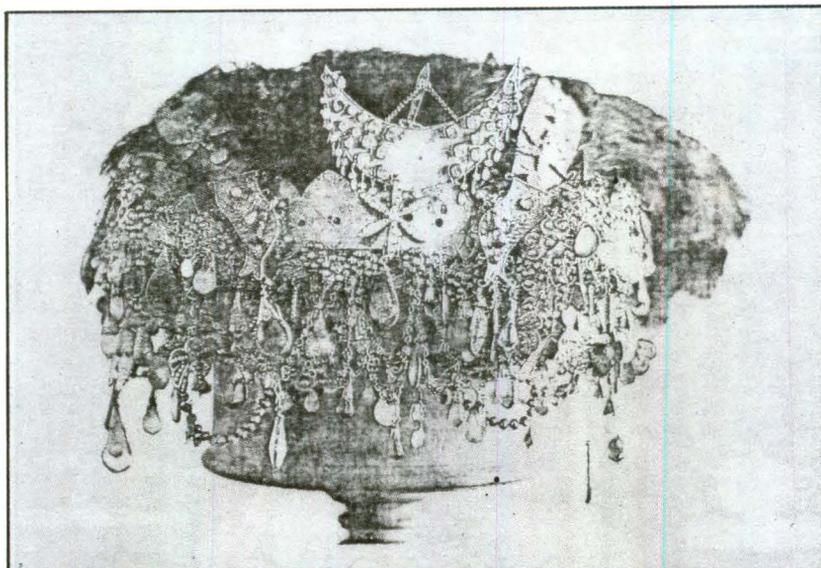
Mimbar bagian dalam Masjid



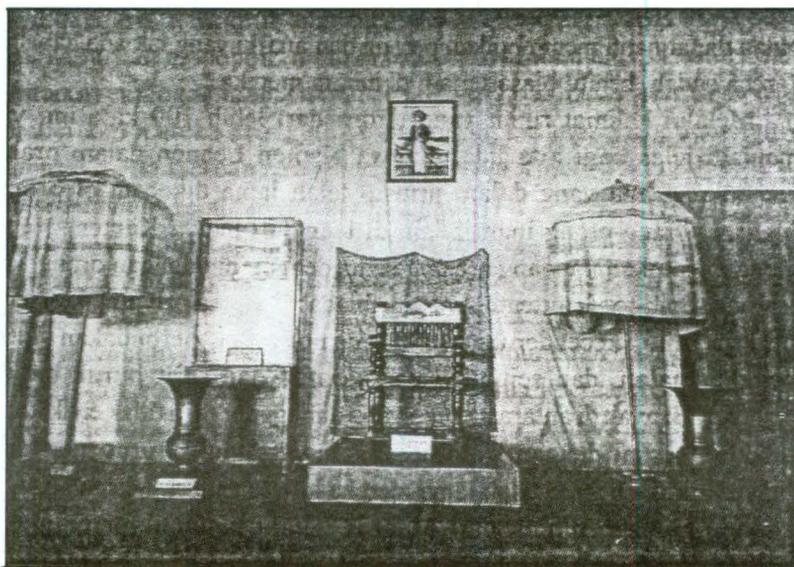
Lukisan : Sultan Ternate



Kitab Suci Al Qur'an yang tua di Keraton Sultan Ternate, berusia 400 tahun



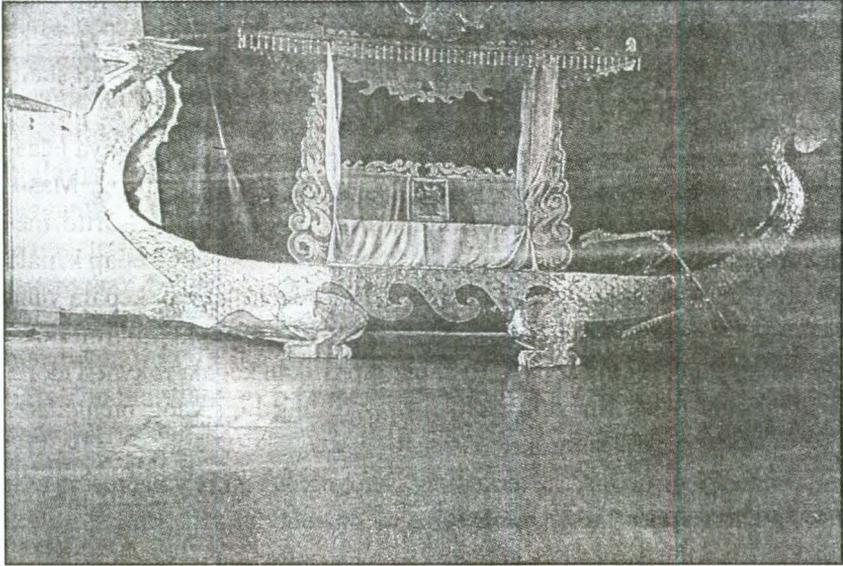
Mahkota Sultan Ternate



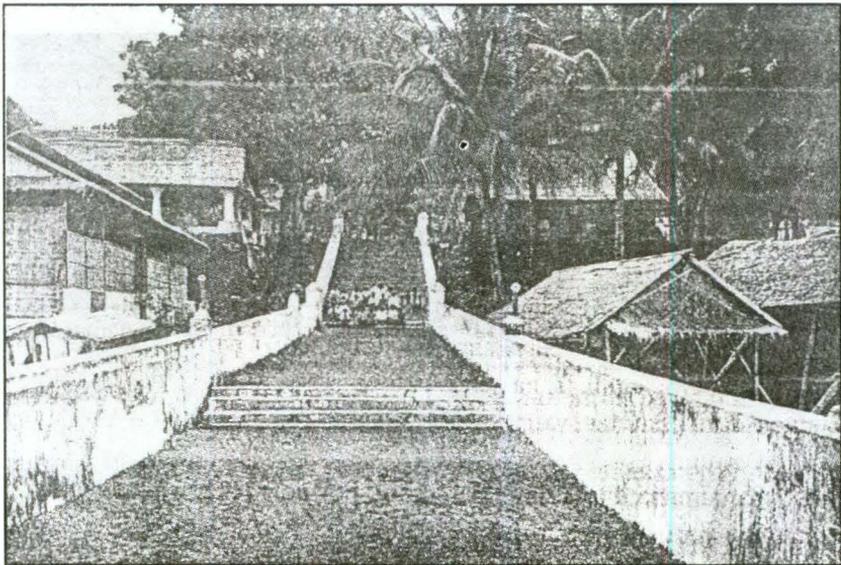
Ruang Dalam Istana Sultan Ternate



Perhiasan-perhiasan Sultan Ternate



Sebuah model Kora-kora Ternate



Jalan Menuju Kedaton Tidore di Soa-Sioe Tidore



Perahu besar yang digunakan penduduk dari satu pulau (desa) ke pulau (desa) lainnya dalam rangka upacara mengeratkan kembali persahabatan : seperti panas pela dan gandong . Mereka menari dan menyanyi di atas perahu menuju desa sahabat/pela/gandongnya.



Beberapa tarian oleh wanita dan pria yang ditarikan dalam berbagai upacara

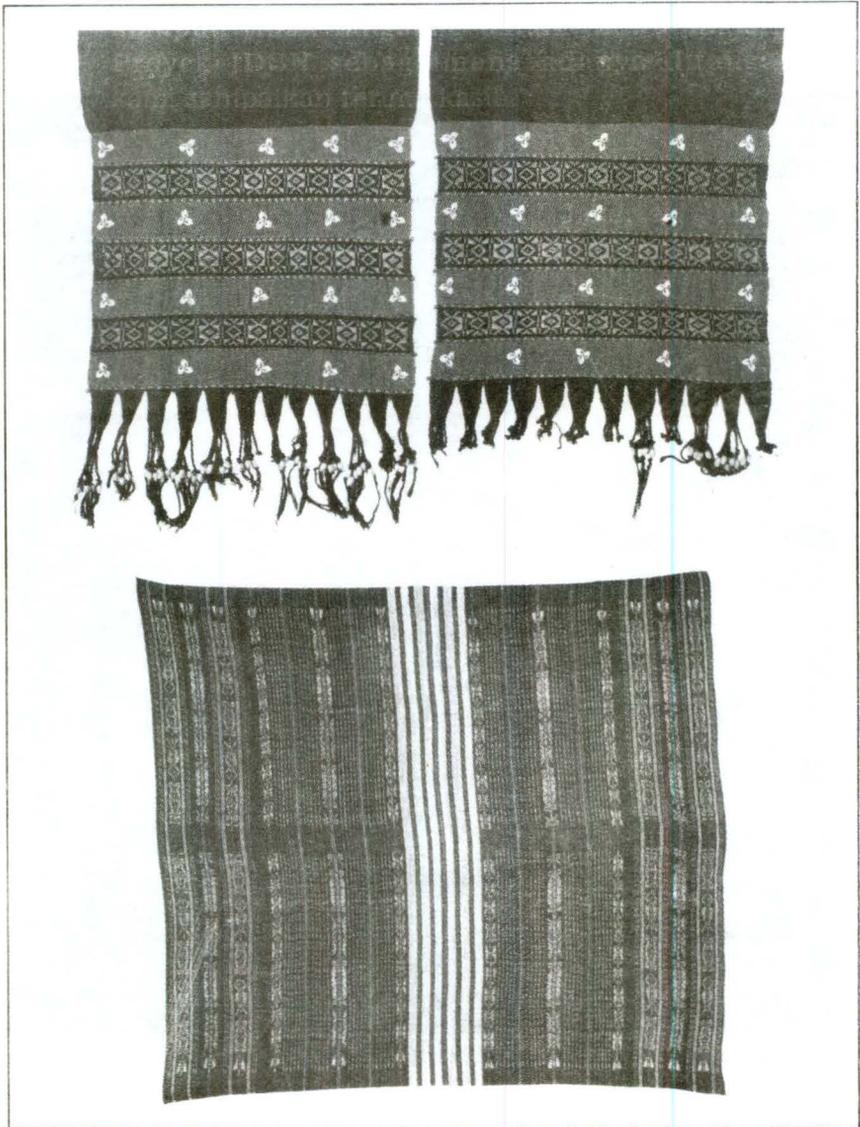


Sebuah altar pemujaan terbuat dari kayu di daerah Babar dan Leti di Maluku Tenggara (Sumber, Museum Nasional)



Figur leluhur yang dihormati, yang selalu diberi tempat istimewa di dalam rumah, diberi tempat duduk di kursi

Sumber : Museum Siwa Lima Ambon

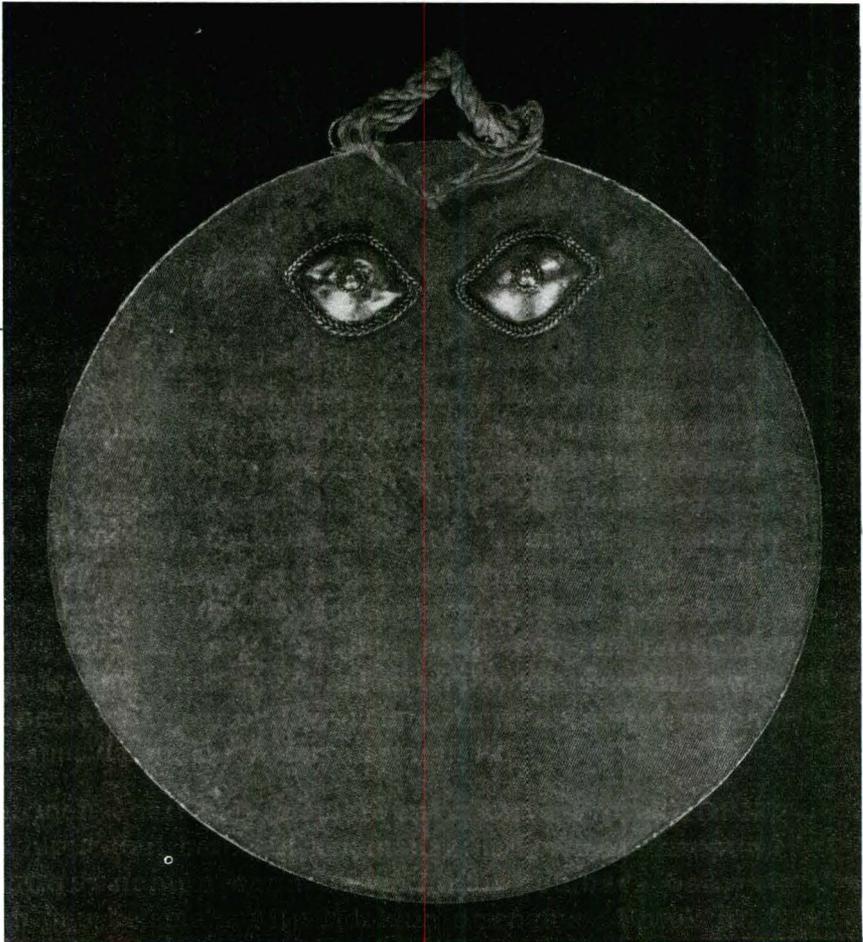


Kain tenun Tanimbar :

Atas; dibuat Eman digunakan kaum pria

Bawah; dibuat Bakan Maran, digunakan untuk sarung wanita

Sumber : Museum Siwa Lima, Ambon



Sebuah Liontin disebut *Karse*, biasanya dinadiahkan sebagai "mas kawin" wanita di pulau Moe Maluku Tenggara

